



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Mengukur Lapangan Kerja

dalam Industri Kepariwisata lebih dari Neraca Satelit Pariwisata

Studi Kasus Indonesia



**Mengukur
Lapangan Kerja
dalam Industri Kepariwisataaan
lebih dari Neraca Satelit
Pariwisata
Studi Kasus Indonesia**

Copyright © International Labour Organization 2011
Cetakan Pertama 2011

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-025160-7 (print)
978-92-2-025161-4 (web pdf)

ILO

Mengukur Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisata lebih dari Neraca Satelit Pariwisata: Studi Kasus Indonesia/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2011

90 p

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: *Measuring Employment in the Tourism Industries beyond a Tourism Satellite Account: A Case Study of Indonesia*/International Labour Office – Jakarta: ILO, 2011

86 p.

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar

Seperti sektor perekonomian lain, lapangan kerja/pekerjaan merupakan suatu dimensi penting untuk menandai dan mengakui pentingnya pariwisata dari sudut pandang produktif, sosial dan strategis. Pariwisata menawarkan beraneka ragam jenis pekerjaan, mulai dari yang berketerampilan rendah, bernilai tambah rendah hingga yang berketerampilan tinggi dan bernilai tambah tinggi. Industri pariwisata menarik minat manajer-manajer tingkat tinggi dengan spesialisasi manajemen hotel, katering dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata.

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hakekat dan cakupan industri kepariwisataan secara tepat, termasuk pola perilaku dan konsumsi wisatawan, penting kiranya untuk memiliki metoda yang akurat, efisien dan tepat waktu dalam mengumpulkan dan menilai statistik pariwisata. Statistik pariwisata memainkan suatu peran kunci dalam menentukan kebijakan dan perencanaan dengan menentukan produk-produk yang lebih disukai serta dalam pemasaran dan promosi melalui pengidentifikasian berbagai sumber pasar, dll. Secara khusus, pariwisata memainkan peran sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif.

Namun demikian, kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan secara umum, dan nilai ekonomi pariwisata dari segi pekerjaan, khususnya sebagai sumber produktif lapangan kerja pekerjaan, masih belum diukur secara memadai dan dikaji secara layak.

Untuk mengisi kesenjangan ini, International Labour Organization (ILO) dan UN-World Tourism Organization (UNWTO) bekerja sama untuk memperbaiki data statistik kuantitatif dan kualitatif mengenai kesempatan kerja terkait dengan pariwisata. Kolaborasi ini diresmikan melalui suatu perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua organisasi tersebut dan mencapai puncaknya dalam pelaksanaan Proyek Bersama ILO/UNWTO tentang *Pengukuran Kesempatan Kerja dan Perkerjaan yang layak dalam Industri Kepariwisataan*.

Proyek ini mencakup tiga kegiatan utama sebagai berikut:

- (i) Persiapan dan publikasi *Panduan Teknis tentang Praktek-Praktek terbaik untuk Mengukur Kesempatan Kerja dalam Industri Pariwisata (Technical Guide on Best Practices for Measuring Employment in the Tourism Industries)* dari ILO/UNWTO.
- (ii) Menguji kecocokan berbagai rekomendasi dalam Panduan Teknis tersebut dalam penerapannya di dua negara dengan sistem statistik dan jasa pariwisata yang sudah maju.
- (iii) Mengukur kerja yang layak dalam industri kepariwisataan.

UNWTO, bekerja sama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Komisi Eropa serta Divisi Statistik PBB, telah mengembangkan suatu Neraca Satelit Pariwisata /Tourism Satellite Account (TSA), yaitu suatu metoda untuk mengukur kontribusi ekonomi langsung dari konsumsi pariwisata dalam perekonomian nasional. Metodologi ini, diuraikan secara sangat terperinci dalam *2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework* (TSA: RMA 2008),¹ dan secara formal diadopsi oleh Komisi Statistik PBB pada bulan Pebruari 2008.

1 UN Statistics Division (UNSD), the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and the World Pariwisata Organization (UNWTO), *Pariwisata Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008* (Geneva: Statistical Commission, 2008).

TSA (Nespar) terdiri dari sepuluh tabel data ekonomi yang mengukur konsumsi internasional (dalam bentuk uang dan barang/natura), nilai tambah industri pariwisata, nilai tambah pariwisata, dan PDB pariwisata. Namun demikian, hanya satu tabel (Tabel 7) yang membahas tentang lapangan kerja.

Pada tahun 2008, revisi dari *International Recommendations for Tourism Statistics* (IRTS 2008)² diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. IRTS 2008 berisi satu bagian baru, “Bab 7: Lapangan kerja/Kesempatan Kerja dalam Industri Kepariwisata” Bab ini dimasukkan dalam IRTS terbaru dengan untuk membantu negara-negara untuk mengukur dimensi kuantitatif dan kualitatif dari kesempatan kerja guna lebih memahami dampaknya terhadap perekonomian pariwisata di suatu negara dan untuk melengkapi data kesempatan kerja terbatas yang dihasilkan untuk Tabel 7 dari TSA (Nespar).

Indonesia sudah sejak tahun 2000 menyusun suatu Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas). Di samping Nesparnas, Indonesia juga menyusun Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nespada) untuk enam provinsi, termasuk Bali. Indonesia baru-baru ini, bekerjasama dengan ILO, memproduksi serangkaian publikasi yang bermanfaat dan menarik tentang lapangan kerja pariwisata, misalnya, *Implications of the Global Economic Crisis for Tourism Employment: Case Study for Indonesia*.³

Mengingat prestasi Indonesia yang menonjol dalam pengembangan sistem statistik kepariwisataan nasional dan produksi data mengenai kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan dalam kerangka kerja Neraca Satelit Pariwisata, maka Indonesia dipilih menjadi salah satu negara perintis untuk Proyek Bersama ILO/ UNWTO. Tujuan Proyek Bersama ini adalah terlaksananya suatu kajian mendalam tentang cara-cara yang mungkin dilakukan untuk menerapkan rekomendasi internasional terbaru dalam bidang statistik kepariwisataan sehingga menghasilkan perangkat data baru tentang kesempatan kerja di dalam industri kepariwisataan, lebih dari yang ada dalam Neraca Satelit Pariwisata.

Tujuan lain kajian ini adalah memaparkan cakupan *Decent Work Indicators*/Indikator Perkerjaan yang layak Indonesia dan menawarkan mana di antaranya yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan perkerjaan yang layak dalam industri pariwisata.

Diharapkan bahwa pengalaman Indonesia dan hasil kajian ini akan digunakan untuk meletakkan landasan masa depan dalam hal data yang konsisten, selaras, teratur, kaya dan komprehensif mengenai lapangan/ kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan melampaui pengukuran yang diuraikan dalam Neraca Satelit Pariwisata.

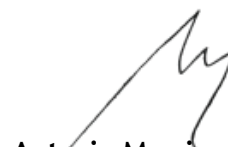
Studi kasus Indonesia ini, digagas dan ditulis di bawah bimbingan Mr. Igor Chernyshev, ILO Department of Statistics, ditulis oleh Ibu Myra P. Gunawan, Penasihat pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Institut Teknologi Bandung dan Bapak Kusmadi Saleh, Mantan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, dan dengan dukungan Bapak Adi Lumaksono, Direktur Statistik Keuangan, ICT dan Pariwisata di Badan Pusat Statistik. Dalam persiapannya, Bapak Tendy Gunawan, ILO Jakarta Office, memberikan dukungan terus menerus dan koordinasi yang efisien.



Rafael Diez de Medina
ILO Chief Statistician, Director
Department of Statistics



Peter Van Rooij
Director
ILO Jakarta Office



Antonio Massieu,
Chief UNWTO, Department of
Statistics and Tourism Satellite
Account (TSA)

2 UN Statistics Division (UNSD) and the World Tourism Organization (UNWTO), *International Recommendations for Pariwisata Statistics* 2008 (Geneva: Department of Economic and Social Affairs, 2008).

3 Mike Sharrocks, *Implications of the Global Economic Crisis for Tourism Employment: Case Study for Indonesia* (Jakarta: ILO Country Office for Indonesia, 2010).

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Istilah	8
Ringkasan Eksekutif	11
Pendahuluan	15
 BAB 1 PARIWISATA DI INDONESIA	 21
1.1 Makna penting industri/ sektor pariwisata bagi Indonesia	21
Pariwisata dan pembangunan wilayah	22
Pariwisata untuk kesedaran nasional dan budaya	22
Pariwisata sebagai cara untuk mengurangi urbanisasi	22
Pariwisata sebagai sarana pelestarian	22
Pariwisata, usaha kecil menengah (ukm) dan pekerjaan	23
1.2 Dunia kerja dalam pariwisata	24
1.3 Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata	26
1.4 Asosiasi pariwisata dan perannya dalam menciptakan kesempatan kerja	28
 BAB 2 ARTI PENTING STATISTIK LAPANGAN KERJA PARIWISATA	 29
2.1 Peraturan perundangan Indonesia yang mendasari	29
2.2 Pariwisata dan pembangunan berkelanjutan	30
2.3 Di balik industri Kepariwisataan	31
2.4 Arti penting statistik lapangan kerja sebagai indikator	31
 BAB 3 MENGUKUR KESEMPATAN KERJA DALAM INDUSTRI KEPARIWISATAAN: STIUASI DAN TANGAN LEBIH JAUH MELAMPAUI NERACA SATELIT PARIWISATA	 33
3.1 Situasi masa kini	33
3.1.1 Neraca satelit pariwisata/ <i>Tourism Satellite Accounts</i> : informasi umum	33
3.1.2 Neraca satelit pariwisata Indonesia	34
3.1.3. Berbagai sumber statistik kesempatan/lapangan kerja di Indonesia	37
3.2 Diluar neraca satelit pariwisata	40
3.2.1 Kesempatan kerja dan sektor informal	41
3.2.2 Neraca <i>Inbound-outbound</i>	42

3.2.3	Pariwisata nusantara dan internasional	42
3.3	Agenda baru pariwisata indonesia – kebutuhan akan statistik kesempatan kerja	44
3.4	Langkah-langkah ke depan	46
BAB 4 PENDEKATAN PENGUMPULAN SEPERANGKAT DATA KESEMPATAN KERJA DALAM INDUSTRI KEPARIWISATAAN: ACUAN UNTUK STATISTIK KEPARIWISATAAN INDONESIA		49
4.1.	Latar belakang	49
4.2	Kasus Australia	50
4.2	Kasus Kanada	50
	Modul sumber daya manusia / Human Resources Module of CTSA 2009	51
4.3	Pelajaran-pelajaran yang dipetik dari Australia dan Kanada	51
4.5.	Kasus Indonesia	52
4.5.1	Latar belakang	52
4.5.2	Mempersiapkan Neraca Setelit Pariwisata untuk Indonesia	53
4.3.3	Langkah-langkah tindak lanjut	54
BAB 5 PARIWISATA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK DI INDONESIA		57
5.1	Agenda pekerjaan yang layak ILO	57
5.2.	Indikator-indikator pekerjaan yang layak ILO	57
5.3	Pariwisata dan pekerjaan yang layak di Indonesia, situasi kini	60
5.4	Usulan Indikator pekerjaan yang layak (DWI) untuk sektor pariwisata di Indonesia dan sumber-sumber informasi	63
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		67
6.1	Kesimpulan	67
6.2	Rekomendasi	69
Lampiran I – Australia		71
Lampiran II - Kanada		73
Lampiran III – Bab 7 dari IRTS 2008		80

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	POPULASI USIA 15 TAHUN ATAU LEBIH YANG BEKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA SELAMA MINGGU SEBELUMNYA MENURUT JAM KERJA TOTAL	25
Tabel 1.2.	POPULASI USIA 15 TAHUN ATAU LEBIH YANG BEKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA SELAMA MINGGU SEBELUMNYA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	26
Tabel 3.1.	TREN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA DI INDONESIA 2000-2008	35
Tabel 3.2.	TREN EKONOMI PARIWISATA DAN LAPANGAN KERJA DI INDONESIA 2000-2008	35
Tabel 3.3.	PORSI INDIKATOR-INDIKATOR PARIWISATA TERHADAP INDIKATOR-INDIKATOR EKONOMI MAKRO INDONESIA 2000-2008	36
Tabel 3.4.	PERBANDINGAN PORSI INDIKATOR-INDIKATOR PARIWISATA DI PROVINSI-PROVINSI TERPILIH (DENGAN BERAGAM TAHUN ACUAN)	36
Tabel 3.5.	PERUBAHAN DALAM KONTRIBUSI PARIWISATA PADA INDIKATOR-INDIKATOR EKONOMI UTAMA 2000-2008	41
Tabel 3.6.	NERACA PEMBELANJAAN PERJALANAN 2004-2009 (DALAM JUTA USD)	42
Tabel 3.7.	TREN INDIKATORIN-DIKATORIN PARIWISATA INTERNASIONAL DAN DOMESTIK, 2001-2008	43
Tabel 5.1.	INDIKATOR-INDIKATOR PERKERJAAN YANG LAYAK DAN SUMBER INFORMASINYA	59
Tabel 5.2.	UPAH DAN GAJI YANG BEKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	61
Tabel 5.3.	DISTRIBUSI KATEGORI PENDAPATAN DARI PEKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA MENRUT LOKASI KERJA	61
Tabel 5.4.	DISTRIBUSI KATEGORI PENDAPATAN DARI PEKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA MENURUT JENDER	62
Tabel 5.5.	UPAH DAN GAJI PEKERJA TETAP DALAM PERDAGANGAN PARIWISATA MENURUT LOKASI/DAERAH	62
Tabel 5.6.	DISPARITAS JENDER DALAM UPAH DAN GAJI PEKERJKA TETAP	62
Tabel 5.7.	PERBEDAAN UPAH DAN GAJI ANTARA PEKERJA TETAP DAN PEKERJA SEMENTARA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	63
Tabel 5.8.	DWI YANG DIUSULKAN UNTUK SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA	63

Daftar Istilah

Daftar singkatan dan Istilah

AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
ASDP	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASITA	Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia
ASTINDO	Asosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan
BI	Bank Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
BTDC	<i>Bali Tourism Development Corporation</i>
CPA	<i>Canadian Productivity Accounts</i>
CSNA	<i>Canadian System of National Accounts</i>
CTSA	<i>Canadian Tourism Satellite Account</i>
DCWP	<i>Decent Work Country Program</i>
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DPBH	Direktori Perusahaan Berbadan Hukum
ECOSOC	<i>United Nations Economic and Social Council</i>
ESCAP	<i>United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific</i>
FOF	<i>Flow of Fund</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GNP	<i>Gross National Product</i>
HILDIKTIPARI	Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata
HRM	<i>Human Resource Module</i>
IDR	<i>Indonesian Rupiah</i>
I-O	Input-Output
IRTS	<i>International Recommendation on Tourism Statistics</i>
ISCO-2	<i>International Standard Classification of Occupations 1969</i>
JAMSOSTEK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KANWIL	Kantor Wilayah
LFS	<i>Labour Force Survey</i>
LWS	<i>Labour Wage Survey</i>
MAP	<i>Monitoring and Assessing Progress</i>
NAICS	<i>North American Industry Classification System</i>
NESPARDA	Neraca Satelit Pariwisata Daerah

NESPARNAS	Neraca Satelit Pariwisata Nasional
NTI	<i>National Tourism Indicator</i>
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
PA	<i>Productivity Account</i>
PHRI	Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
PES	<i>Passenger Exit Survey</i>
PODES	Survei Potensi Desa
RENSTRA	Rencana Strategis
RMF	<i>Recommended Methodological Framework</i>
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SAKERNAS	Survei Tenaga Kerja Nasional)
SAM	<i>Social Accounting Matrix</i>
SBOC	<i>Survey of Business Operating Costs</i>
SE	Sensus Ekonomi
SEEH	<i>Survey of Employee Earnings and Hours</i>
SEPH	<i>Survey of Employment, Payrolls and Hours</i>
SH	Survei Hotel
SIBS	Survei Industri Besar dan Menengah
SKKR	Survey Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga
SKTIR	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga
SME	<i>Small and Medium-Size Enterprises</i>
ST	Sensus Pertanian
STKU	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha
SUB	Survei Upah Buruh
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
SUSI	Survei Usaha Kecil dan Rumah Tangga Terpadu
TSA	<i>Tourism Satellite Account</i>
TSA: RMF	<i>Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework</i>
UNDAF	<i>United Nations Development Assistance Framework</i>
USD	<i>United States Dollar</i>

Ringkasan Eksekutif & Rekomendasi

Secara nasional pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, bila dilihat dari perkembangan kedatangan wisman (wisatawan mancanegara) dan perjalanan wisnus (wisatawan nusantara). Tahun 2009, jumlah kunjungan wisman mencapai 6,45 juta orang dan perjalanan wisnus mencapai 229,950 perjalanan (trip). Secara nasional, dampak ekonomi yang diukur dengan metode Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) (2008), menunjukkan kontribusi pertumbuhan sebesar 5,06% terhadap output, 4,70% terhadap GDP, 4,32% terhadap pajak tak langsung, dan 6,84% terhadap lapangan kerja nasional. Angka-angka tersebut memang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun (jauh) lebih rendah dari angka tahun 2000-2005 yang lalu. Hal ini mengingatkan kita semua, bahwa indikator kedatangan wisman dan perjalanan wisnus serta pengeluarannya baru menunjukkan pertumbuhan, belum cukup untuk memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan.

TABEL 1 PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DILIHAT DARI BEBERAPA INDIKATOR TERPILIH

Indikator (1)	2000 (2)	2008 (3)	Penurunan kontribusi (2)-(3) /(2)
1. Output (%)	9,27	5,06	4,21 - 45.41 %
2. GDP (%)	9,38	4,70	4,68 - 49.89 %
3. Pajak Tak Langsung (%)	8,29	4,32	3,97 - 47.89 %
4. Gaji dan Upah (%)	9,87	4,97	4,90 - 49.65 %
5. Lapangan kerja (%)	8,11	6,84	1,27 - 15.66 %

Sumber: BPS dan hasil perhitungan

Yang perlu diwaspadai adalah bahwa angka nasional tersebut, dapat menimbulkan persepsi yang salah, bila dianggap berlaku untuk (semua) daerah. Angka-angka dalam tabel berikut menunjukkan kesenjangan antar daerah yang merupakan kenyataan yang perlu dipahami. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya masing-masing daerah untuk mempunyai informasi lengkap tentang kondisi kepariwisataan daerahnya.

TABEL 2. PERBANDINGAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI BEBERAPA PROVINSI

	BALI	DKI JAKARTA	BANTEN	RIAU	SUMSEL	INDONESIA	
	2007	2009	2008	2007	2006	2008	Rerata (06-08)
1. Output (%)	51.56	6.46	2.56	2.31	1.25	5.06	4.80
2. GDP (%)	46.16	5.84	3.04	2.14	1.07	4.70	4.46
3. Pajak tak langsung (%)	66.44	8.33	3.23	4.03	1.50	4.32	4.19
4. Gaji dan upah (%)	36.12	6.54	3.15	3.11	1.17	4.97	4.65
5. Lapangan Kerja (%)	40.56	9.48	4.03	5.22	1.04	6.84	5.59

Sumber: Nesparda berbagai provinsi dan Nesparnas

Menarik untuk diketahui bahwa bahwa kendati tingkat pariwisata di Sumatera Selatan dan Riau, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, peranannya dalam perekonomian daerah tidak sebesar yang dibayangkan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan yang masih terfokus di tingkat ibukota dan karena struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor minyak dan gas serta kehutanan.

Salah satu perintah dalam UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, salah satu ukuran penting untuk diangkat adalah lapangan kerja dalam bidang kepariwisataan. Menurut tabel di atas kontribusi sektor pariwisata dalam penciptaan lapangan kerja selama periode 2000-2008 menurun sebesar 15,66%. Meskipun penurunan ini tidak sebesar penurunan dalam indikator lainnya, namun tetap memerlukan perhatian semua pihak secara serius.

Statistik kepariwisataan yang tersedia, belum terlalu lengkap untuk dapat menggambarkan keadaan atau kinerja pariwisata secara utuh. Data kedatangan wisman merupakan data yang terlengkap dan biasanya paling mutakhir; meskipun demikian, data pengeluarannya masih menghadapi kendala dalam memperoleh sampel responden yang representatif dan dapat menyebabkan perkiraan yang kurang pasti. Data perjalanan wisnus, hanya dapat dipakai untuk tingkat nasional karena jumlah sampel yang kurang memadai untuk diolah per provinsi, apalagi per kabupaten/kota. Untuk indikator lainnya, dilakukan survei usaha pariwisata, yang cakupannya belum menyeluruh. Sejauh ini cakupan survei badan usaha baru meliputi usaha perhotelan dan rumah makan serta biro perjalanan dengan pertanyaan yang terbatas dan kualitas data yang perlu diverifikasi. Ketidakeengkapan data ini dapat menjadi sebab rendahnya angka lapangan kerja yang disebutkan di atas. Sejak dihapuskannya kantor Wilayah Kepariwisata di daerah, aliran informasi/data dari daerah menjadi terkendala. Kenyataan juga menunjukkan kualitas dan cakupan serta format data yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Secara umum pengembangan basis data kepariwisataan belum menjadi perhatian, apalagi prioritas. Sektor informal dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih belum terdata secara baik, padahal dalam berbagai kasus menunjukkan kontribusi yang signifikan, terutama apabila dikaitkan dengan kesempatan kerja bagi mereka yang kurang/tidak terdidik/terlatih.

Pemahaman tentang angka-angka menggugah kita semua untuk memikirkan langkah lanjutan baik dalam bentuk kebijakan maupun program kegiatan. Sebaliknya penggunaan angka-angka nasional untuk penyusunan kebijakan di daerah dapat menimbulkan kesalahan arah pembangunan.

Saat ini ditengarai adanya lapangan kerja bidang kepariwisataan yang belum tergolong pekerjaan yang layak yang memberikan pendapatan maupun hak-hak pekerja secara optimal.

Salah satu hasil kajian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan kepariwisataan dan pemanfaatannya dalam pengembangan industri kepariwisataan maupun di sektor publik.

Beberapa rekomendasi dari kajian statistik dan hasil studi lainnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Bagi Pemerintah Daerah

- i. Perlunya basis data yang sahih dan mangkus yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan dukungan terhadap perencanaan kepariwisataan di daerah masing-masing. Basis data yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor, tidak terbatas kepada jumlah kunjungan saja.
- ii. Bagi daerah yang menempatkan pariwisata sebagai sektor strategis, diperlukan gambaran yang jelas tentang potensi kepariwisataan, dan potensi pasar yang dapat dipakai sebagai informasi bagi promosi investasi. Penempatan sebagai sektor strategis dapat didasarkan kepada perkembangan yang sudah terjadi, atau sebaliknya karena ketertinggalan daerah dan peluang sektor lain yang kecil.
- iii. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) dapat memberikan indikasi kepada daerah tentang peranan ekonomi sektor pariwisata.

B. Bagi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

- i. Bersama BPS perlu menentukan kegiatan yang termasuk ke dalam industri pariwisata, dengan mempertimbangkan rekomendasi internasional, dan menentukan apa yang dinamakan sebagai kegiatan khusus Indonesia (country specific activities) dan menggunakannya sebagai acuan standar bagi statistik daerah.
- ii. Menyiapkan anggaran yang memadai untuk pengembangan basis data dengan meningkatkan kualitas data dan cakupannya, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dikerjasamakan dengan BPS.
- iii. Mendukung dan membantu daerah untuk menyiapkan basis data maupun Nesparda-nya, terutama dalam konsep dan metode pelaksanaan.
- iv. Penguatan kelembagaan dan peran pusat data dan informasi untuk dapat secara lebih luas menjangkau data daerah melalui pengembangan sistem jaringan terpadu serta anggaran operasionalnya.
- v. Perlu pemetaan tentang pendidikan kepariwisataan dan sebaran lulusannya, sebagai dasar atau langkah awal untuk perencanaan pengembangan sumber daya manusia (manpower development plan) dalam bidang kepariwisataan.
- vi. Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diperlukan untuk masalah ketenagakerjaan; sementara dengan kementerian lain untuk masalah kepariwisataan lainnya.

C. Bagi BPS, melalui kerjasama dengan Kementerian Budpar

- i. Mengembangkan pengolahan data kepariwisataan dari basis data yang sudah ada.
- ii. Meninjau kembali pengoperasian survei yang telah dilakukan dan mengupayakan perluasan statistik kepariwisataan sesuai dengan kesepakatan.
- iii. Mengambil inisiatif untuk penyelenggaraan lokakarya atau pelatihan bagi berbagai daerah tentang statistik kepariwisataan.

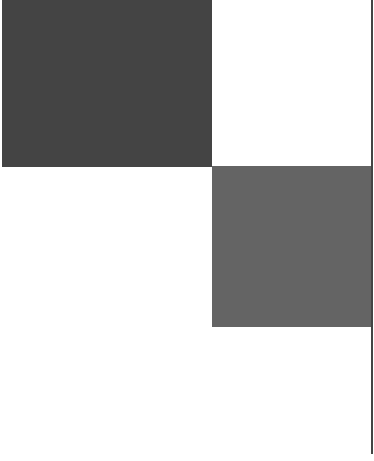
D. Bagi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- i. Memantau dan mendata tenaga kerja kepariwisataan yang bekerja di luar negeri, dengan indikator pekerjaan yang layak yang telah dikembangkan bersama ILO.

- ii. Melakukan kajian tentang efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan pelaksanaan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan dalam bidang kepariwisataan.

Jakarta, Mei 2011

Myra P. Gunawan & Kusmadi Saleh



Pendahuluan

Pariwisata sangatlah padat karya dan juga suatu sumber kesempatan kerja yang signifikan. Pariwisata merupakan salah satu pencipta pekerjaan paling tinggi di dunia yang membutuhkan beragam tingkat keterampilan dan membuka peluang bagi pekerja muda, perempuan dan migran untuk masuk dengan cepat ke dalam angkatan kerja. Pariwisata menyumbangkan 30 persen dari jasa ekspor dunia. Mempertimbangkan rantai pasokan dalam sektor ini, satu pekerjaan dalam industri inti perhotelan, katering dan pariwisata secara tidak langsung menghasilkan sekitar 1,5 pekerjaan tambahan dalam perekonomian yang berkaitan. Pada tahun 2010, perekonomian global sektor ini menyumbang 235 juta pekerjaan, setara dengan sekitar 8 persen dari seluruh jumlah pekerjaan (langsung dan tidak langsung) atau satu dari setiap 12,3.⁴ *World Tourism Organization* (Organisasi Pariwisata Dunia) mengharapkan bahwa perekonomian global sektor ini akan menyediakan 296 juta pekerjaan pada tahun 2019.

Untuk memahami apa yang tengah terjadi dalam pasar tenaga kerja terkait dengan pariwisata dan untuk mengembangkan kebijakan maupun strategi ketenagakerjaan yang memadai, maka pemerintah, pembuat kebijakan dan para spesialis pembangunan pariwisata perlu memiliki informasi komprehensif tentang kesempatan kerja dan kondisi kerja dalam sektor ini. Namun demikian, sekalipun pariwisata sudah lama diketahui memiliki potensi untuk menciptakan pekerjaan, tetapi kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan hingga kini masih merupakan salah satu yang paling sedikit dikaji. Hanya ada sedikit negara yang menghasilkan statistik bermakna mengenai pekerjaan dalam industri kepariwisataan.⁵

Kurangnya data sahih ini dapat dijelaskan oleh sifat keanekaragaman pariwisata dan berbagai masalah yang terlibat dalam mengumpulkan data andal untuk industri ini. Statistik seharusnya memainkan peran penting dalam memantau pengembangan dan upaya berbagai jenis analisa terhadap pariwisata. Kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan perlu diukur dan dijelaskan dengan cara yang lebih konsisten melalui pengembangan instrumen statistik yang tepat berdasarkan alat internasional dan dikembangkan lebih lanjut melalui kerjasama internasional.

4 Lihat: International Labour Organization (ILO), *Development and Challenges in the Hospitality and Tourism Sector: Issues Paper for Discussion at the Global Forum for the Hotels, Catering and Tourism Sector* (23-24 November 2010) (Geneva: International Labour Organization, 2010).

5 Informasi selanjutnya lihat: Igor Chernyshev, *Employment in the Tourism Industries: Measurement Issues and Case Studies*, Keynote, Session III, the 5th UNWTO International Conference on Tourism Statistics – Tourism: an Engine for Employment (Bali, Indonesia: World Tourism Organization, 30 March –2 April 2009).

Dengan mempertimbangkan hal ini, pada tahun 2007, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) meluncurkan serangkaian inisiatif berkaitan dengan statistik yang diarahkan menuju pengembangan suatu program bersama duatahunan antara Biro Statistik ILO dan Departemen Statistik dan Neraca Satelit Pariwisata UNWTO dalam kerangka kerja Agenda Perkerjaan yang layak ILO.⁶

Langkah-langkah di atas mendasari kerangka kerjasama antara ILO dan UNWTO disetujui oleh Badan Pengatur ILO dalam Sesi ke 301 (Maret 2008) dan selanjutnya diratifikasi oleh Rapat Umum UNWTO.

Tujuan global kesepakatan di atas adalah untuk meningkatkan dan menguatkan kerjasama antara dua lembaga PBB dalam meningkatkan kapasitas nasional Negara anggota untuk mengukur kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan, seraya mengenali peran fundamental perkerjaan yang layak dalam industri perhotelan, makanan dan minuman, dan sektor-sektor pariwisata lainnya dalam mewujudkan pembangunan sosial, membantu penghapusan kemiskinan, meningkatkan kemakmuran dan mendorong pemahaman internasional terhadap berbagai standar ILO.

Oleh karena itu, perjanjian tersebut merujuk pada Kode Etik Global untuk Pariwisata dan berbagai konvensi perburuhan internasional lain yang relevan tentang prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental dalam kerja serta konvensi dan rekomendasi yang spesifik untuk sektor pariwisata.

Perjanjian tersebut merupakan suatu contoh kegiatan bersama antar lembaga PBB yang dirancang untuk meningkatkan pendekatan *Delivering as One* serta suatu contoh dalam mengarusutamakan kesempatan kerja dan Agenda Perkerjaan yang layak dalam sektor pariwisata.⁷

Salah satu bidang yang dicakup dalam perjanjian ini adalah peningkatan sumberdaya nasional dan metoda pengumpulan data mengenai lapangan/kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan.

Tersedianya statistik komprehensif tentang lapangan kerja dalam industri kepariwisataan akan memungkinkan para pemangku kepentingan nasional menganalisa atau bahkan memperkirakan dampak (atau perubahan dalam) arus dan pembelanjaan pariwisata pada kesempatan dan struktur lapangan kerja dalam berbagai industri yang terkait dengan pariwisata. Hal ini mensyaratkan untuk menautkan sisi penawaran pariwisata dengan sisi permintaan, melaksanakan analisa pada berbagai tingkatan rinci, memeriksa konsistensi dengan data keuangan, menegaskan peran pariwisata dalam menciptakan, melestarikan dan menganekaragamkan lapangan kerja, serta memberikan pengetahuan baru tentang jumlah, struktur dan tingkat pengupahan dalam industri kepariwisataan.

Lebih dari itu, data tentang kesempatan kerja harus menyediakan informasi yang sah, baik dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan sosial-ekonomi dan pariwisata dalam bidang-bidang seperti angkatan kerja dan perencanaan kepariwisataan, dan juga bagi bisnis atau wilayah secara individual untuk maksud penentuan patokan/*benchmark*. Data ini memungkinkan pembuat keputusan untuk memfokuskan tindakan mereka dalam memaksimalkan pertumbuhan pariwisata dan kontribusinya terhadap kesempatan kerja.

Namun demikian, seperti sudah disebutkan sebelumnya, statistik ketenagakerjaan yang sah mengenai industri kepariwisataan umumnya masih kurang baik atau bahkan tidak ada.

Dengan demikian, bagi berbagai negara di mana pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja, serta memberikan kontribusi penting pada pertumbuhan PDB, kurangnya statistik lapangan

6 Untuk informasi selanjutnya tentang the ILO's Decent Work Agenda lihat: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatIsDecentWork/lang-en/index.htm.

7 Agenda Pekerjaan yang Layak ILO mencakup penyediaan kesempatan untuk pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang sepadan; menjamin keselamatan kerja dan perlindungan sosial untuk pekerja dan keluarganya; memberdayakan pekerja agar mempunyai prospek yang lebih baik dan integrasi sosial; mendukung kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengorganisasikan dan berperan serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya; serta advokasi kesetaraan kesempatan dan perlakuan untuk semua.

kerja dalam industri kepariwisataan menjadikan pengukuran yang teliti terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, produktivitasnya, dan juga nilai ekonomi pariwisata secara keseluruhan tidak mungkin dilakukan dengan teliti.

Dengan kurang atau tidak adanya statistik sahih tentang lapangan kerja dalam industri kepariwisataan, pengukuran kemajuan ke arah pekerjaan yang layak dalam sektor pariwisata menjadi terhambat, baik di berbagai negara anggota ILO dan UNWTO maupun dalam sektor pariwisata secara global.

Kolaborasi dua organisasi ini mencapai puncaknya dalam implementasi Proyek Bersama ILO/UNWTO mengenai Pengukuran Lapangan/Kesempatan Kerja dalam Industri Kepariwisata (the *Measurement of Employment and Decent Work in the Tourism Industries*).

Proyek ini terdiri dari tiga kegiatan utama, sebagai berikut:

- (i) Persiapan dan publikasi *Panduan Teknis tentang Praktek-Praktek terbaik untuk Mengukur Kesempatan Kerja dalam Industri Kepariwisata (Technical Guide on Best Practices for Measuring Employment in the Tourism Industries)* oleh ILO/UNWTO.
- (ii) Menguji kecocokan rekomendasi-rekomendasi dalam *Panduan Teknis* tersebut dalam penerapannya di dua negara dengan sistem statistik dan jasa pariwisata yang sudah maju.
- (iii) Mengukur yang layak dalam industri pariwisata.

Sementara semua negara praktis memiliki suatu *System of National Account* untuk menentukan nilai ekonomi PDB, nilai tambah industri dan agregat ekonomi lainnya, pariwisata biasanya tidak tercakup karena ia merupakan suatu sektor sisi permintaan. Konsep Neraca Satelit Pariwisata (Tourism Satellite Account / TSA) dikemukakan untuk menutup kekurangan data ekonomi tentang pariwisata ini. Dalam Neraca Satelit Pariwisata, permintaan/konsumsi pariwisata (suatu pengukuran baku pengeluaran/belanja wisatawan (diidentifikasi, diasosiasikan dengan berbagai industri yang melayaninya, dan kemudian nilai tambah yang timbul dari belanja tersebut diperhitungkan. Jadi, berbagai industri yang berlainan yang melayani wisatawan dapat dikumpulkan dan dijumlahkan untuk menentukan nilai tambah pariwisata. Karena alasan itulah, hal ini berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi (*lobbying*) yang sangat berharga untuk sektor ini.

UNWTO, bekerja sama dengan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), Komisi Eropa serta Divisi Statistik PBB, telah mengembangkan suatu Neraca Satelit Pariwisata /Tourism Satellite Account (TSA), yaitu suatu metoda untuk mengukur kontribusi ekonomi langsung dari konsumsi pariwisata kepada perekonomian nasional. Metodologi ini, yang diuraikan secara sangat terperinci dalam *2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework* (TSA: RMA 2008),⁸ secara formal diadopsi oleh Komisi Statistik PBB pada bulan Pebruari 2008.

TSA terdiri dari sepuluh tabel data ekonomi yang mengukur konsumsi internasional (dalam bentuk uang tunai dan barang/natura), nilai tambah industri pariwisata, nilai tambah pariwisata, dan PDB pariwisata. Namun demikian, hanya satu dari sepuluh tabel (Tabel 7) yang membahas tentang lapangan kerja dalam industri kepariwisataan dan itu pun hanya dari segi jumlah, jam kerja, dengan status setara kerja penuh.

Pada tahun 2008, revisi dari *International Recommendations for Tourism Statistics* (IRTS 2008)⁹ diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. IRTS 2008 berisi satu bagian baru, "Chapter 7: Employment in the Tourism Industries" Bab ini dimasukkan dalam IRTS terbaru dengan tujuan untuk membantu negara-negara mengukur dimensi kuantitatif dan kualitatif kesempatan kerja guna lebih memahami dampaknya terhadap

8 UN Statistics Division (UNSD), the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and the World Tourism Organization (UNWTO), *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008* (Geneva: Statistical Commission, 2008).

9 UN Statistics Division (UNSD) and the World Tourism Organization (UNWTO), *International Recommendations for Tourism Statistics 2008* (Geneva: Department of Economic and Social Affairs, 2008).

ekonomi kepariwisataan di suatu negara dan untuk melengkapi data kesempatan kerja yang terbatas untuk Tabel 7 dalam TSA.

Indonesia sudah sejak tahun 2000 menyusun suatu Neraca Satelit Pariwisata Nasional. Di samping Nesparnas, negara ini membangun Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) untuk enam provinsi, termasuk Bali. Baru-baru ini, Indonesia melalui kerjasama dengan ILO, memproduksi serangkaian publikasi yang bermanfaat dan menarik tentang lapangan kerja dalam sektor pariwisata, misalnya, *Implications of the Global Economic Crisis for Tourism Employment: Case Study for Indonesia*.¹⁰

Mengingat prestasi Indonesia yang menonjol dalam pengembangan sistem statistik pariwisata nasional dan produksi data mengenai kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan dalam kerangka kerja Nespas (TSA), maka Indonesia dipilih menjadi salah satu negara perintis untuk Proyek Bersama ILO/UNWTO. Tujuan dari Proyek Bersama ini adalah melaksanakan suatu kajian mendalam tentang cara-cara yang mungkin dilakukan untuk menerapkan berbagai rekomendasi internasional terbaru dalam bidang statistik pariwisata untuk menghasilkan perangkat data baru tentang kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan lebih jauh dari TSA.

Oleh karena itu, gagasannya adalah beralih dari *System of National Account* – pendekatan TSA dengan perhitungan berbasis pada sisi ekonomi atau keuangan dalam kesempatan kerja menuju ke sisi manusia atau individualnya, yaitu mengumpulkan data bukan saja tentang jumlah pekerjaan tetapi juga jumlah orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan serta tentang kondisi kerja orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berkarakteristik pariwisata termasuk jumlah jam kerja (selain setara kerja penuh waktu), upah dan gaji, jabatan dan pendidikan, apakah mereka terlibat dalam berupah atau mandiri, dll.

Tujuan lain kajian ini adalah untuk memaparkan cakupan Indikator Pekerjaan yang Layak/*Decent Work Indicators* Indonesia dan untuk menawarkan mana di antaranya yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pekerjaan yang layak dalam industri pariwisata.

Publikasi ini ditujukan untuk para produsen statistik pariwisata nasional yang ingin memperbaiki dan/atau meningkatkan metoda yang digunakan dalam pengumpulan data tentang pekerjaan dalam industri kepariwisataan. Ini juga direkomendasikan untuk pembuat kebijakan dan para spesialis pembangunan pariwisata untuk lebih memahami dan menganalisa dunia kerja dalam industri kepariwisataan dan untuk mengembangkan kebijakan pasar tenaga kerja spesifik pariwisata yang diarahkan pada pengurangan defisit pekerjaan yang layak dalam sektor pariwisata.

Rekomendasi dalam *Studi Kasus Indonesia* ini dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan negara anggota ASEAN agar lebih memahami proses yang terjadi dalam pasar tenaga kerja pariwisata anggotanya dan untuk memfasilitasi proses integrasi dalam ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015.

Publikasi ini menjawab berbagai kebutuhan khusus Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam usaha memahami bagaimana data saat ini dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dapat diperbaiki lebih jauh guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dalam industri kepariwisataan.

Measuring Employment in the Tourism Industries Beyond a Tourism Satellite Account: A Case of Indonesia terdiri dari enam bab dan tiga lampiran. Sinopsis ringkas dari bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I menyajikan kondisi umum pariwisata di Indonesia termasuk perannya dalam dunia kerja, kondisi kesempatan kerja dalam pariwisata, dan juga deskripsi berbagai kementerian yang terkait dengan pariwisata dan tentang berbagai asosiasi pariwisata.

10 Mike Sharrocks, *Implications of the Global Economic Crisis for Tourism Employment: Case Study for Indonesia* (Jakarta: ILO Country Office for Indonesia, 2010).

Bab II merujuk pada perundangan yang ada dan mendukung pentingnya kesempatan kerja sebagai indikator pembangunan pariwisata. Bab II menekankan bahwa unjuk kerja pariwisata juga tergantung pada peran sektor publik; oleh karena itu menyebarkan informasi data pekerjaan pariwisata di antara sektor publik juga disebut sebagai hal yang perlu diperhatikan.

Bab III mengkaji pertumbuhan peran ekonomi pariwisata dari TSA di tingkat nasional dan provinsi, dan dengan demikian menunjukkan pentingnya TSA untuk masukan kebijakan. Setelah menentukan berbagai tantangannya, bab III mencoba mendefinisikan apa yang perlu dilakukan pada masa mendatang.

Bab IV mengikhtisarkan pengalaman Indonesia dalam mempersiapkan Nespar, merujuk pada pelajaran yang dipetik dari Australia dan Kanada.

Bab V merujuk pada Decent Work Indicators/Indikator Perkerjaan yang layak yang diidentifikasi dalam hasil kerja ILO sebelumnya dan menerapkan berbagai indikator tersebut dalam konteks pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber informasi untuk mengukur berbagai indikator tersebut.

Bab VI meringkas temuan-temuan dari studi kasus ini, menawarkan sejumlah rekomendasi langkah-langkah tindak lanjut dan menyodorkan suatu arah baru menuju statistik yang lebih baik. Tindakan- tindakan ini perlu untuk perencanaan dan perumusan kebijakan dan menekankan statistik pekerjaan pariwisata dan makna strategis pengembangan basis data kepariwisataan di tingkat nasional, regional dan lokal.

Lampiran 1 berisi deskripsi ringkas metoda yang digunakan di Australia untuk mengukur jumlah orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan.

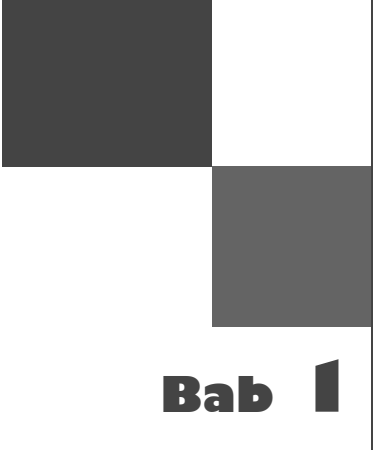
Lampiran 2 menyajikan Canadian Human Resource Module for the Canadian Tourism Satellite Account. Menurut ILO, Statistics Canada mengumpulkan salah satu perangkat data paling komprehensif tentang lapangan kerja dalam industri kepariwisataan. Perlu di catat bahwa saat ini *Statistics Canada* dan the *Canadian Tourism Human Resource Council* sedang bekerja sama mengembangkan rekomendasi bagi IRTS 2008 untuk menghasilkan perangkat data komprehensif dengan penjabaran tentang orang-orang yang dipekerjakan dalam industri pariwisata.

Lampiran 3 berisi “Bab 7: Kesempatan kerja dalam Industri Pariwisata/Employment in The Tourism Industries,” yang diambil dari *International Recommendations for Tourism Statistics* tahun 2008, yang dikembangkan oleh UNWTO.

Kajian ini didasarkan pada kajian dan penelitian lain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh ILO,¹¹ analisis Nespar /TSA pada enam provinsi dan Indonesia secara keseluruhan, serta diskusi dengan berbagai individu dari industri dan asosiasi pariwisata. Pengalaman pribadi penulis juga melandasinya, baik sebagai akademisi dalam perencanaan pariwisata di tingkat nasional, regional dan lokal dan sebagai mantan Wakil KepalaBiro Pusat Statistik (BPS).

Dalam menuliskan Studi Kasus ini, perhatian khusus diberikan kepada “Bab 7: *Employment in the Tourism Industries*” dari the *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*, yang menguraikan konsep, definisi dan kategori dasar pekerjaan dalam industri kepariwisataan dari sudut pandang statistik umum, bukannya dari neraca nasional spesifik. Bab ini juga memberikan wawasan ke dalam cakupan indikator industri kepariwisataan yang lebih luas dan pada akhirnya dapat dipadukan pada TSA di dalam suatu kerangka kerja integrasi data yang lebih luas.

11 Hasil studi ini termasuk: *Implications of the Global Economic Crisis for Tourism Employment: Case Study Indonesia, Job Opportunities for Youth (JOY) Project*, ILO Country Office for Indonesia, December 2009 and *Monitoring and Assessing Progress on Decent Work in Indonesia, National Background Study* by Diah Widiarti, ILO Country Office for Indonesia, “Monitoring and Assessing Progress on Decent Work”(MAP), 2010.



Bab 1

Pariwisata di Indonesia

1.1 Makna Penting Industri/Sektor Pariwisata bagi Indonesia

Pariwisata, sebagai sektor utama dalam perekonomian dunia, telah menjadi arus utama ekonomi bagi negara-negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Pada masa lalu, peran pariwisata di Indonesia terutama hanya diukur melalui devisa yang didapatkan dari pembelian oleh wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Belakangan ini, Indonesia memberikan perhatian lebih besar pada pariwisata domestik, yang terbukti menjadi sumber utama pendapatan dari pembelian wisatawan. Meskipun belanja rata-rata per wisatawan nusantara cukup rendah, tetapi secara total, belanja wisatawan nusantara di Indonesia terbukti lebih besar dari nilai total belanja wisatawan internasional/mancanegara, yang memang lazim untuk negara-negara besar. Bila pariwisata domestik digabungkan dengan angka-angka kedatangan internasional, maka Indonesia masuk dalam daftar teratas sepuluh negara yang paling banyak dikunjungi di dunia (Eijelaar, 2010). Total pembelanjaan wisatawan internasional mencapai Rp 80,46 triliun (kurang lebih USD 8,59 milyar) dan menduduki tempat keempat¹² dalam pendapatan devisa sesudah migas, minyak kelapa dan karet olahan. Sebagai perbandingan, pembelanjaan wisatawan nusantara mencapai Rp 119,17 triliun (USD 12,72 milyar).

Meskipun demikian, pariwisata bukanlah suatu tujuan, melainkan lebih sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan nasional serta untuk masyarakat secara luas. Pendapatan dari belanja wisatawan nusantara dan pemasukan devisa bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur arti penting pariwisata di Indonesia. Di samping dimensi ekonomi, pariwisata di Indonesia juga diharapkan untuk memainkan peran sosial budaya dan politik. Seiring waktu, mulai dari masa awal setelah kemerdekaan hingga saat ini, makna penting pariwisata telah bergeser secara dinamis. Pariwisata, yang mulanya memainkan peran politik, semakin menjadi penting bagi perekonomian dan belakangan ini, memainkan peran sosial budaya yang makin meningkat, menempatkan masyarakat, sebagai subyek pembangunan. Di masa mendatang, peran ekonomi pariwisata akan menjadi lebih strategis ketika cadangan sektor primer menurun; pariwisata diharapkan akan memainkan peran lebih besar dalam penghasilan devisa non migas.

12 Peringkat ke-6 di tahun 2006 dan ke-5 di tahun 2007.

Pariwisata dan pembangunan wilayah

Karena pariwisata dapat dan mungkin dikembangkan di wilayah-wilayah tanpa sumber daya alam untuk industri primer atau industri pengolahan, tetapi memiliki keindahan alam dan keunikan sosial-budaya (kemungkinan di daerah pelosok), maka pariwisata juga diharapkan untuk memainkan peran dalam pengembangan wilayah dan untuk mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah. Pariwisata dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan bagi berbagai wilayah yang kurang berkembang tetapi dikaruniai daya tarik alam dan/atau budaya (sumber daya untuk pembangunan pariwisata), apabila disediakan prasarana dan akses pasar.

Pariwisata untuk Kesadaran Nasional dan Budaya

Pariwisata domestik Indonesia terus meningkat dengan mantap seiring dengan meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan kelas menengah Indonesia dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah memprioritaskan pariwisata untuk mendorong pemahaman antara berbagai kelompok penduduk yang tinggal di berbagai daerah/wilayah, mendorong persatuan dan cinta tanah air. Hal ini penting bagi suatu negara dengan penduduk yang beraneka ragam dan berbagai kelompok etnis dengananekaragam tradisi dan budaya yang memiliki potensi memicu konflik, bila diletakkan dalam sudut pandang pariwisata keragaman alam dan sosial budaya, justru akan membuat suatu wilayah menarik bagi orang-orang dari wilayah lain. Sementara dimensi ekonomi pariwisata dapat diukur, peran sosial-budaya dan politiknya lebih sulit untuk diukur. Pariwisata dapat juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman di antara warga negara Indonesia tentang negrinya sendiri.

Pariwisata sebagai Cara untuk Mengurangi Urbanisasi

Dalam konteks pembangunan pariwisata, sesuai dengan kebijakan-kebijakan umum/makro yang pro-pertumbuhan, pro-kesempatan kerja, pro-masyarakat dan pro-lingkungan, pemerintah telah mengadopsi konsep pariwisata berbasis masyarakat. Konsep ini, menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di atau di dekat tujuan wisata diharapkan untuk dapat memainkan peran aktif dalam industri kepariwisataan dan mendapatkan manfaat sepantasnya dari pariwisata di daerah mereka, menjadi makin penting. Wisata pedesaan diharapkan bukan saja menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga memainkan peran tak langsung dalam mengurangi kecenderungan urbanisasi. Pariwisata juga dapat meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor lain, seperti misalnya dalam wisata-agro.

Tak ada pengetahuan akan suatu negeri seperti yang didapat dengan menjelajahnya, melihat luasnya dengan mata kepala sendiri, kekayaannya yang berlimpah dan beraneka ragam, dan lebih dari semua itu, orang-orangnya yang penuh gairah hidup.

(Samuel Bowles, Across the Continent, 1865)

Pariwisata sebagai Sarana Pelestarian

Pariwisata dapat terjadi di mana saja mulai dari daerah metropolitan yang besar dengan akses internasional hingga ke daerah-daerah paling pelosok dengan akses terbatas, termasuk daerah cagar alam dan cagar budaya. Pengembangan wisata alam di kawasan ini dan di situs pusaka budaya memiliki nilai pendidikan yang signifikan, yaitu membantu masyarakat memahami pentingnya melindungi berbagai pusaka alam maupun budaya. Meskipun manfaat /keuntungan seperti ini belum sangat efektif, dalam beberapa kasus sudah ada pelajaran dalam bentuk praktik-praktik baik dan terbaik yang dapat direplikasikan di tempat lain. Kawasan yang dilindungi yang terletak di wilayah berpenduduk padat memiliki peluang pasar paling besar, sementara yang terletak di daerah pelosok/terpencil masih harus menghadapi ancaman eksploitasi ilegal

terhadap sumber daya pariwisata mereka akibat kurangnya supervisi dan kebutuhan akan sumber daya. Pendapatan pemerintah dari peluang pasar dapat membantu melestarikan kawasan yang menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakatnya, tetapi pada saat yang sama meningkatnya permintaan akan wisata alam (eco-pariwisata) juga memberikan tekanan pada daya dukung lingkungan.

Pariwisata, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Pekerjaan

Tingkat pembangunan pariwisata di daerah/provinsi seluruh Indonesia sering kali digambarkan menurut skala dan jumlah investasi; jumlah usaha formal, termasuk pembangunan tempat seperti resor, hotel dan akomodasi lain; restoran dan kafe; tempat hiburan dan pusat rekreasi; taman bermain dan berbagai usaha formal lainnya. Pemerintah terdahulu dan sekarang membuka peluang kepada usaha-usaha kecil dan mikro penyedia barang dan jasa kepada wisatawan untuk berkembang. Laporan-laporan tentang jumlah usaha informal tidak ada karena mereka dapat buka dan tutup setiap saat semau mereka. Meskipun usaha kecil dan mikro, yang umumnya informal ini, tidak menciptakan pendapatan bagi pemerintah, kehadiran mereka sangat berarti bagi wisatawan beranggara rendah dan juga untuk menyerap pasokan tenaga kerja serta menciptakan pendapatan bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga menurunkan kemiskinan dan mengurangi beban kerja pemerintah, yang mengemban tugas menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk yang membutuhkan. Jumlah upah dan gaji keseluruhan dalam industri kepariwisataan mencapai Rp 70,42 triliun (USD 7.37 milyar), yaitu 4,64% dari jumlah total nasional (2008).

Paradoks dalam memposisikan pariwisata di negeri ini adalah bahwa, di satu pihak, Indonesia harus bersaing secara internasional dengan tujuan objek wisata baru maupun yang sudah matang untuk mendapatkan porsi pasar internasional yang memadai/besar, dimana untuk itu diperlukan praktek profesional dengan standar pelayanan berkualitas. Di lain pihak, negeri ini menghadapi masalah kemiskinan dan perlu mencari/menciptakan pekerjaan bagi penduduk yang paling lemah, yang sering kali memiliki pendidikan rendah dan, dalam banyak kasus tidak memiliki kompetensi yang layak untuk mengisi peluang yang terbuka. Pada tahun 2008, pariwisata menyumbang 6,98% pada jumlah kesempatan kerja nasional secara keseluruhan.

Fakta bahwa permintaan akan pariwisata di Indonesia bervariasi mulai dari pasar pariwisata *high-end* hingga *low-end*, dari satu atau lain segi, dapat dianggap sebagai suatu berkat. Pariwisata *high-end* dengan tingkat pembelanjaan yang tinggi memiliki efek pelipatgandaan (*multiplier effect*) besar yang mencakup seluruh kegiatan di klaster yang lebih terbatas, menyediakan pekerjaan terutama bagi orang-orang berpendidikan atau terlatih baik, sedangkan pasar *low-end* secara geografis lebih tersebar. Meskipun efek pelipatgandaannya lebih rendah, pariwisata ini mencakup wilayah yang lebih luas dan menyertakan sektor informal dalam perekonomian lokal, menciptakan pekerjaan bagi mereka yang kurang berpendidikan atau yang kurang (atau bahkan tidak) terlatih. Oleh karena itu, kegiatan pariwisata bukan saja menciptakan pekerjaan bagi mereka yang terdidik/terlatih baik, tetapi juga bagi mereka yang berpendidikan minimum, yang akan kesulitan memasuki pasar tenaga kerja formal.

Besar dan cakupan pariwisata domestik di negeri ini telah membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk menciptakan pekerjaan sendiri, memproduksi berbagai macam barang dan jasa bagi wisatawan. Bahkan, beberapa dari wirausahawan ini, yang mulai dengan bisnis dengan skala sangat kecil, telah tumbuh menjadi pemain internasional. Beberapa contoh pertumbuhan ini dapat disaksikan dalam usaha makanan ringan kemasan, kerajinan tangan dan bahkan pertunjukan budaya tradisional yang menarik minat wisatawan internasional. Banyak kegiatan produksi makanan dan kerajinan tangan melibatkan pekerja informal, yang menyertakan pekerja perempuan dalam jumlah signifikan atau bahkan dominan, yang bekerja secara di luar tugas rumah tangga dan tanggung jawab keluarga.

Meskipun dalam banyak kasus pendapatan yang dihasilkan dari kerja informal tidaklah besar, bagi keluarga miskin hingga yang sangat miskin, pendapatan kecil seperti ini merupakan kontribusi sangat berarti, apakah

untuk menyekolahkan anak atau untuk mendapatkan peluang yang tanpa itu tak mungkin mereka bayar (pelatihan pemandu wisata, program pemberdayaan masyarakat, dll).

Dari dimensi ekonomi, pariwisata memiliki efek terhadap produksi barang dan jasa, sebesar 4,81% dari total angka nasional, dan berdampak pada nilai tambah sektor, sebesar 4,49 % dari PDB Indonesia. Pariwisata juga menyumbang 4,25% pendapatan nasional dari pajak (BPS, 2008).

1.2 Dunia Kerja dalam Pariwisata

Pariwisata dikenal sebagai suatu sektor padat karya, yang melibatkan orang-orang paling terlatih dan berpengalaman maupun orang-orang tanpa pengalaman atau pelatihan sama sekali. Sebagai akibatnya, ia pun menawarkan tingkat gaji yang tinggi di satu sisi dan upah yang rendah di sisi lainnya.

Dunia kerja dalam pariwisata dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Dari sudut positif, sebagian mengatakan bahwa bekerja dalam industri kepariwisataan menyenangkan karena bekerja di tempat-tempat yang menyenangkan dan berpeluang menjumpai orang-orang yang bahagia dan santai. Pemandu wisata maupun *tour leader* dapat menikmati pengalaman di tempat-tempat menarik seperti wisatawan mereka sendiri. Bekerja di hotel ber-AC bisa dianggap lebih baik daripada bekerja di pabrik atau tempat lain yang hiruk pikuk. Orang mungkin juga melihat sifat musiman pariwisata sebagai peluang positif; seorang pemandu wisata *free lance* atau paruh waktu atau penjual makanan, misalnya, dapat memperoleh pendapatan ekstra selama musim libur. Dari observasi kami, tercatat bahwa ada banyak ibu rumah tangga/*freelance* yang bekerja atau mengelola bisnis terkait pariwisata dengan sukses di samping menjalankan tugas mereka di rumah.

Dari perspektif lain, bidang pariwisata mungkin dipandang sebagai kesempatan yang tidak pasti bagi mereka yang benar-benar membutuhkan kerja penuh untuk menunjang penghidupan yang layak. Bagi sebagian orang, mungkin ini terasa tidak adil karena para pekerja pariwisata harus bekerja keras sementara orang lain menikmati liburan atau akhir pekan mereka. Untuk beberapa kasus, bisnis harus berjalan selama 24 jam seperti industri perhotelan - seorang karyawan tidak selalu dapat menolak giliran bekerja malam – sesuatu yang mungkin menimbulkan kesulitan bagi sejumlah orang, khususnya perempuan dalam siklus hidup tertentu. Pilihan dalam industri kepariwisataan memang kurang pantas bagi perempuan hamil, karena harus mengangkat peralatan berat di dapur hotel, misalnya. Rutinitas pariwisata, seperti mengunjungi tempat yang sama berkali-kali sebagai pemandu, sekalipun tempat itu indah, tidaklah begitu menarik seperti yang diperkirakan; kebosanan mungkin menjadi salah satu penyebab tingkat keluar masuk ganti pekerjaan dalam industri kepariwisataan menjadi lumrah. Banyaknya kasus ketidaksepahaman dan konflik antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan pariwisata; ini menjadi indikasi adanya ketidakpuasan terhadap kondisi kerja yang disebabkan oleh kesenjangan antara harapan pekerja untuk gaji, libur, jam kerja dan tunjangan sosial lain dengan kesanggupan dan kemauan perusahaan untuk membayar atau memenuhi harapan pekerja.

Statistik yang dipakai dalam Neraca Satelit Pariwisata Indonesia menunjukkan bahwa mereka yang bekerja di dalam industri terkait pariwisata kebanyakan adalah lulusan sekolah menengah atau lebih rendah. Hanya 14,39% adalah lulusan lembaga pendidikan tinggi.¹³ Di tingkat provinsi, di mana terdapat variasi yang lebih luas, kondisi-kondisi ini mungkin berbeda. Di Sulawesi Tengah, misalnya, proporsi pekerja dengan pendidikan tinggi hanyalah 3,66%, dan lebih dari 55% adalah *drop out* SD atau hanya sampai merupakan *drop out* SD atau paling jauh sekolah menengah.¹⁴

Lebih dari 90% pekerjaan diciptakan untuk langsung melayani wisatawan. Kegiatan terkait investasi atau lainnya, termasuk pemasaran dan promosi jauh lebih kecil.¹⁵

13 BPS, Nesparnas Indonesia

14 BPS, Nesparda Sulawesi Tengah

15 BPS, Nesparnas, 2003

Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang mengenai upah minimum, masih ada kemungkinan bahwa di perusahaan-perusahaan kecil, perundangan tentang upah minimum mungkin tidak efektif bagi pekerja lulusan sekolah menengah atau lebih rendah karena ketimpangan antara penawaran dan permintaan.

Di perusahaan-perusahaan kecil dengan sedikit pekerja, sayangnya tidak ada serikat pekerja, meskipun mereka kadang-kadang menerima jaminan sosial melalui sistem yang ada seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja - JAMSOSTEK.

Disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa mereka yang sudah bekerja selama 6 tahun berturut-turut berhak untuk mendapatkan satu bulan libur dengan gaji penuh pada tahun ke 7 dan ke 8. Namun demikian, undang-undang ini masih belum efektif. Sejumlah perusahaan memberikan satu atau beberapa hari libur tahunan tambahan kepada karyawan yang sudah lama bekerja, tetapi mereka tidak dapat menanggung ketidakhadiran karyawan berpengalaman untuk waktu yang lebih lama.

Hingga batas tertentu, kesempatan kerja seringkali bersifat sementara. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pariwisata bersifat musiman. Keragaman segmen pasar untuk Indonesia, khususnya pasar domestik, terutama pada libur pendek semesteran sekolah, akhir pekan panjang dan libur multibudaya (berkaitan dengan berbagai agama: *Idul Fitri*, Natal, Nyepi dan lainnya), menjadikan bisnis terus berlanjut.

Data dalam Tabel 1.1. menggambarkan jumlah jam kerja yang dijalani oleh pekerja industri kepariwisataan dalam minggu sebelumnya. Tabel berikut ini memperlihatkan bahwa ada jumlah signifikan yang bekerja lebih dari 45 jam seminggu. Bukan saja jam kerja panjang itu meningkat dari tahun 2006 hingga 2010, tetapi proporsi orang yang menjalani jam kerja panjang itu pun meningkat hingga lebih 60%. Pada tahun 2010, hampir 30% bekerja lebih dari 60 jam selama minggu sebelumnya.

TABEL 1.1. POPULASI PEKERJA USIA 15 TAHUN DAN LEBIH YANG BEKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA DALAM MINGGU SEBELUMNYA BERDASARKAN JUMLAH JAM KERJA

JUMLAH JAM KERJA	2006	2008	2010
0**	189,744	403,570	309,447
1-4	10,446	61,862	59,622
5-9	117,395	250,842	206,463
10-14	274,078	503,736	519,786
15-19	344,171	450,312	476,311
20-24	712,181	837,289	1,058,074
25-34	1,777,276	1,486,891	1,937,717
35-44	4,028,601	4,017,477	4,290,855
45-54	4,683,334	4,469,279	4,846,424
55-59	2,114,651	2,010,119	2,155,997
60-74	3,079,006	3,766,089	4,071,670
75 +	1,224,174	2,426,575	2,280,518
Total	18,555,057	20,684,041	22,212,885

Sumber: Publikasi BPS, 2006, 2008, 2010 tentang Kondisi Angkatan Kerja

Jam kerja yang dijalani terkait erat dengan tingkat pendidikan tenaga kerja. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa proporsi terbesar angkatan kerja hanya menyelesaikan SD.

TABEL 1.2. POPULASI PEKERJA 15 TAHUN ATAU LEBIH YANG BEKERJA PADA MINGGU SEBELUMNYA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

TINGKAT PENDIDIKAN	2006	2008	2010
Tidak sekolah	536,407	662,237	625,672
Tidak tamat SD	1,675,248	2,037,701	3,040,044
SD	6,034,228	6,538,529	5,780,137
SMP	4,322,017	4,594,557	4,982,436
SMA (A)	3,525,746	3,929,699	4,507,590
SMA (B)	1,681,511	1,788,376	2,178,045
Diploma	353,089	522,554	481,054
Universitas	426,811	610,388	617,407
Total	18,555,057	20,684,041	22,212,885

Sumber: Publikasi BPS, 2006, 2008, 2010 tentang Kondisi Angkatan Kerja

1.3 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata

Peran pemerintah dalam pembangunan dan pertumbuhan pariwisata di Indonesia tidaklah terbatas pada peran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saja. Seperti di negara-negara sedang berkembang lainnya, pemerintah memainkan peran penting dalam mengambil inisiatif ke arah pengembangan dan pertumbuhan pariwisata.

Di Indonesia, peran pemerintah dalam pengembangan dan pertumbuhan pariwisata dapat dibedakan antara peran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan peran Kementerian-kementerian lain, dan juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.

Sudah ada pergeseran signifikan dalam efektivitas peran pemerintah pusat dalam pengembangan dan pertumbuhan pariwisata sejak sebelum dan sesudah pengesahan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, pemerintah pusat lebih memusatkan perhatian pada fasilitasi dan kontrol, sementara urusan-urusan operasional seperti penerbitan izin diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Indonesia No. 10 (2009) tentang Pariwisata, ayat 23, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :

- Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan wisatawan;
- Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas

Peran pemerintah pada dasarnya mengikuti suatu hirarki wewenang seperti yang diatur dalam perundangan. Wewenang pemerintah pusat, provinsi dan lokal diuraikan dalam Bab VII, Pasal 28-30 UU No 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, yang mencakup serangkaian topik, seperti misalnya, persiapan rencana, legitimasi rencana dan standar, panduan dan kriteria untuk pemantauan dan supervisi sistem, merawat, mengembangkan dan melestarikan aset pemerintah yang potensial untuk pembangunan pariwisata, serta memfasilitasi promosi pariwisata.

Pemerintah pusat juga bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan mengenai pembangunan/ pengembangan sumber daya manusia.

Peran yang dimainkan oleh **Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata**, sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas pariwisata, sebagaimana diindikasikan oleh unit organisasinya adalah sebagai berikut:

- i. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, bertanggung jawab atas pemasaran internasional domestik, juga pencitraan dan pemasaran destinasi;
- ii. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi wisata, mencakup fungsi pengembangan produk, pengembangan industri, pengembangan masyarakat dan standardisasi;
- iii. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, bertanggung jawab antara lain atas perlindungan dan pengembangan aset pusaka purbakala;
- iv. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, bertanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai budaya pokok dan mengendalikan produksi serta impor film;
- v. Badan Penelitian dan Pengembangan dan pengembangan riset Budaya dan Pariwisata untuk mendukung proses pembuatan kebijakan; dan
- vi. Kerjasama Internasional, seperti mengatur keanggotaan institusional dalam organisasi-organisasi internasional seperti UNWTO, PATA dan lainnya.

Ada banyak Kementerian lain memberikan kontribusi atau terkait dengan pengembangan, pertumbuhan dan pengendalian pariwisata di Indonesia. Kementerian-kementerian tersebut antara lain adalah:

Kementerian Lingkungan Hidup, yang menangani pengendalian dampak lingkungan dari usaha-usaha besar dan kegiatannya, termasuk pariwisata.

Kementerian Kehutanan, yang mengelola Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Perburuan serta Taman Satwa, Taman Hutan Raya dan lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengelola taman laut, pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, yang dalam berbagai hal terkait dengan wisata bahari.

Kementerian Umum, yang menangani pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi gedung-gedung cagar budaya milik Pemerintah.

Kementerian Pendidikan Nasional, yang mengatur kebijakan atas sistem pendidikan nasional, dan juga memberikan supervisi dan mengatur implementasinya. Melalui kebijakan mereka, sekolah didorong untuk membawa siswa berwisata di bawah pengawasan guru.

Kementerian Pemuda dan Olah Raga, bertanggung jawab atas berbagai peristiwa olah raga, baik nasional maupun internasional. Meskipun negeri ini tidak menempatkan Kementerian ini di panggung pariwisata, tetapi mereka dalam batas tertentu telah berkontribusi dalam menciptakan kunjungan wisata ke tempat-tempat terjadinya peristiwa olah raga, seperti nusabta Asian Games yang akan datang di Sumatra Selatan dan Pekan Olahraga Nasional di Riau.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mengelola beraneka ragam bisnis yang berkaitan dengan pariwisata, seperti industri penerbangan atau *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC), bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan Resor Nusa Dua di Bali, serta membantu pengembangan TDC di lokasi lain. Maskapai penerbangan nasional dan perusahaan afiliasinya mengoperasikan hotel dan bisnis perjalanan juga. Organisasi pengelolaan bandara juga berada di bawah kementerian ini. Secara umum, tujuan mereka adalah mengelola sektor-sektor strategis dan memacu pertumbuhan di lokasi-lokasi yang diprioritaskan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab atas urusan visa.

Ada banyak Kementerian lain yang terkait dengan pariwisata. Sebagai contoh, **Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, bertanggung jawab atas kesempatan kerja, dan menangani urusan-urusan terkait dengan ketenaga-kerjaan di sektor pariwisata.

1.4 Asosiasi Pariwisata dan Perannya dalam Menciptakan Kesempatan Kerja

Asosiasi-asosiasi pariwisata dapat dikategorikan sebagai asosiasi pengusaha, asosiasi profesional, dan asosiasi pekerja. Asosiasi pengusaha adalah yang paling populer di antara asosiasi-asosiasi pariwisata karena beragam alasan, dan usianya sudah setara kemerdekaan Indonesia. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Agen Perjalanan (*Association of Indonesian Tours and Travel Agencies* - ASITA) adalah asosiasi yang paling populer dan paling tua. Lebih belakangan ini, muncul berbagai asosiasi industri yang lebih heterogen, seperti misalnya Gabungan Pengusaha Wisata Bahari atau GAHAWISRI, di mana berbagai macam kegiatan/industri dapat menjadi anggota, termasuk hotel, maskapai penerbangan, kapal pesiar, jasa perjalanan dan lain-lain, apa pun yang berkontribusi pada industri kepariwisataan bahari. Asosiasi-asosiasi yang homogen juga berkembang, tetapi seleksi keanggotaannya lebih spesifik, misalnya Bumi Melati, suatu asosiasi hotel melati di Bandung, ASTINDO, asosiasi perusahaan *ticketing outbound*, dll. Asosiasi-asosiasi ini semuanya bekerja mengupayakan posisi tawar yang lebih baik untuk anggota mereka dalam hal kebijakan pemerintah. Mereka, pada hakekatnya, adalah asosiasi pengusaha untuk kepentingan pengusaha. Asosiasi-asosiasi pariwisata, seperti sudah disebutkan di atas, biasanya memperjuangkan kepentingan anggota mereka dan bekerja bersama pemerintah dalam mencari dukungan untuk pelaksanaan kegiatan program mereka, yang bervariasi mulai dari pemasaran sampai pengembangan sumber daya manusia dan isu-isu peraturan. Asosiasi-asosiasi industri perjalanan di tingkat nasional, misalnya, dapat menawarkan pelatihan keterampilan dan kemudian asosiasi regional bisa menyampaikan informasi mengenai tersedianya pelatihan kepada anggota mereka masing-masing.

Asosiasi-asosiasi profesi termasuk, misalnya, Asosiasi Manajer Pemasaran Hotel, Asosiasi Juru Masak, dan banyak lainnya. Tujuan mereka terutama adalah meningkatkan profesionalisme dalam bidang masing-masing melalui pelatihan dan/atau berbagi pengalaman untuk keuntungan masing-masing individu dan posisi yang lebih baik di tempat kerja mereka. Termasuk di dalamnya adalah fasilitasi untuk sertifikasi.

Asosiasi jenis ketiga, asosiasi pekerja, secara teoritis bekerja untuk kepentingan anggota mereka di tempat kerja, yang paling umum adalah untuk imbalan yang layak atas kerja mereka, sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. Termasuk di dalamnya adalah upah minimum, jam kerja yang layak, hak atas cuti tahunan dan cuti jenis lain, hak untuk menjadi anggota asosiasi pekerja, dll.

Satu jenis asosiasi lain yang dapat dianggap ‘menciptakan’ kesempatan kerja secara tidak langsung adalah Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata – HILDIKTIPARI. Asosiasi ini seharusnya berminat dalam meningkatkan peluang kerja untuk lulusan mereka. Lulusan dari sekolah perhotelan terbaik bercita-cita untuk bekerja di hotel-hotel dengan klasifikasi tinggi, lebih disukai di luar negeri. Mereka yang lulus dari pelatihan/pendidikan khusus atau yang memiliki cukup pengalaman juga sangat tertarik untuk bekerja di kapal pesiar. Namun demikian, sulit untuk mengukur di mana para lulusan ini akhirnya bekerja karena sekolah tersebut tidak memiliki catatan resmi tentang tempat kerja para alumninya. Karena alasan-alasan inilah, hanya ada sedikit peluang bagi tempat usaha skala kecil untuk mempekerjakan pekerja yang terlatih atau terdidik. Pekerja yang terlatih atau berpendidikan lazimnya membidik upah dan gaji tinggi yang tak mampu dibayar oleh usaha-usaha skala kecil, mereka juga lebih menyukai melatih sendiri tenaga kerja yang belum terlatih, sesuai dengan harapan/kebutuhan. Dengan demikian, industri kepariwisataan di Indonesia jadi terperangkap dalam lingkaran setan. Selain isu-isu ini, sudah lazim bahwa tingkat mobilitas dan angka keluar masuk pekerja sangatlah tinggi, terutama di kalangan pekerja yang sangat terlatih.

Bab 2

Arti Penting Statistik Lapangan Kerja Pariwisata

Sejauh ini, pendekatan paling populer dan mudah untuk mengukur kinerja pembangunan kepariwisataan adalah dengan menggunakan indikator jumlah total kedatangan wisatawan internasional, jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan pengeluarannya.. Jumlah wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri juga digunakan, tetapi tidak begitu sering. Meskipun semua ini adalah indikator-indikator penting untuk memposisikan Indonesia dalam tataran global dan regional, angka-angka tersebut tidak mengukur kinerja pembangunan kepariwisataan dalam kenyataan yang sebenarnya. Kinerja perlu dikaitkan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional. Pariwisata dapat memiliki makna yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lain dan maknanya juga berlainan antara negara- maju dan berkembang.

2.1 Peraturan Perundangan Indonesia yang Mendasari

Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 (2009) tentang Pariwisata di Bab II, pasal 3, pembangunan pariwisata Indonesia memiliki tujuan-tujuan ganda dan bukan hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, **penanggulangan pengangguran**, pelestarian sumber daya, pengembangan budaya, pemupukan rasa cinta tanah air, identitas dan kesatuan nasional dan peningkatan persahabatan internasional di antara negara-negara. Dengan memahami landasan filosofis UU ini, maka masyarakat adalah subyek pembangunan (bukan objek pembangunan), termasuk pembangunan pariwisata. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan paling utama yang harus dicapai pariwisata merupakan alat/kendaraan untuk mencapainya, bukan tujuan akhir.. Bila kesejahteraan masyarakatlah merupakan tujuan utamanya, maka hal itu mencakup antara lain pengurangan kemiskinan dan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, selain akses kepada pendidikan dan layanan kesehatan serta layanan lainnya.

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 (2003) di Bab VII, pasal 9-(1) bahwa tanggung jawab pemerintahlah untuk **memperluas kesempatan kerja**, yang berarti penciptaan kesempatan kerja. Kesempatan kerja dalam arti ini dapat berarti langsung sebagai pegawai pemerintah maupun swasta, didukung oleh kebijakan dan peraturan pemerintah yang menguntungkan bagi pemberi kerja dan pencari kerja, sehingga terciptalah pasar tenaga kerja yang sehat.

Statistik kesempatan kerja dalam pariwisata sangatlah penting untuk memperlihatkan seberapa besar pariwisata telah berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, dan dengan demikian penciptaan lapangan kerja sejogyanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan pariwisata.

Data kesempatan kerja bukan saja menyediakan informasi berapa banyak pariwisata telah berkontribusi dalam program penghapusan pengangguran pada semua tingkatan (nasional, regional dan lokal), tetapi juga menyediakan suatu gambaran tentang suatu sisi kesejahteraan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Statistik lapangan kerja dapat mengilustrasikan berbagai manfaat yang diberikan oleh pariwisata bagi masyarakat, terutama karena pembangunan pariwisata bukan sekadar untuk memuaskan wisatawan, tapi yang lebih penting adalah untuk memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam segi inilah, statistik kepariwisataan menggambarkan kondisi kerja dalam bidang kepariwisataan: jumlah jam kerja, upah yang diterima, siapa yang bekerja dari sisi gender, usia, dan pendidikan. Ini adalah indikator-indikator yang tepat untuk memahami sejauh mana masyarakat menerima dampak langsung dari kehadiran pariwisata di daerah mereka.

Statistik juga mengilustrasikan efektivitas kebijakan maupun peraturan untuk menciptakan dan memelihara pasar tenaga kerja yang sehat. Statistik memasok data kepada pembuat kebijakan untuk melakukan penilaian kebijakan secara lebih baik, membantu mereka mengevaluasi kondisi kerja apakah sesuai dengan peraturan dan memahami apakah tujuan-tujuan kebijakan terkait sudah dicapai atau apakah ada kegagalan kebijakan atau kegagalan pasar. Secara ringkas, statistik pariwisata membantu kita untuk memahami:

- i. Isu-isu pokok: misalnya, banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan rendah;
- ii. Kondisi kerja: jumlah jam kerja, tingkat upah, peluang kerja yang bersifat musiman, dll,;
- iii. Program pendidikan dan pelatihan mana yang dibutuhkan dan peningkatan produktivitas ; dan
- iv. Gambaran tentang pasar tenaga kerja yang menyeluruh: bukan hanya berapa banyak yang bekerja atau setengah bekerja, tetapi juga kelompok populasi mana yang menganggur atau setengah menganggur. Indikator-indikator ini adalah yang paling relevan untuk memahami sejauh mana kita telah berkontribusi pada salah satu tujuan pembangunan pariwisata, menanggulangi pengangguran.

Lapangan kerja dalam pariwisata sangat penting juga pariwisata, telah ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas dalam skenario pembangunan nasional, antara lain ditunjukkan melalui Instruksi Presiden No.16 (2005) tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang memerintahkan secara langsung kepada 20 Kementerian/Lembaga Pemerintah setingkat Menteri, seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mendukung Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan pariwisata nasional. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara spesifik ditugaskan untuk mendukung promosi manca negara melalui pelatihan kualitas pekerja migran dan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pariwisata. Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional, bersama lainnya, diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi pekerja dalam industri kepariwisataan.

2.2 Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan

Pariwisata adalah sektor utama dalam perekonomian Indonesia dengan beragam tingkat kepentingan dalam perekonomian wilayah/provinsi.

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah diperkenalkan melalui seminar, konferensi dan artikel di media maupun jurnal akademik. Apakah cita-cita pembangunan berkelanjutan ini sudah diterapkan atau sejauh mana hal itu sudah diupayakan tetap menjadi suatu pertanyaan penting.

Prinsip keberlanjutan ini dapat diterapkan pada beragam aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya pembangunan pariwisata. Suatu keseimbangan yang tepat harus ditentukan antara ketiga dimensi tersebut untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang skema-skema pembangunan. Mencapai pariwisata yang

berkelanjutan merupakan suatu proses terus menerus dan menuntut pemantauan yang konstan terhadap dampaknya sehingga tindak lanjut atau langkah koreksi dapat diusahakan.

Pariwisata berkelanjutan harus (i) memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal; (ii) menghormati keotentikan sosial budaya dan masyarakat setempat; dan (iii) memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak dan menyediakan manfaat sosial ekonomi untuk semua pemangku kepentingan, **termasuk kesempatan kerja dan memperoleh pendapatan yang stabil**, yang terdistribusi adil, menyediakan layanan sosial kepada masyarakat setempat dan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan (Definisi Konseptual WTO, 2004). Dengan demikian, statistik tentang kesempatan kerja yang sebenarnya di berbagai daerah tujuan wisata merupakan alat untuk mengukur unsur keberlanjutan pembangunan.

2.3 Di balik Industri Kepariwisata

Perlu disepakati bahwa pariwisata di negara manapun hanya dapat terjadi karena keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Seberapa banyak keterlibatan pemerintah dalam pariwisata juga penting dicatat, karena keterlibatan tersebut berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Divisi pariwisata dalam birokrasi Indonesia adalah suatu pilihan, tergantung pada posisi pariwisata dalam perekonomian daerah. Perlu pula diidentifikasi kesempatan kerja terkait dengan pariwisata dalam sektor publik. Sejauh ini, data tersebut belum dikumpulkan. Dari segi jumlah, pekerja dalam sektor publik di tingkat nasional, provinsi dan lokal pastilah sangat kecil dibandingkan dengan mereka yang bekerja langsung atau tidak langsung untuk wisatawan/pariwisata dalam sektor swasta, tapi sekalipun demikian, orang-orang yang bekerja sebagai aparat pemerintah ini, meskipun kecil jumlahnya, tidak boleh diabaikan dan harus dipertimbangkan, karena mereka menentukan kualitas dan arah pembangunan. Tentu saja, ini memerlukan pendekatan yang berbeda dan pihak berwenang berperan pokok dalam menentukan kualitas dan arah pembangunan. Yang penting bukanlah jumlahnya, tetapi kompetensi mereka dalam memimpin. Mereka yang secara tidak langsung melayani sektor bisnis, yaitu para pendidik dan pelatih, baik swasta maupun pemerintah, yang bekerja di berbagai tingkatan dan untuk beragam aspek pendidikan serta pelatihan pariwisata, serta para peneliti dan pekerja LSM memiliki makna yang tak kalah penting.

2.4 Arti Penting Statistik Lapangan Kerja Sebagai Indikator

Statistik lapangan kerja dapat digunakan sebagai:

- i. katalisator untuk menelusuri atau mengarahkan perhatian kita pada isu-isu pokok seperti tingkat upah, pekerja muda, jam kerja yang panjang, dll;
- ii. pendukung untuk perencanaan yang lebih baik; misalnya rencana pengembangan tenaga kerja dan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung industri kepariwisataan dan sektor publik, serta perencanaan, pelemagaan pelatihan dan program pendidikan;
- iii. Indikator keberhasilan/kinerja, yang mengungkapkan sejauh mana pariwisata telah berkontribusi kepada salah satu tujuan pembangunan nasional; dan
- iv. Alat untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Statistik lapangan kerja umumnya didapat melalui survei rumah tangga dan survei industri yang dilakukan BPS, serta dari catatan-catatan administratif Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Berbagai survei BPS yang terkait dengan lapangan kerja, seperti tercantum dalam laporan ILO terdahulu, mencakup SAKERNAS, Survei Usaha, Survei Upah Buruh, Survei Struktur Upah, Survei Industri Kecil dan Menengah, Survei Usaha

Terintegrasi (SUSI), Survei UKM dan juga Sensus Penduduk maupun Sensus Ekonomi. Tidak semua survei ini dilakukan secara teratur atau mencakup seluruh wilayah nasional Indonesia.

Statistik kesempatan kerja pariwisata di Indonesia pada hakekatnya dapat disiapkan dari sumber yang sama dengan memroses data bidang spesifik yang terkait dengan pariwisata. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan apa yang dipandang sebagai industri kepariwisataan. Statistik yang ada di BPS biasanya menempatkan pariwisata dalam satu kelompok bersama perdagangan. Bisnis yang tercakup dalam survei usaha masih terbatas pada akomodasi, jasa perjalanan, dan jasa penyediaan makanan dan minuman, dan masih mengabaikan sektor informal. Karena keanekaragaman wilayah/tujuan wisata di Indonesia, apa yang tergolong sebagai industri kepariwisataan dapat berbeda-beda antar daerah. Sebagai akibatnya, tidaklah cukup untuk mengidentifikasi sub-sektor industri khusus Indonesia (*country specific industries*) seperti yang dikemukakan oleh UNWTO; usaha/industri khusus wilayah tertentu juga perlu diidentifikasi.

Sensus kependudukan yang mencakup segala jenis lapangan kerja tidak mengelompokkan pariwisata dengan cara seperti itu. Pariwisata hanya diwakili oleh hotel dan restoran dan kemudian, dalam pemrosesan data, dikelompokkan bersama dengan perdagangan.

Baru akhir-akhir ini (tahun 2000) pemerintah mulai mempersiapkan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas)/National Tourism Satellite Account (TSA) untuk menghasilkan indikator-indikator turunan atas dampak ekonomi pariwisata (langsung maupun tidak langsung). Nesparnas juga menunjukkan jumlah yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung menurut sektor.

Dominasi sektor informal harus dilihat sebagai indikasi kemampuan masyarakat yang positif untuk menciptakan peluang kerja sendiri, betapapun kecilnya sumber daya dan betapapun rendahnya pendidikan yang mungkin mereka miliki. Dengan pola pikir serupa, kita dapat menghasilkan kebijakan untuk memberdayakan masyarakat dan memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja informal, daripada melihatnya sebagai gangguan ketertiban dan menyingkirkannya dari banyak lokasi strategis.. Saat ini, Indonesia memiliki statistik yang sangat terbatas mengenai sektor informal pada umumnya dan, sektor informal terkait pariwisata, pada khususnya. Ada kebutuhan lebih banyak akan penelitian/riset terhadap sektor ini guna memberikan gambaran lebih lengkap mengenai potensi dan masalah yang mereka hadapi dan kontribusi mereka pada sektor ini dalam hal melayani pengunjung di tempat-tempat wisata.

Bab 3

Mengukur Kesempatan Kerja dalam Industri Kepariwisata: Situasi Kini dan Tantangan Lebih Jauh Melampaui Neraca Satelit Pariwisata

3.1 Situasi Masa Kini

Bagian ini mengkaji Neraca Satelit Pariwisata (Nespar) dalam hal ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, dan khususnya, bagaimana hal tersebut terkait dengan indikator perkerjaan yang layak/*decent work indicators* (DWI). Dalam meninjau isu-isu ini, kita perlu mengkaji kembali Nesparnas dan Nesparda Provinsi, terutama kualitas data dan informasi yang mendukung kompilasi ini. Kita juga perlu memeriksa perkembangan Nespar terbaru seperti direkomendasikan dalam System of National Accounts (SNA) 2008 dan TSA: RMF 2008.

3.1.1 Neraca Satelit Pariwisata/TOURISM Satellite Accounts: Informasi Umum

Seperti dinyatakan dalam *System of National Accounts* (SNA) 1993, neraca satelit atau sistem satelit umumnya menekankan kebutuhan untuk memperluas kapasitas analitis perhitungan nasional untuk bidang-bidang sosial yang dipilih. Dengan demikian, neraca satelit dapat memainkan peran ganda sebagai alat untuk analisa dan sebagai alat koordinasi statistik. Nespar adalah suatu neraca satelit yang sudah lama mapan, banyak negara sudah melakukan kompilasi pada tahap tertentu. Sebuah manual panduan internasional, *The 2008 Tourism Satellite Accounts: Recommended Methodological Framework*, sudah diterbitkan.

Tujuan dari Nespar adalah untuk menyediakan informasi berikut ini:¹⁶

- a. Agregat makroekonomi yang mendeskripsikan besarnya ukuran dan kontribusi ekonomi pariwisata;

16 BPS, System of National Accounts, Chapter 29 (paragraf 29.90), 2008

- b. Data terperinci tentang konsumsi pariwisata dikaitkan dengan kegiatan wisatawan sebagai konsumen, dan bagaimana permintaan ini dipenuhi oleh pasokan domestik dan impor;
- c. Neraca produksi terperinci tentang industri kepariwisataan, mencakup data lapangan kerja dan pembentukan modal tetap; dan
- d. Pertautan antara data ekonomi dan informasi non-moneter seperti perjalanan, jangka waktu, tujuan dan variabel-variabel pariwisata lainnya.

Dalam hal koordinasi statistik, kita harus merujuk pada Rekomendasi Internasional untuk Statistik Pariwisata 2008 (*International Recommendations for Tourism Statistics 2008*), khususnya "Chapter 7: Employment in Tourism Industries."¹⁷

Neraca Satelit Pariwisata Indonesia terbaru mengukur belanja konsumsi, konsumsi pemerintah, investasi modal, perdagangan luar negeri dan dalam negeri, serta pembelanjaan bisnis. Tim penyusun juga mengidentifikasi kesempatan kerja yang tercakup dalam industri pariwisata dan dalam berbagai kegiatan yang memasok barang serta jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi maupun belanja barang modal. Pendekatan tim Nespar sepenuhnya sesuai dengan *system of national accounts* yang sudah direvisi dan diterima umum (SNA 2008). Seluruh konsep ekonomi didasarkan pada aturan-aturan akunting untuk kompilasi PDB Indonesia. Metodologi Nespar juga memanfaatkan model *input-output* (I-O), I-O Indonesia dan I-O masing-masing provinsi. I-O Indonesia terbaru adalah I-O 2008 yang sudah dimutakhirkan dan dikembangkan dari I-O 2005 yang komprehensif. Model-model ini digunakan secara ekstensif untuk mempertautkan kontribusi PDB sektoral dan sisi pasokannya, yang mencakup kesempatan kerja.

3.1.2 Neraca Satelit Pariwisata Indonesia

Saat ini statistik kesempatan kerja untuk industri kepariwisataan Indonesia hanya tersedia dari Nesparnas Indonesia dan Nespar dari enam provinsi: Bali, DKI Jakarta, Banten, Riau, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.¹⁸ Tinjauan atas kualitas data pokok dan pendekatan metodologis hasil Nespar difasilitasi oleh tren yang ada dari indikator-indikator makro ekonomi tertentu, seperti dicerminkan dalam tabel-tabel berikut. Berdasarkan tabel-tabel ini, diskusi dan argumentasi mengenai statistik kesempatan kerja dan masalah-masalah lain yang terkait dapat dikembangkan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengamati dan menganalisa tren-tren yang ada.

Suatu analisis deskriptif yang diturunkan dari angka-angka pada tabel-tabel ini mengungkapkan bidang-bidang yang tertentu untuk dibahas, termasuk isu-isu konseptual dan metodologis maupun pertanyaan-pertanyaan mengenai cakupan data, yang muncul dalam proses konstruksi Nespar

¹⁷ Lihat APPENDIX III di Chapter 7, IRTS 2008

¹⁸ NESPAR untuk dua provinsi: Jawa Barat dan Jawa Tengah sedang dalam proses penyusunan.

TABEL 3.1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI TERPILIH DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA 2000-2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Output (Triliun RP)	2572.76	2729.90	3424.69	3531.67	4477.56	5632.90	6640.70	7840.57	9882.38
GDP (Triliun RP)	1368.09	1490.97	1610.01	1786.69	2273.14	2784.90	3339.50	3957.40	4951.36
Pajak Tidak Langsung (Triliun RP)	61.30	61.57	71.19	87.08	75.23	127.11	131.00	154.31	194.31
Upah & Gaji (Triliun RP)	406.09	407.48	466.97	533.70	724.99	849.74	1028.20	1216.80	1519.12
Kesempatan Kerja (Juta)	89.84	90.81	91.65	90.79	93.72	93.96	95.46	99.93	102.55

Sumber: BPS, Statistik Kesempatan Kerja dan PDB Indonesia, beberapa tahun

Tabel 3.1. di atas mengilustrasikan nilai nominal output, PDB, pajak tak langsung, upah dan gaji (dalam triliun rupiah) dan angka kesempatan kerja (dalam juta) dari tahun 2000 hingga 2008. Selama masa delapan tahun ini, nilai nominal PDB Indonesia meningkat konsisten lebih dari 17 persen per tahun, sementara angka kesempatan kerja naik hanya sekitar 1,7 persen per tahun.

TABEL 3.2. TREN MAKRO EKONOMI PARIWISATA TERPILIH DAN KESEMPATAN KERJA PARIWISATA DI INDONESIA 2000-2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Output (Triliun RP)	238.60	215.05	210.64	212.41	243.10	289.73	306.50	362.10	499.67
GDP (Triliun RP)	128.31	115.17	98.81	99.24	113.78	146.80	143.62	169.67	232.93
Pajak Tidak Langsung (Triliun RP)	5.08	5.44	5.53	5.11	5.88	6.58	5.40	6.31	8.41
Upah & Gaji (Triliun RP)	40.09	34.32	29.91	29.31	33.75	38.76	45.63	53.88	75.45
Kesempatan Kerja (Juta)	7.36	7.78	7.77	7.52	8.49	6.55	4.41	5.22	7.02

Sumber: BPS dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata < Nesparnas, beberapa tahun

Tabel 3.2. mempertlihatkan kecenderungan kegiatan (indikator) makroekonomi tertentu dan kesempatan kerja yang tercipta oleh industri kepariwisataan di Indonesia. Kecenderungan PDB pariwisata berfluktuasi selama delapan tahun dari 2000 sampai 2008, dengan kecenderungan menurun pada tiga tahun pertama sampai tahun 2002 dan kemudian naik secara konsisten hingga tahun 2008. Untuk periode 2000-2008 secara keseluruhan, kenaikan rata-rata PDB pariwisata berkisar 9 persen per tahun sementara angka kesempatan kerja menunjukkan perilaku yang berbeda. Di luar kenaikan yang dialami pada tahun 2004, kesempatan kerja yang tercipta oleh kegiatan pariwisata menurun dari 7,36 juta orang pada tahun 2000 hingga 7,02 juta pada 2008.

TABEL 3.3. INDIKATOR-INDIKATOR PARIWISATA TERPILIH TERHADAP INDIKATOR-INDIKATOR MAKRO EKONOMI INDONESIA 2000-2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Output (%)	9.27	7.88	6.15	6.01	5.43	5.15	4.62	4.62	5.06
2. GDP (%)	9.38	7.72	6.14	5.55	5.01	5.27	4.30	4.29	4.70
3. Pajak Tidak Langsung (%)	8.29	8.84	7.77	5.87	7.81	.18	4.12	4.09	4.32
4. Gaji & Upah (%)	9.87	8.42	6.41	5.49	4.66	4.56	4.44	4.43	4.97
5. Kesempatan Kerja (%)	8.11	8.57	8.48	8.28	9.06	6.97	4.65	5.22	6.84

Sumber: dihitung dari tabel 3.1 dan 3.2

Tabel 3.3. melengkapi temuan-temuan dari dua tabel sebelumnya, khususnya mengenai kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan. Pangsa kesempatan kerja yang tercipta oleh industri kepariwisataan menunjukkan penurunan dari 8,11 persen pada tahun 2000 menjadi hanya 6,84 persen pada 2008. Porsi pariwisata pada GDP selama jangka waktu yang sama juga menunjukkan kecenderungan menurun dari 9,38 persen pada 2000 menjadi hanya 4,70 persen pada 2008.

TABEL 3.4. PANGSA PERBANDINGAN PORSI INDIKATOR PARIWIATA TERTENTU DI BEBERAPA PROVINSI TERPILIH (DENGAN BERAGAM TAHUN ACUAN)

	Bali 2007	DKI Jakarta 2009	Banten 2008	Sulawesi Tengah 2008	Riau 2007	Sumatera Selatan 2006	Indonesia 2008	Rata-rata (06-08)
1. Output (%)	51.56	6.46	2.56	6.04	2.31	1.25	5.06	4.80
2. GDP (%)	46.16	5.84	3.04	4.92	2.14	1.07	4.70	4.46
3. Pajak Tidak Langsung (%)	66.44	8.33	3.23	7.23	4.03	1.50	4.32	4.19
4. Gaji & Upah (%)	36.12	6.54	3.15	2.49	3.11	1.17	4.97	4.65
5. Kesempatan Kerja (%)	40.56	9.48	4.03	2.78	5.22	1.04	6.84	5.59

Sumber: Nesparda beberapa provinsi dengan tahun perhitungan yang berbeda

Karena besarnya keanekaragaman antara kondisi sosial-ekonomi dan banyak aspek lain terkait dengan potensi pariwisata di berbagai provinsi Indonesia, kita perlu melakukan perbandingan atas beberapa indikator terpilih (untuk analisa lintas provinsi) dan bukan hanya melakukan analisis berdasar runtutan waktu seperti diuraikan dalam tiga tabel sebelumnya.

Tabel 3.4. memperlihatkan perbandingan antara pangsa indikator-indikator pariwisata tertentu di enam provinsi dengan beragam daya tarik sebagai tempat tujuan wisata. Mencermati angka-angka ini, kita akan melihat bahwa provinsi Bali memiliki karakteristik yang secara signifikan berbeda dengan lima provinsi lainnya. Dengan menggunakan angka-angka ini, kita bisa menetapkan *location quotient* (LQ) dengan pertimbangan lebih cermat.

Bali, ikon pariwisata Indonesia yang populer secara internasional, mewakili provinsi dengan ketergantungan tertinggi terhadap pariwisata. DKI Jakarta, ibu kota negara, menarik manfaat yang signifikan dari pariwisata, lebih dari provinsi lain di luar Bali. Di DKI Jakarta, kota metropolitan dan pusat perdagangan serta keuangan Indonesia, peran pariwisata kurang signifikan dibandingkan dengan Bali, yang berfokus dan bergantung pada industri kepariwisataan. Meskipun angka kedatangan internasional dan perjalanan domestik ke DKI Jakarta sangat tinggi, diasumsikan bahwa angka ini didominasi oleh mereka yang melakukan perjalanan bisnis dan tinggal dalam waktu lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang berkunjung ke Bali. Banten, di mana terletak bandara internasional utama, Soekarno Hatta, bukanlah tujuan wisata yang populer bagi wisatawan internasional tetapi masih menikmati arus wisatawan dalam jumlah signifikan dari provinsi-provinsi tetangganya, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sulawesi Tengah memperlihatkan jumlah yang lebih kecil dalam hal wisatawan internasional maupun domestik, tetapi pajak tak langsung dari industri kepariwisataannya menduduki tempat kedua setelah DKI Jakarta. Dua provinsi lainnya, yang dapat dipandang sebagai tujuan/destinasi wisata yang baru tumbuh karena perekonomian wilayah memperlihatkan pertumbuhan signifikan masih belum menarik banyak keuntungan dari pariwisata seperti terlihat dari angka-angka perbandingannya. Pariwisata di kedua provinsi memang berkembang pesat tetapi masih terbatas di ibu kota masing-masing. Selain itu, posisi industri pertambangan dan kehutanan yang kuat di kedua provinsi itu membuat pangsa pariwisata tampak tidak signifikan.

Menarik kesimpulan dari analisis tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa:

- i. Terdapat variasi yang sangat besar antara kinerja ekonomi pariwisata antara berbagai provinsi di Indonesia yang tergantung pada daya tarik bagi wisatawan maupun struktur ekonomi wilayahnya serta sejauh mana pembangunan pariwisata di dalam masing-masing provinsi tersebut.
- ii. Angka nasional yang relatif rendah mungkin mengindikasikan taksiran yang terlalu rendah. Angka-angka yang ditaksir terlalu rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti cakupan data dan terabaikannya informasi pendukung. Taksiran yang terlalu rendah ini kemungkinan besar disebabkan oleh diabaikannya **kegiatan-kegiatan sektor informal**¹⁹ seperti: kerajinan tangan, industri makanan rumahan, fasilitas makanan dan minuman untuk konsumsi langsung, moda transportasi tradisional dan berbagai layanan jasa terkait dengan kegiatan pariwisata. Satu sumber lain dari rendahnya angka taksiran ini berasal dari fakta bahwa survei usaha hanya mencakup akomodasi, jasa perjalanan dan jasa makanan dan minuman. Transportasi dan kegiatan-kegiatan khas daerah belum dimasukkan.

3.1.3 Berbagai Sumber Statistik Kesempatan/Lapangan Kerja di Indonesia

Bagian ini meninjau sumber-sumber data yang ada dan dapat digunakan untuk mengevaluasi serta memantau statistik ketenagakerjaan dan lapangan kerja di Indonesia, juga untuk menganalisa kecenderungan serta karakteristik ketenagakerjaan dan kesempatan kerja terkait dengan industri kepariwisataan.

Secara umum, data ketenagakerjaan dan kesempatan kerja di Indonesia bersumber dari sensus, survei dan catatan administratif. Ada tiga jenis sensus yang telah dilakukan oleh BPS, termasuk sensus penduduk yang dilakukan setiap tahun berakhiran nol (0) (1980, 1990, 2000, 2010); sensus pertanian yang dilaksanakan setiap tahun berakhiran tiga (3) (1993, 2003), dan sensus ekonomi yang dilakukan setiap tahun berakhiran enam (6) (1996, 2006).

19 Aktivitas informal di Indonesia sangat signifikan. Bidang perdagangan, makanan dan minuman, dan akomodasi termasuk dalam industri dimana banyak perusahaan tanpa status legal (lebih dari 10 juta unit di tahun 2004) dan dengan pekerja informal (63.9% di tahun 2005 dan 62.1% di tahun 2009). Jumlah pekerja informal dalam industri ini (6.85 juta) hampir sama jumlahnya dengan jumlah pekerja di sektor formal (7.01 juta). Suahasil Nazara, *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi* (Jakarta: ILO Country Office for Indonesia, 2010).

BPS juga melaksanakan survei reguler dan ad-hoc, yaitu survei rumah tangga, survei usaha dan survei data masyarakat, tergantung pada unit enumerasi dan maksud tujuannya.

Catatan data administratif adalah sumber lain untuk data ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sumber utama data administratif, sementara lembaga pemerintah lainnya serta sektor publik mungkin pula menghasilkan statistik yang dapat dikaitkan dengan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja di Indonesia.

Sumber-sumber data yang ada dirinci pada bagian berikut ini.

Survei Rumah Tangga

Sensus Penduduk

Sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap sepuluh tahun untuk mengumpulkan informasi umum tentang penduduk. Salah satu segmen pertanyaannya berfokus pada statistik angkatan kerja dan kesempatan kerja. Secara keseluruhan, enam sensus sudah dilaksanakan (1961, 1971, 1980, 1990, 2000 and 2010). Sensus-sensus ini mengumpulkan informasi berkaitan dengan situasi sosial-ekonomi penduduk, termasuk angkatan kerja, meskipun hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menyediakan data *benchmark* umum setiap sepuluh tahun.

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Karakteristik penduduk Indonesian berubah demikian cepat sehingga diperlukan data yang lebih sering untuk mengikuti perubahan tingkat fertilitas dan mortalitas maupun karakteristik migrasi dan angkatan kerja. Data angkatan kerja dan kesempatan kerja yang dikumpulkan dalam SUPAS adalah sama dengan yang ada dalam sensus penduduk. Sampel rumah tangga dalam jumlah besar memungkinkan survei ini menyediakan statistik kesempatan kerja bagi wilayah administratif yang kecil.

Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS)

SAKERNAS menggunakan pendekatan angkatan kerja yang ketat, memakai acuan periode “kini” dan “biasa”. Survei ini dirancang untuk mendapatkan data serial untuk dikaitkan dengan data dari sensus penduduk dan SUPAS, khususnya data angkatan kerja dan kesempatan kerja. Selama 2005-2010, SAKERNAS dilakukan dua kali setahun di bulan Pebruari dan Agustus. Pada tahun 2011, SAKERNAS akan dilakukan per kuartal di bulan Februari, Mei, Agustus, dan Nopember dengan ukuran sampel mencakup sekitar lima ribu rumah tangga yang tersebar di lima ribu Blok Sensus seluruh Indonesia. Untuk survei Agustus, akan diambil sampel tambahan dari lima belas ribu Blok sensus untuk memberikan estimasi lebih akurat pada data angkatan kerja dan kesempatan kerja di tingkat kabupaten dan kota.

Survei Sosial ekonomi Nasional (SUSENAS)

SUSENAS merupakan survei rumah tangga multi-guna dengan tujuan utama mengumpulkan data demografi dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Sesudah tahun 1997, SUSENAS dirancang ulang untuk menyederhanakan pelaksanaannya dengan mencakup hanya tiga modul termasuk modul belanja konsumsi, yang dikumpulkan setiap tiga tahun, modul indikator kesejahteraan yang dilakukan setiap tahun, dan modul ketenagakerjaan dan kesempatan kerja yang dikumpulkan setiap tahun dan dirancang untuk dapat dibandingkan dengan data dari SAKERNAS. Pada tahun 2011, SUSENAS akan dilaksanakan setiap kuartal dengan ukuran sampel sekitar tujuh ribu rumah tangga setiap kuartal.

Survei Perusahaan/Usaha

BPS melakukan beberapa survei usaha yang berisi data angkatan kerja dan lapangan kerja. Kebanyakan survei ini mengumpulkan data biaya produksi, struktur *input* dan *output*, formasi modal, dan operasi bisnis. Data kesempatan kerja dikumpulkan sebagai bagian dari informasi mengenai struktur biaya. Di antara berbagai survei lain yang saat ini dilaksanakan lewat enumerasi usaha adalah sensus ekonomi, survei industri manufaktur besar dan sedang, survei usaha terintegrasi, (SUSI); survei UKM, survei usaha perhotelan, survei upah buruh dan, akhirnya survei struktur upah. Beberapa survei usaha yang sudah dipilih disajikan di bawah.

Survei Upah Buruh

Survei ini dimulai pada tahun 1979 untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang perkembangan dan struktur upah, termasuk distribusinya menurut pekerjaan. Survei ini dilakukan per kuartal setiap tahun pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Upah dipilah menurut ukuran usaha, jender, subsektor dan kepemilikan modal. Survei Upah Buruh tahun 2010 mencakup 3675 usaha termasuk industri manufaktur, hotel, non migas, peternakan dan perikanan berikut perdagangan grosir dan eceran.

Survei Struktur Upah

Survei ini dilakukan setiap tahun, tetapi hanya bagi industri-industri tertentu dan jenis pekerjaan yang terpilih. Survei didasarkan pada kerangka kerja yang digunakan dalam survei upah buruh. Pertanyaannya mencakup lapangan kerja, pendapatan dan status dalam pekerjaan.

Survei Industri Manufaktur Besar dan Sedang

Survei ini dilakukan setiap tahun dan mencakup perusahaan manufaktur ukuran besar dan sedang. Survei mengumpulkan informasi terperinci mencakup biaya produksi, *output* dan jasa yang dihasilkan, daya, investasi, modal dan aset.

Survei Industri Mikro dan Kecil dan Usaha Terintegrasi (SUSI)

Survei industri mikro dan kecil hanya dilakukan di beberapa bagian Indonesia. Sejak Sensus Ekonomi tahun 2006, survei industri mikro dan kecil diintegrasikan ke dalam SUSI. SUSI mencakup seluruh usaha non-pertanian tanpa badan hukum; sampelnya sekitar lima belas ribu usaha seluruh Indonesia. Survei ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan , status kerja dan kompensasi pekerja.

Survei Usaha Hotel, Restoran dan Jasa Perjalanan Wisata

Statistik hotel dan akomodasi lainnya didasarkan pada survei inventarisasi yang dilakukan oleh kantor-kantor wilayah BPS di seluruh Indonesia. Cakupan data survei ini antara lain adalah jumlah rata-rata pekerja per tempat usaha/kamar dan jumlah pekerja menurut jenis pekerjaan.

Statistik restoran yang diturunkan dari survei ini juga dilakukan oleh kantor-kantor wilayah BPS di seluruh Indoensia. Cakupan data surveinya antara lain adalah jumlah pekerja menurut jender, pendidikan, kewarganegaraan, dan kompensasi.

Statistik jasa perjalanan wisata didasarkan pada survei enumerasi lengkap yang dilakukan kantor-kantor wilayah BPS di seluruh Indonesia. Cakupan data survei meliputi jumlah pekerja menurut jender, kewarganegaraan, pendidikan, serta kompensasi pekerja.

Catatan Administratif dan Sumber-sumber Potensial Lainnya

Survei Data Masyarakat dan Survei Potensi Desa (PODES)

Survei data masyarakat, seperti PODES, dilakukan secara teratur oleh BPS sebagai bagian dari program pengumpulan data besar-besaran seperti Sensus, SUPAS dan berbagai survei sampel nasional lainnya. Data masyarakat berisi informasi agregat dan data kesempatan kerja dalam PODES sangatlah terbatas.

Catatan Administratif

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyimpan catatan tentang ketenagakerjaan dan data terkait dengan kesempatan kerja, tetapi biasanya, data ini tidak diproses atau diterbitkan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki catatan tentang warga Indonesia yang bekerja di manca negara, tetapi karena sejumlah alasan, mutu data ini kurang bagus. Kementerian ini sudah menjalankan program pengembangan terkait kesempatan kerja yang lain dan perlu memelihara catatan ini. Namun demikian, ketersediaan dan konsistensi data sangat terbatas dan tidak diproses secara sistematis untuk menghasilkan statistik.

Sumber Potensial untuk Statistik Kesempatan Kerja

BPS secara teratur menerbitkan Tabel *Input-Output (I-O)*, *Flow of Funds (FOF)* dan *the Social Accounting Matrix (SAM)*, dengan memaksimalkan pemanfaatan data yang ada. Survei-survei khusus sudah dirancang untuk menunjang publikasi tersebut. Satu contoh yang baik untuk ini adalah Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah tangga (SKTIR) 2008.

SKTIR 2008 dilaksanakan di 13 provinsi, mencakup sampel yang terdiri dari 5480 rumah tangga dengan tujuan utama untuk menentukan struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga ini. Beberapa segmen dalam kuesioner merupakan sumber utama informasi tentang tenaga kerja dan lapangan kerja. Para anggota rumah tangga diidentifikasi secara individual menurut status mereka dalam kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan dan jenis usahanya.

SAM menghasilkan data tentang jumlah kesempatan kerja dalam ekivalen dengan pekerja. Beberapa tabel menyajikan data jumlah jam kerja rata-rata per minggu, upah dan gaji rata-rata per pekerja.

3.2 Diluar Neraca Satelit Pariwisata

Analisis rangkaian waktu yang disajikan dalam Tabel 3.1. menunjukkan bahwa industri kepariwisataan di Indonesia menghadapi tantangan menurunnya porsi pariwisata dalam dasa warsa pertama abad dua puluh satu meskipun ada persepsi umum bahwa pertumbuhan dan pembangunan sudah normal kembali sesudah naik turun selama krisis nasional dan regional.

Pangsa pariwisata dalam PDB, pajak, upah dan gaji maupun kesempatan kerja seperti diperlihatkan dalam Tabel 3.2. menunjukkan kemerosotan yang sangat signifikan dari tahun-tahun pertama dasa warsa ini dibandingkan dengan tahun 2007/8. Analisis komparatif selanjutnya pada Tabel 3.5. melangkah lebih jauh dari indikator-indikator kinerja, tidak terbatas pada kedatangan internasional, tetapi memperhitungkan jumlah perjalanan domestik dan belanja yang ditimbulkan.

TABEL 3.5. PERUBAHAN KONTRIBUSI PARIWISATA PADA INDIKATOR-INDIKATOR EKONOMI UTAMA 2000-2008

Indikator (1)	2000 (2)	2008 (3)	Decrease in contribution (2)-(3) /(2)
1.Output (%)	9.27	5.06	4.21 - 45.41 %
2.GDP (%)	9.38	4.70	4.68 - 49.89 %
3.Pajak Tidak Langsung (%)	8.29	4.32	3.97 - 47.89 %
4.Upah dan Gaji (%)	9.87	4.97	4.90 - 49.65 %
5.Kesempatan Kerja (%)	8.11	6.84	1.27 - 15.66 %

Sumber: Diperhitungkan dari tabel 3.4

3.2.1 Kesempatan Kerja dan Sektor Informal

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa penurunan pangsa kesempatan kerja jauh lebih kecil dari pada penurunan pada semua indikator lain, yang mungkin berarti bahwa makin besar penurunan produktivitas, yang menyebabkan penurunan upah dan gaji secara signifikan. Hal ini dapat menjelaskan tumbuhnya pangsa sektor informal, yang mungkin tidak dimasukkan sebagai kontribusi ekonomi, tetapi dicatat sebagai pasokan tenaga kerja dalam survei rumah tangga.

Menarik untuk dilihat bahwa sekalipun pangsa *output* pariwisata, PDB dan pajak tidak langsung dari pariwisata menurun hingga tahun 2004, sumbangan penyediaan kesempatan kerja tetap membaik secara signifikan, dari 8,11% pada tahun 2000 menjadi 9,06% pada tahun 2004. Penurunan lebih lanjut tidak terhindarkan pada tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2006 makin memburuk sampai menjadi 4,65%.²⁰ Jumlah kedatangan wisatawan internasional dan belanja totalnya mencapai titik terendah pada tahun 2003, namun pariwisata nusantara selama masa ini tumbuh sampai 4,41% dan belanja mereka 2,98% lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya (20,71% dari angka 2001). Hal ini mungkin dapat dilihat sebagai indikasi dari peran yang dimainkan oleh pariwisata nusantara dalam mempertahankan penciptaan kesempatan kerja dalam industri pariwisata.

Satu butir menarik lainnya adalah fakta bahwa pangsa upah dan gaji pariwisata mengalami penurunan konstan dari 9,87% pada tahun 2000 menjadi 4,97% pada tahun 2008, berarti susut menjadi kurang dari setengah angka 2000.²¹ Ini dapat dianggap sebagai indikasi bahwa upah dan gaji dalam sektor pariwisata lebih rendah daripada sektor lain, atau bahwa ada lebih banyak pekerja paruh waktu (mereka yang tidak diperkerjakan penuh atau hanya bekerja terbatas beberapa jam saja per minggu). Meskipun demikian, paruh waktu dapat juga dianggap positif, mengingat kenyataan bahwa sebagian pekerja mungkin tidak dapat bekerja penuh karena tanggung jawab rumah tangga atau karena berbagai alasan lain. Hal ini perlu dikonfirmasi dengan kajian khusus tentang sektor informal, yang proporsinya bukan saja menjadi terbesar dari seluruh angkatan kerja, tetapi juga semakin meningkat (naik dari 2001-2009) (Nazara, 2010). Satu analisis statistik lain oleh Nazara menegaskan bahwa jumlah pekerja dalam perdagangan, akomodasi dan makanan dan minuman dalam sektor informal meningkat signifikan dari tahun 2005 hingga 2009 (4,75 juta menjadi 6,85 juta). Peningkatan juga terlihat dalam industri manufaktur, yang dapat dikaitkan dengan pariwisata, sementara sektor-sektor lainnya menurun.

20 Perlu diperhatikan bahwa data di NESPARNAS adalah 1 tahun atau 2 tahun lebih lambat, jadi interpretasi data perlu memperhatikan informasi ini. Lihat Tabel 3.3.

21 Lihat Tabel 3.3.

3.2.2 Neraca Inbound-outbound

Neraca antara belanja *inbound-outbound* selalu positif tetapi memperlihatkan kecenderungan makin menipisnya surplus dari tahun 2004 ke tahun 2007, seperti diperlihatkan dalam tabel berikut.

TABEL 3.6. NERACA BELANJA PERJALANAN WISATA 2004-2009 (DALAM JUTA USD)

Tahun (1)	Masuk (2)	Keluar (3)	Selisih (2)-(3) Flows (4)	Rasio (%) (4) : (2)
2004	4,798	3,507	1,291	26.91
2005	4,522	3,584	938	20.74
2006	4,448	4,030	418	9.40
2007	5,346	4,904	442	8.27
2008	7,377	5,397	1,981	26.85
2009 (Q3)	4,619	3,575	1,044	22.60

Sumber: Bank Indonesia, seperti dikutip dalam Renstra Kemenbudpar 2010-2014

Meskipun surplus tumbuh secara positif, pertumbuhan kelas menengah Indonesia menjadi pasar potensial untuk negara-negara tetangga. Dengan makin meningkatnya kemudahan akses ke dan dari kota-kota besar Indonesia ke Malaysia dan Singapura serta tujuan-tujuan lain, maka perjalanan *outbound* berpotensi tumbuh lebih lanjut. Ada pula indikasi tingkat pengeluaran belanja yang lebih tinggi di kalangan wisatawan *outbound*, khususnya mereka yang melakukan dengan maksud terkait kesehatan ke Singapura atau Malaysia. Hal ini sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia serta oleh *Singapore Tourism Board*.

3.2.3 Pariwisata Nusantara dan Internasional

Pariwisata nusantara belakangan ini menjadi makin diperhitungkan; akan tetapi, Indonesia masih perlu memberikan perhatian lebih besar pada pengembangan kebijakan yang bukan saja mendorong tetapi juga memfasilitasi arus kunjungan wisatawan nusantara ke luar pulau Jawa dan Bali. Statistik lama dari tahun 1984²² memperlihatkan bahwa lebih dari 66% perjalanan ditujukan ke atau berasal dari P.Jawa. Perjalanan dalam pulau²³, diperkirakan mencapai 74,6 juta, merupakan 97% dari total perjalanan domestik (Survei Pariwisata Domestik, 1984). Saat ini, akses ke dan dari luar pulau sudah secara signifikan membaik, terutama karena berkembangnya angkutan udara kelas ekonomi selama dasa warsa terakhir, dan jumlah total perjalanan diperkirakan mencapai 225.0 juta, peningkatan sebesar 300% dalam 24 tahun. Perjalanan dalam pulau juga meningkat pesat; meskipun dari segi proporsi perjalanan, diperkirakan bahwa dominasi P.Jawa tidak akan berubah signifikan karena a) kebanyakan wisatawan nusantara menggunakan transportasi darat dan b) arus keluar dari pulau-pulau luar Jawa tumbuh lebih cepat dari arus masuknya.

Sayangnya, lebih banyak data mengenai pariwisata nusantara hanya tersedia di tingkat nasional; terbatasnya jumlah sampel menjadikan sulit dan riskan untuk memperkirakan data di tingkat provinsi, dan makin sulit lagi untuk data di tingkat kabupaten dan kota. Angka-angka nasional memang penting, tetapi mengingat sedemikian besarnya negara ini dan ketidaksetaraan antar wilayahnya, maka statistik provinsi dan kabupaten/kodya juga sangat penting.

22 Sejak 1984, belum ada data yang dipublikasikan mengenai arus perjalanan antar pulau.

23 Perjalanan dari titik A ke B di pulau Jawa, dari titik A ke B di pulau Sumatra, dst.

Gambar keseluruhan berbagai indikator pariwisata internasional dan nusantara seperti digambarkan dalam Tabel 3.6. dapat digunakan untuk melihat dinamika pariwisata internasional dan nusantara hingga ke kontribusi keseluruhan pariwisata dalam indikator-indikator ekonomi tertentu. Kemerosotan kedatangan wisatawan internasional dan pembelanjannya diimbangi oleh meningkatnya jumlah dan pembelanjaan wisatawan nusantara, sehingga Indonesia dapat mempertahankan angka-angka keseluruhan, khususnya dari segi pekerjaan dan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja informal dari tahun 2001 sampai 2009, seperti dilaporkan dalam publikasi ILO lainnya (Nazara, 2010), ternyata sejalan dengan statistik lain tentang kesempatan kerja pariwisata.

TABEL 3.7. KECENDERUNGAN INDIKATOR-INDIKATOR WISATAWAN INTERNATIONAL DAN NUSANTARA , 2001-2008

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kedatangan internasional (juta)	5,154	5,033	4,467	5,321	5,002	4,871	5,506	6,231
Pertumbuhan (%)	1.77	- 2.33	- 11.25	19.12	-6.00	-2.61	13.02	13.19
Belanja/kunjungan USD)	1,053	893	903	902	904	913	971	1179
Belanja total (juta USD)	5,429	4,496	4,037	4,798	4,522	4,448	5,346	7,343
Pertumbuhan belanja (%)	-5.57	-17.18	-10.21	18.85	-5.75	-1.63	20.19	37.38
Panjang masa tinggal (hari)	10.5	9.8	9.7	9.5	9.0	9.1	9.0	8.6
Jumlah tamu /malam (juta)	54,113	49,277	43,285	50,391	45,269	44,280	49,661	53,462
Jumlah wisatawan domestik (ribu)	103,884	105,379	110,030	111,353	112,701	114,270	115,335	117,213
Pertumbuhan jumlah (%)	nc	1.44	4.41	1.20	1.21	1.39	0.93	1.63
Jumlah perjalanan (ribu)	195,770	200,589	207,119	202,763	198,359	204,553	222,389	222,042
Belanja (triliun rupiah)	58.71	68.82	70.87	71.70	74.72	88.21	102.01	123.17
Pertumbuhan belanja (%)	nc	17.22	2.98	1.17	4.21	18.05	15.64	20.74
Total belanja internasional dan domestik (USD)	5429 m + 58,71 t	4496 + 66,82 t	4037 + 70,87	4798 + 71,70	4522 + 74,72	4448 + 88,21	5346 + 102,01	7343 + 123,17
Arus keluar (juta USD)	na	na	na	3,507	3.584	4,030	4,904	5,397

Sumber: Menbudpar, Renstra 2010-2014 dengan revisi dan indikator tambahan (nc=not calculated, na=not available in the document)

Mengukur kesempatan kerja dalam sektor pariwisata sejauh ini hanya dilakukan melalui survei usaha dalam sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa layanan perjalanan. Sektor pariwisata bukan hanya terdiri dari bisnis akomodasi, makanan dan perjalanan saja, tetapi mencakup banyak lainnya yang sejauh ini belum disurvei secara langsung. Ada *home stay*, pertokoan, *outlet*, bisnis cendera mata, pakaian jadi, tekstil tradisional dan asesoris, jasa kebugaran (*wellness*) dan banyak lainnya yang menarik dan melayani wisatawan setiap hari. Sementara tenaga kerja pariwisata ada di sektor informal merupakan bagian yang signifikan (seperti diperlihatkan oleh survei rumah tangga), statistik kesempatan kerja sektor informal masih belum memadai. Ukuran bisnis informal ini sangat bervariasi dan mencakup hampir setiap jenis jasa yang ditawarkan oleh sektor formal.

3.3 Agenda Baru Pariwisata Indonesia – Kebutuhan akan Statistik Kesempatan Kerja

Program pembangunan nasional, seperti disampaikan dalam pidato Presiden, menggarisbawahi semangat pro-pertumbuhan, pro-kesempatan kerja, pro-masyarakat miskin dan pro-lingkungan. Oleh karena itu penciptaan kesempatan kerja merupakan satu dari kepentingan nasional paling utama, dan pariwisata diharapkan untuk memainkan peran lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sektor ini dikenal padat karya dan *entry point* yang fleksibel untuk kesempatan kerja, tetapi masih ada banyak pertanyaan mengenai kesempatan kerja pariwisata yang harus dijelaskan. Angka taksiran saat ini, digambarkan oleh Nesparnas terbaru (2008), mengindikasikan bahwa pariwisata telah menciptakan kesempatan kerja bagi 6,98 juta orang, setara dengan 6,81 persen dari angka total nasional. Jumlah orang yang sesungguhnya terlibat dalam/terkait pariwisata pastilah jauh lebih tinggi dari angka prakiraan ini, mengingat bahwa sumber datanya, karena berbagai alasan, mungkin tidak akurat atau tidak lengkap. Antara lain termasuk yang paling penting, tidak memasukkan sektor informal. Selain prakiraan jumlah orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan, dampaknya pada upah dan gaji “hanyalah” 4,64% dari angka total nasional, yang berarti bahwa lapangan kerja sektor pariwisata menciptakan upah dan gaji di bawah rata-rata nasional dan sektor lain. Oleh karena itu, pesan pro-lapangan kerja dan pro-masyarakat miskin dapat ditafsirkan sebagai kebutuhan bukan saja untuk mempekerjakan lebih banyak orang, tetapi juga berarti kebutuhan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan yang dapat memberantas kemiskinan, yang terkait dengan agenda pekerjaan yang layak ILO.

Agenda pembangunan kepariwisataan, beserta agenda pembangunan sektor-sektor lain, didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang disahkan sebagai Undang-Undang No.17 (2007) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (dikenal sebagai RPJP 2005-2025). Berdasarkan visi ini, tujuan-tujuan pembangunan nasional jangka menengah diruntut sebagai berikut:

1. 2005 – 2009 Fokus pada pemulihan krisis nasional lanjutan; keamanan dan perdamaian; peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial (berdasarkan indeks pembangunan masyarakat, indeks pembangunan jender dan perlindungan perempuan dan anak);
2. 2010-2014 Pengembangan kapasitas: meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi; memperkuat daya saing ekonomi; kesejahteraan; meningkatkan pendapatan; pengurangan kemiskinan; pengurangan pengangguran; peningkatan jaminan sosial dan kesetaraan jender;
3. 2015-2019 Meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan kapasitas dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
4. 2020 -2024 Menciptakan struktur ekonomi yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlu dicatat bahwa dalam tahap kedua, dari tahun 2010 hingga 2014, meskipun tidak terbatas pada periode ini saja, fokus agendanya adalah penciptaan kesempatan kerja bersama dengan peningkatan jaminan sosial dan kesetaraan jender untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kedua, yang telah disebutkan di atas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sudah mengesahkan Rencana Lima Tahun untuk periode 2010 sampai 2014, yang dikenal sebagai RENSTRA (Rencana Strategis) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program serta kegiatan.

Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada dasarnya berfokus pada tiga program utama, yaitu (1) program pembangunan destinasi wisata, (2) program pengembangan pemasaran, dan (3) program pembangunan sumber daya (manusia).

Program pembangunan **destinasi wisata** diarahkan untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas bisnis, industri dan investasi pariwisata. Fokusnya adalah meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global

dengan meningkatkan belanja wisatawan dan jangka waktu kunjungan. Prioritas-prioritasnya mencakup pengembangan bisnis, industri dan investasi pariwisata; standarisasi dan pengembangan daya tarik di destinasi wisata di berbagai wilayah terpilih serta pemberdayaan masyarakat.

Program pengembangan **pemasaran** diarahkan untuk memastikan bahwa pemasaran menjadi arus utama program pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pendapatan devisa nonmigas dan memperbaiki distribusi mobilitas dan perjalanan wisatawan di dalam negeri. Fokusnya adalah meningkatkan permintaan akan paket perjalanan wisata domestik, menciptakan event-event pariwisata (di dalam dan di luar negeri) serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan jasa layanan informasi. Prioritasnya mencakup promosi domestik dan internasional yang lebih kreatif, informasi pasar dan publikasi yang lebih baik, serta pembangunan kapasitas untuk industri MICE (*meetings, incentives, conference and exhibition*).

Program pembangunan **sumber daya** diarahkan untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan kuantitas sumber daya (manusia) budaya dan wisata serta meningkatkan profesionalisme dan daya adaptasi terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah pembangunan kapasitas melalui pengembangan pelatihan, pendidikan dan riset dalam kementerian.

Pada tahun 2009, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyiapkan suatu Rencana Induk Pariwisata Nasional yang saat ini sedang dalam proses untuk disahkan menjadi Peraturan Pemerintah.

Ada dua butir penting untuk diingat ketika mempertimbangkan isu-isu kesempatan kerja pariwisata:

- (i) Pariwisata bukanlah industri untuk dipikirkan oleh sektor swasta saja, partisipasi pemerintah dan masyarakat sama pentingnya untuk keberhasilan industri ini; dan
- (ii) Bukan hanya wisatawan saja yang perlu diurus, masyarakat tuan rumah pun perlu diperhatikan juga. Masyarakat memiliki hak yang sama untuk juga menjadi wisatawan.

Isu-isu kesempatan kerja pariwisata mencakup juga lapangan kerja dalam sektor publik yang berurusan langsung atau tidak langsung dengan pariwisata, tetapi juga mencakup kesempatan kerja pada tingkat masyarakat dan dalam sektor informal, yang juga melayani wisatawan atau industri kepariwisataan.

Namun sejauh ini, statistik kesempatan kerja pariwisata belum menangani lapangan kerja sektor publik, sektor informal atau bisnis-bisnis lain yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan pada panduan dalam RPJP dan RENSTRA Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat kebutuhan akan data mengenai:

- (i) Kondisi mikro lapangan kerja tingkat perusahaan/usaha yang harus didapatkan dari survei usaha dan kondisi mikro lapangan kerja sektor publik pada tingkat lokal yang harus diperoleh dari survei organisasi pemerintah tingkat lokal dengan sampel dari seluruh Indonesia khususnya di berbagai provinsi tujuan wisata;
- (ii) Mengingat peran pentingnya dalam penciptaan kesempatan kerja, data mengenai sektor informal harus didapatkan dari survei primer. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu menginventarisasi sektor informal untuk kebijakan pengendalian, bukan sekadar untuk keperluan pengumpulan retribusi. Pemerintah daerah, sebagai pemangku kepentingan yang paling tahu dan mampu untuk mendapatkan informasi ini, memegang peran yang amat penting;
- (iii) Pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bergantung pada pariwisata harus diperoleh dari survei rumah tangga yang dilakukan selama Sensus Penduduk, Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) dan/atau Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS); dan
- (iv) Fasilitas pendidikan dan pelatihan serta suprastruktur pendukungnya didapatkan dari Kementerian Pendidikan Nasional, dokumen administratif Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau melalui survei kelembagaan.

Mengingat bahwa Nesparda provinsi menunjukkan kesenjangan yang besar antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, kiranya penting untuk dicatat bahwa statistik serta data lain juga perlu dianalisa pada tingkat provinsi dengan rincian menurut kabupaten/kota.

Sangatlah penting untuk benar-benar mengukur hingga sejauh mana pariwisata telah berkontribusi kepada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan dan lainnya) pada tingkat makro nasional, provinsi maupun tingkat mikro/lokal. Guna memperkuat daya saing ekonomi, menciptakan industri yang berkualitas dan secara konsisten menempatkan penanggulangan kemiskinan serta keberkelanjutan lingkungan hidup di garis depan, kita membutuhkan tenaga kerja dan sumberdaya manusia yang cerdas agar dapat berinovasi dan kreatif melalui pendidikan tinggi. Sumber daya manusia yang inovatif dan cerdas diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan merencanakan pembangunan, melaksanakan pendidikan tinggi dengan baik (pendidikan lebih tinggi tidak saja terbatas untuk industri *hospitality*, tetapi juga untuk sektor-sektor lain (karena sifat kepariwisataan yang multidimensional), termasuk riset dan penerapan lain.

Pendidikan tinggi dan riset perlu didukung oleh sumber daya manusia. Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan (bukan hanya dalam tenaga kerja) perlu didasarkan pada riset yang dapat diterapkan. Pendidikan kepariwisataan juga perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, seraya mempertimbangkan standar-standar/modul-modul internasional. Standar internasional ini tidak harus diikuti dengan kaku, melainkan harus dipergunakan sebagai pedoman dan dicocokkan dengan konteks Indonesia.

Data dari survei-survei yang telah disebutkan di atas diperlukan untuk membantu kita memahami:

- (i) Kondisi kesempatan kerja pariwisata yang ada dan kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan yang spesifik, dalam menghapus pengangguran, kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, dan untuk melihat apakah lapangan kerja pariwisata menyediakan upah layak. Meskipun sudah ada peraturan upah minimum, ini mungkin tidak berlaku untuk pekerja-pekerja paruh waktu dan pekerja lepas/ sementara;
- (ii) Apakah pegawai/pejabat pemerintah sesuai dengan bidang pekerjaannya dalam mendukung dan mengendalikan pertumbuhan dan pengembangan industri kepariwisataan;
- (iii) Kondisi kerja dalam industri kepariwisataan; dan
- (iv) Kesesuaian atau ketidak sesuaian antara penawaran dan permintaan akan sumber daya manusia

3.4 Langkah-langkah ke Depan

Berdasarkan pada konsultasi dan masukan dari organisasi-organisasi terkemuka di seluruh dunia, UNWTO dan Divisi Statistik PBB telah menyiapkan Rekomendasi Internasional untuk Statistik Pariwisata/International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008) yang sudah direvisi dan menjadi acuan bagi Biro Pusat Statistik, BPS. Dalam menuliskan *Studi Kasus* ini, perhatian khusus diberikan pada IRTS 2008, khususnya “Chapter 7: Employment in the Tourism Industries.” Hampir semua definisi dan metoda pengumpulan data yang direkomendasikan dalam IRTS 2008 diadopsi. Isu-isu umum yang dihadapi Indonesia adalah:

- ♦ Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan survei-survei terpilih secara lebih sering disebabkan oleh besarnya negara ini, sehingga jumlah sampel dan distribusi geografis menjadi terbatas dan tidak mencakup seluruh unit administrasi. Mengingat pentingnya statistik ini, perlu diusulkan dan dialokasikan peningkatan anggaran pariwisata untuk mengatasi masalah ini;
- ♦ Ketersediaan anggaran dan permintaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata juga menentukan banyaknya jenis usaha yang disurvei. Akibat perkembangan industri kepariwisataan dalam beberapa dasawarsa terakhir, terjadi peningkatan jumlah usaha di luar yang sudah disurvei tetapi masih perlu

dicantumkan. Industri transportasi, misalnya, meskipun bukan di bawah tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan bagian penting dari industri kepariwisataan. Industri-industri lain yang diklasifikasikan sebagai industri spesifik suatu negara juga perlu didefinisikan dan disepakati oleh para pemangku kepentingan.

- ♦ Isi dan keandalan data. Untuk sektor formal, harus ada catatan mengenai kesempatan kerja dan masalah penggajian yang dapat dilaporkan secara berkala dan digunakan sebagai acuan, tidak terbatas dikumpulkan dari wawancara. Beberapa informasi dapat dikumpulkan dalam survei-survei yang dilakukan berkala dengan tambahan pertanyaan-pertanyaan sederhana.

Mengenai Nesparda provinsi, masih diperlukan data tentang belanja wisatawan internasional. Ketersediaan data seperti ini di beberapa provinsi cukup terbatas karena distribusi respondennya saat dilakukan *Passenger Exit Surveys*, yang dikenal sebagai PES. Kendala dalam pembuatan Nesparda tingkat provinsi, antara lain:

- (i) Kurangnya kemauan politik pemerintah daerah dan (atau karena) kurangnya pemahaman akan makna penting Nesparda sebagai alat untuk memahami unjuk kerja pariwisata yang diperlukan pemerintah provinsi atau pejabat-pejabat berwenang dalam pariwisata untuk merumuskan kebijakan dan membuat keputusan;
- (ii) Anggaran untuk Nesparda provinsi tidak dialokasikan atau diprioritaskan. Bahkan sekalipun anggaran seperti itu ada, seringkali kurang memadai karena adanya kesalahan persepsi/pemahaman terhadap proyek tersebut. Data seringkali tidak lengkap dan pemutakhiran harus dilakukan sebelum menyiapkan Nesparda;
- (iii) Tidak tersedianya petugas yang memiliki pemahaman dan kesempatan yang cukup mengakibatkan pengalihdayaan kegiatan pengumpulan data oleh konsultan;
- (iv) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengamati bahwa dalam beberapa kasus, kerjasama dan koordinasi antara petugas-petugas Dinas Pariwisata dengan Kantor Statistik masih kurang dan telah menimbulkan berbagai hambatan dalam mempersiapkan Nesparda;
- (v) Dalam situasi di atas, pemerintah daerah kemudian menggantungkan kembali penyiapan Nesparda kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang menurut mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan Nesparda. Tidaklah mungkin bagi Kementerian untuk menyiapkan Nesparda bagi semua provinsi/daerah sekaligus dan bila dilakukan secara bertahap akan perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, sehingga yang sebagian akan kadaluarsa sebelum selesai seluruhnya;
- (vi) Mengenai hal-hal teknis, ada berbagai kesulitan dalam mengumpulkan data tentang jumlah wisatawan di provinsi atau wilayah tertentu. Hal ini disebabkan oleh bebasnya pergerakan antar provinsi, keluar masuk wisatawan tidak tercatat. Bandara, stasiun, terminal dan gerbang tol memang membuat catatan, tetapi jumlah yang tercatat lebih kecil daripada pergerakan/kunjungan antar provinsi yang sebenarnya karena banyak yang tidak melalui pintu tol atau terminal; dan
- (vii) Terakhir tapi tak kalah pentingnya, Bali, sebagai provinsi pariwisata paling populer sekalipun, tidak terlalu bersemangat mempersiapkan Nespardanya sendiri dan bergantung pada pemerintah pusat untuk menyiapkannya. DKI Jakarta, yang memiliki anggaran besar, baru menyiapkan satu Nesparda (2009), untuk perbandingan dengan Nesparda sebelumnya yang dibuat pada tahun 2004.

Berkenaan dengan isu-isu tersebut di atas dan perlunya Nesparda di tingkat nasional maupun daerah, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- (i) Suatu program peningkatan kesadaran eksekutif untuk seluruh Indonesia mengenai pentingnya Nesparda dan bagaimana Nesparda dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan dan sistem pendukung keputusan;

- (ii) Dorongan untuk mengembangkan basis data kepariwisataan. Advokasi dalam hal ini menuntut insiatif pusat untuk menyediakan standar baku kebutuhan (dan format) data yang diperlukan serta pelatihan bagi pejabat-pejabat daerah untuk membantu mereka memahami kebutuhan akan data bagi pembangunan dan perencanaan pariwisata beserta metoda-metoda pengumpulan datanya. Ada kebutuhan untuk menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan sumber penting untuk informasi yang khas daerah, yang dapat membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menentukan arah/jalur pembangunan;
- (iii) Advokasi juga perlu ditujukan kepada asosiasi industri kepariwisataan serta asosiasi pekerja agar kelompok-kelompok ini berperan serta dalam upaya menyediakan informasi yang handal agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan peraturan yang tepat.;
- (iv) Kebijakan tentang upaya terpadu antara kantor wilayah BPS dan dinas pariwisata perlu dilembagakan, bila memungkinkan melalui Surat Keputusan Bersama antara BPS dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai akibatnya, harus diusulkan suatu anggaran melalui birokrasi yang sesuai, dan disetujui oleh lembaga legislatif.²⁴ Kursus/pelatihan singkat perlu ditujukan kepada petugas/pejabat di luar BPS, guna memudahkan saling pengertian;
- (v) Perlu dilakukan pemrosesan data base yang ada untuk memaksimalkan peluang memaparkan informasi terkait pariwisata, termasuk tapi tidak terbatas pada statistik lapangan kerja dan angkatan kerja, guna lebih memahami pasar tenaga kerja beserta data-data lain terkait dengan kesempatan kerja dan perkerjaan yang layak;
- (vi) Pemetaan dan evaluasi terhadap program-program pendidikan kepariwisataan yang ada di berbagai tingkatan dan daya serap pasar terhadap para lulusannya, menuju pada Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional;
- (vii) Kajian-kajian khusus di provinsi-provinsi terpilih. Berlandaskan fakta bahwa pariwisata di berbagai provinsi memiliki posisi, peran dan karakteristik (permintaan, penawaran dan kesempatan kerja) yang berbeda-beda, perlu diseleksi sejumlah provinsi yang memainkan peran strategis dalam kepariwisataan untuk disurvei secara mendalam. Hal ini dapat membuka pemahaman yang lebih baik dan menghindari salah tafsir terhadap statistik nasional. Pernyataan ini dapat dijustifikasi dengan melihat keanekaragaman angka-angka dalam Nesparda daerah/provinsi, dibandingkan dengan Nesparnas seperti disajikan dalam Tabel 3.3.;
- (viii) Suatu kajian khusus terhadap sektor-sektor informal yang terkait dengan pariwisata di lokasi-lokasi terpilih.
- (ix) Suatu tinjauan mengenai kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan Passenger Exit Surveys (PES) beserta basis data pariwisata nusantara dan pengolahannya agar dapat memperlihatkan pergerakan antar/dalam provinsi (seperti sudah dibuat pada tahun 1984).

24 Perlu dipahami bahwa bukan hanya anggaran promosi yang perlu ditingkatkan tetapi juga anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pembangunan kepariwisataan..

Bab 4

Pendekatan Pengumpulan Seperangkat Data Kesempatan Kerja dalam Industri Kepariwisata: Acuan untuk Statistik Kepariwisata Indonesia

4.1 Latar Belakang

Tidaklah selalu mudah untuk menetapkan suatu sistem acuan bagi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Dalam kasus-kasus tertentu, Indonesia secara historis mewarisi sistem Belanda, yang kemudian dimodifikasi untuk menghadapi situasi permintaan masa kini. Ada banyak hal yang menyebabkan ketidakrelevanan dalam mengadopsi sistem suatu negara, apakah itu konsep statistik secara umum atau statistik kepariwisataan secara khusus. Mengingat pariwisata adalah suatu fenomena geografis, maka sudut pandang geografis layak dipertimbangkan ketika mencari acuan. Pariwisata domestik berkaitan dengan ukuran wilayah geografis dan penduduk negaranya. Perjalanan antar negara bagian/antar provinsi merupakan hal yang umum dan mewakili suatu proporsi dominan dari seluruh wisatawan dalam negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Perbedaan antara negara maju dengan negara sedang berkembang terletak dalam proporsi antara wisatawan domestik dengan wisatawan internasionalnya. Negara maju memiliki proporsi wisatawan internasional yang lebih tinggi baik sebagai sumber pasar maupun sebagai destinasi. Karena luasnya wilayah geografis Indonesia, ada dua acuan/rujukan yang dijadikan pertimbangan, yaitu Australia dan Kanada, karena keduanya adalah negara maju dengan wilayah geografis yang luas. Keduanya merupakan negara-negara paling maju dalam sistem statistik tersentralisasi. Sistem statistik di dua negara ini diuraikan secara ringkas dalam sub-bab berikut. Untuk lebih lengkap dan rinci, dapat dilihat lampiran yang menguraikan metodologi yang digunakan dua negara tersebut dalam mengumpulkan data kesempatan kerja terkait pariwisata. Gagasan untuk *benchmarking* statistik pariwisata bersumber dari dua contoh praktik nasional terbaik dalam pengukuran kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan; contoh-contoh tersebut didasarkan pada pengalaman Australia dan Kanada.²⁵ Di bagian akhir bab ini, disajikan studi kasus Indonesia.

25 Teks lengkap kasus Australia dan Kanada terlampir di Lampiran I dan II.

4.2 Kasus Australia

Data nasional resmi tampil di dalam Neraca Satelit Pariwisata Australia dan didasari oleh kombinasi berbagai sumber.

Angka kesempatan kerja pariwisata untuk masing-masing industri diambil secara agak simplistik dengan menerapkan ratio nilai tambah industri kepariwisataan dari masing-masing tahun patokan/*benchmark* dengan angka taksiran kesempatan kerja untuk masing-masing industri dalam tahun-tahun berikutnya. Angka-angka taksiran kesempatan kerja antara tahun-tahun patokan kemudian diratakan. Metode menggunakan ratio nilai tambah industri kepariwisataan ini melibatkan suatu asumsi bahwa lapangan kerja yang dihasilkan oleh masing-masing industri memiliki proporsi langsung dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh pariwisata pada tahun patokan.

Rincian angka lapangan kerja menurut industrinya dikumpulkan dalam Survei Tenaga Kerja dalam bulan-bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember. Prakiraan jumlah orang yang dipekerjakan secara total dan menurut industrinya kemudian diperhitungkan sebagai rata-rata dari hasil survei dalam keempat bulan ini. Angka lapangan kerja keseluruhan diambil dengan menambahkan lapangan kerja di angkatan bersenjata pada angkatan kerja sipil. Mempertimbangkan bahwa bulan-bulan survei ini tidak menyertakan masa liburan Natal, atau masa liburan lain, ada kemungkinan bahwa angka taksiran untuk industri kepariwisataan ini mengalami bias lebih kecil dari sebenarnya.

Perkecualian adalah industri-industri akomodasi, biro perjalanan wisata, kafe dan restoran, klub, pub, bar, kasino dan jasa perjudian lain, serta transportasi udara dan laut, untuk mana digunakan data survei pengusaha/pemberi kerja bila tersedia. Angka kesempatan kerja dalam industri-industri ini diekstrapolasi memakai pergerakan dalam Survei Tenaga Kerja untuk tahun-tahun terkini.

Beberapa industri pariwisata dalam Neraca Satelit Pariwisata sudah diringkas dalam tabel-tabel terkait dengan kesempatan kerja karena Survei Tenaga Kerja tidak dirancang untuk menghasilkan angka prakiraan canggih dalam Nespar dengan tingkat ketelitian yang memadai untuk beberapa industri yang terinci seperti dalam Neraca Satelit Pariwisata.

4.3 Kasus Kanada

Data nasional resmi tampil dalam Canadian System of National Accounts (CSNA) dan Canadian Tourism Satellite Accounts (CTSA) dan didasarkan pada kombinasi berbagai sumber. CSNA mencakup data pendapatan pekerja menurut industrinya, termasuk industri kepariwisataan, sementara Canadian Productivity Accounts, yang merupakan bagian dari CNSA, menyertakan data lapangan kerja, upah dan jam kerja menurut industrinya. Dua neraca ini menggunakan kombinasi sumber-sumber data dengan cakupan luas, termasuk Survei Tenaga Kerja, Survei Lapangan Kerja, Gaji dan Jam Kerja (SEPH), data administratif, pengembalian pajak, survei biaya operasi usaha, dll.

Selain itu, Statistics Canada membuat Neraca Satelit Pariwisata yang menyertakan prakiraan jumlah dan kompensasi yang secara langsung dapat ditimbulkan oleh belanja wisatawan dalam industri kepariwisataan maupun bukan. Untuk memperkirakan lapangan kerja dalam industri kepariwisataan, Neraca Satelit Pariwisata mengambil angka prakiraan kesempatan kerja pariwisata dari Canadian Productivity Accounts Database (yaitu, taksiran jumlah tenaga kerja yang dapat langsung dikaitkan dengan belanja pariwisata). Metoda-metoda yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- ♦ Seperti PDB pariwisata, kesempatan kerja pariwisata diperhitungkan pada tingkat industri. Oleh karena itu, angka kesempatan kerja pariwisata diperhitungkan dengan menggunakan rasio industri yang sama dengan yang ada dalam PDB untuk memperhitungkan pangsa pariwisata pada masing-masing industri. Dengan demikian, bila rasio permintaan atas *output* satu industri dengan total *output* kotornya (dengan

harga pokok) adalah 50%, maka setengah dari lapangan kerja industri dialokasikan untuk pariwisata. Cara perhitungan yang sama dilakukan untuk semua industri dan kemudian hasilnya dijumlahkan untuk sampai pada angka total lapangan kerja pariwisata di Kanada;

- ♦ Patokan/*benchmark* angka prakiraan lapangan kerja pariwisata dalam Neraca Satelit Pariwisata menjadi dasar prakiraan angka kesempatan kerja per kuartal yang terkait langsung dengan belanja wisatawan dalam industri kepariwisataan dan non-pariwisata dalam *National Tourism Indicators (NTI) Quarterly Estimates*. Angka taksiran kesempatan kerja NTI ini kemudian dipakai pada pola pertumbuhan tahunan yang diamati dari *Productivity Accounts* dan rangkaian angka jumlah pekerjaan kuartalan dari SEPH per industri; dan
- ♦ Akhirnya, informasi yang lebih rinci lagi tersedia dalam the Tourism Human Resource Module (HRM) dari TSA. HRM didasarkan pada dan berakar dalam kerangka kerja akunting TSA Kanada, mengikuti panduan internasional yang diuraikan dalam *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF)*. HRM berisi informasi jumlah karyawan dan pekerja mandiri, setara purna waktu, jumlah jam kerja yang dijalani dan pendapatan, upah dan gaji kotor, serta pendapatan tambahan, menurut industrinya. Untuk karyawan, informasi ini tersedia menurut jabatan, jender, kelompok usia dan status imigran. Karena banyak jenis lapangan kerja dan rincian demografinya, dimensi industri HRM diperpendek dari data dalam TSA. HRM mencakup rincian tentang 6 industri: transportasi udara, industri transportasi lain, akomodasi, jasa makanan dan minuman, rekreasi dan hiburan, dan jasa perjalanan.

Modul Sumber Daya Manusia / Human Resources Module of CTSA 2009

HRM Pariwisata dari TSA Kanada terdiri dari lima tabel utama berikut ini:

- ♦ Tabel 1. *Gross domestic product*, PDB pariwisata, pembelajaan pariwisata dan pekerjaan dalam industri pariwisata serta perekonomian keseluruhan
- ♦ Tabel 2. Kompensasi tahunan dan kompensasi per jam dalam industri kepariwisataan dan perekonomian keseluruhan
- ♦ Tabel 3. Lapangan kerja dalam industri kepariwisataan dan perekonomian keseluruhan
- ♦ Tabel 4. Jam kerja mingguan dalam industri kepariwisataan dan perekonomian keseluruhan
- ♦ Tabel 5. Pekerjaan karyawan, jam kerja dan upah menurut karakteristik karyawan dalam industri kepariwisataan

4.4 Pelajaran-pelajaran yang dipetik dari Australia dan Kanada

Secara umum, Australia dan Kanada memakai metodologi yang sama, merujuk pada System of National Accounts (SNA) 1993, yang telah dimutakhirkan. Revisi terbaru, yaitu SNA 2008, tidak berbeda banyak dari yang sebelumnya, khususnya berkenaan dengan Satellite Accounts. Ketersediaan/kualitas data selama ini selalu menjadi kendala yang dihadapi oleh Indonesia.

Kerangka kerja Social Accounting Matrix (SAM) secara eksplisit memasukkan beragam transformasi penting antar variabel. Transformasi diamati melalui pemetaan keberadaan faktor-faktor terutama faktor distribusi pendapatan tenaga kerja dari struktur produksi maupun pemetaan pendapatan rumah tangga dari tenaga kerja dan faktor-faktor lain yang dipasok oleh berbagai kelompok rumah tangga.

Statistics Canada menetapkan suatu sistem neraca nasional yang komprehensif dilengkapi dengan *sub-account* dan modul, seperti misalnya Productivity Account (PA). Data PA terdiri dari angka lapangan kerja, upah dan jam kerja menurut rincian industrinya, termasuk industri kepariwisataan. Statistics Canada juga menyusun TSA yang mencantumkan angka prakiraan jumlah dan kompensasi kerja yang langsung terkait dengan pembelanjaan wisatawan. National Tourism Indicators (NTI) juga diterbitkan untuk mempertautkan data lapangan kerja dan data pembelanjaan wisatawan dalam TSA.

Statistics Canada mengerahkan upaya yang signifikan untuk menyusun Human Resource Module (HRM). HRM mencantumkan rincian industri-industri utama yang terkait dengan TSA, yaitu transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, rekreasi dan hiburan, dan jasa perjalanan. HRM melengkapi dan meningkatkan kapasitas analitis yang diberikan oleh TSA dan NTI sehingga memberikan wawasan lebih luas mengenai peran pariwisata dalam perekonomian.

Semua sistem, modul dan indikator tersebut di atas disusun oleh Statistics Canada, diturunkan dari data yang tersedia dari beragam survei seperti LFS, SEPH, Survei of Business Operating Costs (SBOC), catatan data administratif, dll.

Format tabel utama dalam HRM adalah data rangkaian waktu tahunan mengenai jumlah dan kompensasi rata-rata per jam. Data itu dipilah-pilah lebih terperinci ke dalam statistik industri terkait dengan pariwisata. Tabel-tabel lain dalam profil industri pariwisata disediakan untuk mencermati pangsa jumlah karyawan, isu gender, klasifikasi menurut kelompok usia dan status imigrasi.

4.5 Kasus Indonesia

4.5.1 Latar belakang

Pendekatan dalam pengumpulan data di Indonesia terkait erat dengan pengumpulan dan adopsi strategi pembangunan nasional. Strategi ini kebanyakan ditentukan oleh seperangkat kebijakan yang kurang lebih saling terkait dan konsisten serta oleh seleksinya tergantung kepada subsistem berikut ini:

- ♦ Tujuan pembangunan yang berlaku diambil dari dokumen-dokumen resmi atau legal yang dikeluarkan oleh badan legislatif sebagai panduan lembaga eksekutif dalam pemerintahan;
- ♦ Himpunan teori, hipotesa dan model yang ada diambil dari berbagai pustaka akademik; dan
- ♦ Sistem data yang tersedia digunakan untuk mendiagnosis situasi masa kini dan untuk mengukur unjuk kerja.

Keberadaan sistem data tidak terpisah dari kerangka kerja konseptual. Suatu kerangka kerja terpadu diperlukan untuk merencanakan kebijakan di mana sasaran multidimensi dipertimbangkan dan untuk memperkirakan hasil dari beragam kombinasi kebijakan. Dalam artian luas, suatu prinsip pembangunan konseptual harus dibangun agar bisa digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai panduan ketika merumuskan berbagai kebijakan sosial ekonomi.

Salah satu kerangka kerja komprehensif untuk analisis sosial ekonomi adalah System of National Accounts (SNA). Tergantung pada berbagai persyaratan analitis dan ketersediaan data, penekanan dalam beragam aspek dalam kerangka kerja pokok dapat bervariasi dengan menggunakan pengklasifikasian sektor yang melembaga, industri, produk, transaksi, dll pada berbagai tingkat kerincian dengan menggunakan berbagai metoda, berbagai frekuensi dan berbagai prioritas, dengan mengatur kembali hasilnya, atau dengan mengintroduksi unsur-unsur tambahan.

Dalam jenis-jenis analisis tertentu, maksud utamanya adalah untuk berfokus pada bidang atau aspek ekonomi atau kehidupan sosial tertentu, seperti misalnya Neraca Satelit Pariwisata. Beragam aspek kegiatan produksi

dan konsumsi terkait dengan pariwisata dapat muncul dalam klasifikasi kegiatan, produk dan tujuan yang terperinci.

Bagaimanapun, analisis selalu memerlukan suatu kerangka kerja. Membangun kerangka kerja konseptual yang menyatukan pertumbuhan, distribusi dan kesempatan kerja secara komprehensif dengan acuan khusus pada industri kepariwisataan merupakan tema utama kajian ini. Kerangka kerja semacam itu harus berlandaskan pada dua pilar:

1. Suatu kerangka kerja analitis modular yang menjabarkan kesalingterkaitan dan kesalingterhubungan antar berbagai sub-sistem; dan
2. Suatu sistem data dan system klasifikasi yang saling melengkapi dan terperinci.

4.5.2 Mempersiapkan Neraca Satelit Pariwisata untuk Indonesia

Selama krisis ekonomi nasional tahun 1998, pariwisata merupakan salah sektor yang paling terkena dampaknya, seperti diindikasikan oleh pertumbuhan negatif dan positif. Jumlah wisatawan internasional yang mengunjungi Indonesia menurun, meskipun wisatawan ke luar negeri mengalami kenaikan besar. Pariwisata domestik/nusantara juga naik secara signifikan. Situasi ini mendorong pemerintah untuk memahami kontribusi pariwisata pada perekonomian nasional. Dengan informasi terbatas dari sisi sediaan, Indonesia mulai membahas kemungkinan untuk menerapkan pendekatan sisi permintaan, yang dikembangkan dan diterapkan di Kanada dan tempat lain. Mengenai kemungkinan ini, diadakan diskusi-diskusi intensif antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi²⁶, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengacu pada TSA Kanada, diputuskanlah bahwa Indonesia akan menyiapkan TSA sendiri, yang dikenal sebagai Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS).

Kesulitan utama dalam menyiapkan Neraca Satelit Pariwisata, seperti yang juga dialami oleh negara-negara lain, adalah ketersediaan data sisi permintaan yang lengkap dan akurat. Pada tahun 2008, Indonesia, sebagai negara anggota, diundang menghadiri lokakarya regional tentang Statistik Pariwisata yang diadakan oleh UNWTO dan the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) di Bangkok dan dihadiri oleh pejabat-pejabat dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi BPS dan BI. Sejauh ini Indonesia sudah secara teratur mengumpulkan data mengenai kedatangan wisatawan internasional melalui kartu imigrasi serta data pembelanjaan mereka melalui Passenger Exit Survey. Data pariwisata domestik juga tersedia tetapi agak kadaluwarsa; survei-survei mengenai pariwisata domestik tidak dilakukan secara teratur (tahunan). Indonesia juga memiliki Tabel I-O. Semua ini merupakan statistik vital yang dibutuhkan untuk persiapan suatu Neraca Satelit Pariwisata

Pada tahun 2000, ketika diputuskan untuk menyusun Neparناس, sejumlah data masih belum tersedia. Angka perjalanan wisata domestik dan pembelanjaannya diperkirakan dari suatu modul khusus dalam SUSENAS. Data investasi diperkirakan melalui satu komponen PDB, yaitu Modal Tetap Kotor/*Gross Fixed Capital*. Nilai pembelanjaan pemerintah untuk pariwisata dikumpulkan dari catatan-catatan administratif anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk tujuan pariwisata.

Tujuan pokok dalam mempersiapkan TSA adalah untuk mengumpulkan angka-angka mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh permintaan akan barang dan jasa dari kegiatan pariwisata. Dengan metoda ini, dampak pariwisata langsung dan tidak langsung terhadap *output*, nilai tambah, pajak tidak langsung, upah dan gaji, dan kesempatan kerja dapat diperkirakan. Hasil dari Nesparnas Indonesia dilaporkan kepada UNWTO dan dipresentasikan dalam seminar UNWTO tahun 2003, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pemerintah Filipina di Manila. Thailand dan Australia juga mempresentasikan TSA masing-masing dalam seminar tersebut.

26 Setelah mengalami beberapa kali reorganisasi sekarang menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan BPS sudah melakukan sosialisasi hasil Nesparnas Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan, setelah menekankan pentingnya Neraca Satelit Pariwisata di tingkat provinsi, mendorong mereka untuk menyiapkan Nesparda provinsi masing-masing untuk mengetahui besaran kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah/provinsi.

Berdasarkan pada hasil seminar-seminar berkala, BPS telah mengambil inisiatif untuk memperbaiki basis data dan mengembangkan metodologinya lebih lanjut. NESPARNAS (TSA Indonesia) terbaru disiapkan pada tahun 2010, memanfaatkan data dari tahun 2008. Upaya-upaya untuk memperpendek kesenjangan waktu antara pengumpulan data dengan waktu persiapan NESPARNAS terus-menerus dilakukan.

Advokasi BPS telah mendorong beberapa provinsi untuk mempersiapkan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda). Beberapa provinsi yang sudah menyiapkan NESPARDAs adalah DKI (2004 dan 2010), Bali (2007), Sumatra Selatan (2006), Riau (2007), Banten (2008) dan Sulawesi Tengah (2008). Pada tahun 2011, Jawa Barat dan Jawa Tengah akan menyiapkan NESPARDAs masing-masing.

4.3.3 Langkah-langkah Tindak Lanjut

BPS secara teratur mengembangkan metodologi dan memperbaiki persyaratan data. Saat ini, BPS menyatakan bahwa mereka sudah cukup maju, dan memiliki kapasitas untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara anggota UNWTO lainnya. Pada tahun 2010, Indonesia masih menerima bantuan teknis dari Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk merangsang pemerintah provinsi untuk menyiapkan Nesparda masing-masing. Dari segi metodologi, tidak ada sesuatu yang baru yang dikembangkan. Masalahnya tetaplah pada terbatasnya data yang tersedia.

Bagian ini mencoba mengidentifikasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk membentuk sistem yang lebih stabil dalam pengumpulan data tentang lapangan kerja dalam industri pariwisata untuk Neraca Satelit Pariwisata berikutnya. Sementara penyebaran/diseminasi merupakan suatu keharusan, perbaikan basis data merupakan faktor kunci lainnya dalam mempersiapkan Nesparda tepat pada waktunya. Untuk mengumpulkan data berkualitas, dibutuhkan sampel yang lebih besar dan peran serta penduduk dan perusahaan untuk menyediakan informasi andal dalam survei. Pada saat yang sama, metodologi harus terus menerus diperbaiki. Provinsi-provinsi juga perlu memutakhirkan Nesparda mereka, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta pada tahun 2010; Neraca Satelit Pariwisata bukanlah langkah satu kali selesai, fluktuasi antar waktu dapat mengarahkan respon kebijakan tertentu. Guna mempertahankan indikator-indikator yang baik dan memelihara relevansinya, Neraca Satelit Pariwisata perlu sering dimutakhirkan.

Saling berbagi informasi antar berbagai provinsi dalam seminar-seminar nasional merupakan hal yang esensial untuk saling memahami kondisi sosial ekonomi masing-masing dan untuk memposisikan masing-masing provinsi secara lebih baik dalam konteks kepariwisataan nasional.

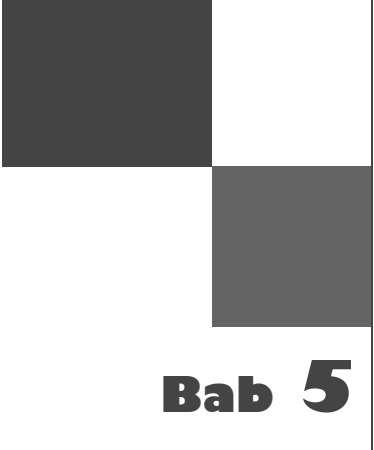
Usaha-usaha terpadu oleh BPS, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membangun kapasitas untuk kompilasi Neraca Satelit Pariwisata, Modul, Indikator dan Neraca terkait perlu dikembangkan sehingga memunculkan pengertian bersama terhadap Neraca Satelit Pariwisata dan hasil yang lebih baik.

Melalui suatu tim yang khusus ditugaskan untuk itu, diperlukan rencana aksi yang mendorong diskusi dan evaluasi komprehensif atas Nesparnas dan penilaian terhadap statistik-statistik terkait dengan pariwisata seperti GDP, I-O, SAM dan FOF. Kita memerlukan fasilitasi dan dukungan untuk melaksanakan *Focus Group Discussions* (FGD) atau lokakarya yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan pariwisata, khususnya untuk menyusun kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan HRM, NTI, PA dan metodologi yang berkaitan. Keterlibatan para akademisi kepariwisataan dan pakar statistik akan positif bagi semua pihak.

Mengkaji data terkait pariwisata dan terkait lapangan kerja dari berbagai sensus survei, catatan administratif serta sumber-sumber potensial lainnya perlu ditinjau lebih lanjut sebelum merancang survei lain; dan

dengan demikian memanfaatkan anggaran terbatas dengan sebaik-baiknya. Para pemangku kepentingan harus bersama-sama bekerja keras untuk meningkatkan anggaran pengembangan basis data pariwisata demi sistem pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik. Sesungguhnya, dengan anggaran yang lebih besar, basis data pariwisata dengan tekanan pada statistik tentang kesempatan kerja di tingkat nasional dan daerah dapat dirangsang dan dikembangkan.

Langkah-langkah tindak lanjut tersebut di atas dapat berkontribusi pada pengumpulan data yang lebih baik untuk sektor yang terus berkembang dan memainkan peran signifikan dalam perekonomian nasional maupun daerah, yang terwujud dalam aparatus kebijakan dan pembuatan keputusan yang lebih baik. Memorandum of Understanding (MOU) baru antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan BPS, dan kemungkinan melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu dipertimbangkan.



Bab 5

Pariwisata dan Pekerjaan yang Layak di Indonesia

5.1 Agenda Perkerjaan Yang Layak ILO

Pekerjaan yang layak (decent work) merupakan pencerminan sasaran strategis ILO, yang sudah dipromosikan sejak 1999. Dengan mengakui berbagai sasaran perkerjaan yang layak, negara-negara maju dan sedang berkembang sudah mengembangkan atau sedang dalam proses mengembangkan strategi-strategi perkerjaan yang layak masing-masing. Sasaran perkerjaan yang layak sudah diterima resmi oleh masyarakat internasional ketika para kepala negara berketetapan untuk menjadikan sasaran kesempatan kerja produktif bagi semua orang dan layak untuk semua sebagai bagian dari usaha untuk mencapai Millennium Development Goals di KTT Dunia tahun 2005. Deklarasi Para Menteri dalam UN Economic and Social Council (ECOSOC) pada tahun 2006 juga menggarisbawahi pentingnya hal ini dan menghimbau seluruh sistem multilateral untuk mengarusutamakan tujuan kesempatan kerja dan perkerjaan yang layak bagi semua dalam kebijakan, program dan kegiatan mereka. Europe Aid secara aktif mendukung kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap perkerjaan yang layak. Deklarasi ILO tahun 2008 : “Declaration on Social Justice and a Fair Globalization” mendorong para negara anggota untuk mempertimbangkan penyiapan indikator-indikator atau statistik yang sesuai, guna memantau dan mengevaluasi kemajuan.²⁷

5.2 Indikator-Indikator Perkerjaan Yang Layak ILO

Sebuah proyek tentang Pemantauan dan Pernilaian Kemajuan menuju Perkerjaan yang layak/ *Monitoring and Assessing Progress on Decent Work* (MAP) telah dikembangkan dengan bantuan ILO. Proyek ini melibatkan sepuluh negara, termasuk Indonesia. Tujuan jangka pendek proyek ini adalah mengembangkan metodologi global untuk menguatkan kapasitas negara-negara sedang berkembang dan dalam trasisi untuk melakukan pemantauan dan penilaian sendiri terhadap kemajuan masing-masing, menuju perkerjaan yang layak dengan menggunakan serangkaian Indikator Perkerjaan yang Layak. Indikator-indikator dan statistik-statistik ini merupakan alat yang berguna untuk memahami unjuk kerja suatu negara.

27 Dirangkumkan dari Diah Widarti, *Monitoring and Assessing Progress on Decent Work in Indonesia: National Background Study* (Jakarta and Geneva: International Labour Office, 2010).

Berkaitan dengan program ini, ILO Jakarta mengambil inisiatif untuk mengembangkan indikator-indikator pekerjaan yang layak untuk Indonesia, sebelum disebarluaskan lintas ILO. Inisiatif tersebut dimulai pada tahun 2002-3 dan disusul dengan fase dua pada tahun 2004-5. Sesudah konsultasi dengan konstituen ILO, *Decent Work Country Programme* (DWCP) pertama untuk Indonesia dirumuskan untuk periode 2006 sampai 2010. Secara ringkas, DWCP Indonesia dibentuk dan diselaraskan dengan kerangka kerja utama ILO, sistem PBB dan Pemerintah Indonesia.

DWI (Indikator-Indikator Pekerjaan yang layak) dikategorikan dalam 4 kelompok indikator, yaitu

- (i) **Lapangan kerja:** perubahan struktural, kecenderungan jangka pendek, pengangguran/setengah pengangguran, sektor informal, upah dan imbalan, jam kerja;
- (ii) **Perlindungan sosial:** cakupan jaminan sosial, persentase bantuan sosial terhadap PDB;
- (iii) **Dialog sosial:** keanggotaan dalam serikat pekerja, jumlah perusahaan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha, cakupan peraturan perusahaan dan perjanjian tenaga kerja kolektif, pemogokan dan *lockout*; dan
- (iv) **Hak-hak dalam kerja:** anak-anak tidak bersekolah usia 7 sampai 15, persentase perempuan yang bekerja dalam *International Standard Classification of Occupations* (ISCO-2 1969), jumlah kasus yang dibawa ke komite penyelesaian perselisihan perburuhan.

DWCP Indonesia untuk 2006-10, yang sudah dinilai oleh *Regional DWCP Support Group* untuk jaminan kualitas dan disahkan oleh konstituen tripartit Indonesia, berfokus pada tiga prioritas utama sebagai berikut:

1. **Menghentikan eksploitasi dalam kerja** – Prioritas pertama ini berfokus pada penerapan kebijakan dan perundangan untuk mengurangi bentuk-bentuk terburuk eksploitasi perburuhan secara lebih efektif. RPJM dan RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengidentifikasi kerentanan pekerja anak dan pekerja migran perempuan sebagai suatu isu serius, yang diakui dalam hasil *United Nations Development Assistance Framework* (UNDAF) di mana ILO menjadi lembaga pemimpinnya. Bidang-bidang utama operasi yang diprioritaskan juga sudah dirumuskan, termasuk menanggulangi bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak melalui implementasi rencana aksi nasional yang dipersiapkan oleh Komite Aksi Nasional Penghapusan Pekerja Anak;
2. **Menciptakan kesempatan kerja untuk pengurangan kemiskinan dan pemulihan mata pencaharian, khususnya bagi kaum muda** – Tergantung pada nilai ambang yang digunakan, jumlah orang miskin di Indonesia sangatlah besar. Seperti dicatat dalam laporan ILO, berdasarkan definisi Indonesia tentang kemiskinan, jumlahnya diperkirakan mencapai 40 juta orang; bila memakai angka US\$2 per hari untuk menentukan ambang kemiskinan, jumlahnya mencapai 110 juta lebih (Widiarti, 2010). Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan sehat adalah satu-satunya cara berkelanjutan untuk membantu masyarakat ke luar dari kemiskinan. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut mencakup upaya membuat kepedulian pada kesempatan kerja sebagai bagian esensial dari perencanaan sosial ekonomi Indonesia, pelaksanaan program padat karya dan pemberdayaan masyarakat untuk wilayah-wilayah yang terimbas bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Indonesia Timur, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi kaum muda melalui sistem dan kebijakan pelatihan/pendidikan;
3. **Dialog sosial untuk pertumbuhan ekonomi dan prinsip tentang hak dalam kerja.** Pertumbuhan ekonomi saja tidaklah memadai, bersama dengan pertumbuhan ekonomi harus ada pula kesetaraan, kemajuan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Deklarasi ILO mendorong negara-negara anggota untuk memastikan adanya pembangunan sosial yang selaras dengan kemajuan dan pembangunan ekonomi melalui kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak untuk berunding secara kolektif, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan perburuhan anak yang efektif, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Ada dua strategi yang diajukan: penerapan standar-standar

dan praktik-praktik ketenagakerjaan, termasuk menguatkan administrasi ketenagakerjaan serta menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pasar tenaga kerja dan di Indonesia, dan meningkatkan mekanisme tripartit untuk dialog tentang isu-isu kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan sosial.

Tabel berikut ini menunjukkan sumber-sumber dan asal masing-masing DWI²⁸ seperti diidentifikasi dalam kajian terhadap Informasi Pasar Tenaga Kerja Indikator-indikator Perkerjaan yang layak di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2005.

TABLE 5.1. DECENT WORK INDICATORS AND THEIR SOURCES OF INFORMATION

Nomor dan paragraf acuan dari sumber	Nama indikator	Sumber Informasi dan lembaga yang bertanggung jawab atas Pengumpulan dan penyebaran 1990,1999,2003,2004
DWI-1 3.3.4.1	Tingkat non-partisipasi sekolah anak-anak 7-15 tahun	SUSENAS– BPS 1990 tidak tersedia
DWI-2 3.3.4.2	Pangsa perempuan dalam lapangan kerja pada ISCO-2	Sensus Penduduk– BPS
DWI-3 3.3.4.3	Kasus-kasus yang dibawa ke Pengadilan tenaga kerja	Catatan administratif–Menakertrans
DWI-4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Sensus Penduduk 1990-BPS SAKERNAS -
DWI-5	Ratio Lapangan Kerja -Penduduk	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-6 3.3.1.4	Lapangan Kerja Informal	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-7	Jumlah dan upah pekerja lepas/ pekerja harian	SAKERNAS
DWI-8 3.3.1.3	Tingkat pengangguran kaum muda	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-9 3.3.1.3	Tingkat non kegiatan kaum muda	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-10 3.3.1.3	Tingkat pengangguran	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-11 3.3.1.1	Lapangan kerja menurut status dan cabang kegiatan	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-12 3.3.4.2	Porsi lapangan kerja berupa bagi wanita dalam pertanian, industri dan jasa	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-13 3.3.1.2	Produktivitas kerja	Sensus Penduduk dan Neraca Nasional,1990 SAKERNAS, Neraca Nasional
DWI-14 3.3.1.5	Pendapatan per Kapita	Neraca Nasional
DWI-15 3.3.2.1	Jaminan Sosial	Catatan asuransi– Menakertrans
DWI-16 (ii) 3.3.2.2	% Bantuan Sosial terhadap to PDB	1990,1999,2003,2004 n/a Catatan pemerintah 1993,2000,2005 MF
DWI-17	Kecelakaan kerja	Catatan Administratif, Menakertrans
DWI-18 3.3.1.6.	Jam kerja berlebihan (>45 jam)	Sensus Penduduk 1990, SAKERNAS
DWI-19 3.3.1.5	Tingkat upah rendah	1990 na SAKERNAS

28 Diah Widiati, *A Review on Labour Market Information/Decent Work Indicators in Indonesia* (Jakarta: International Labour Organization, 2005).

Nomor dan paragraf acuan dari sumber	Nama indikator	Sumber Informasi dan lembaga yang bertanggung jawab atas Pengumpulan dan penyebaran 1990,1999,2003,2004
DWI-20 3.3.3.1	Keanggotaan serikat pekerja	Laporan administratif, Menakertrans
DWI-21 3.3.3.2	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam organisasi pengusaha	Catatan administratif, Menakertrans
DWI-22 3.3.3.3	Tingkat cakupan Perundingan Bersama	Catatan administratif, Menakertrans
DWI-23 3.3.3.4	Pemogokan dan Lockout	Catatan administratif, Menakertrans
DWI-24	Pertumbuhan Ekonomi	Neraca Nasional

Sumber: Diah Widiati, A Review on Labour Market Information/Decent Work Indicators in Indonesia, 2005

5.3 Pariwisata dan Perkerjaan yang Layak di Indonesia, Situasi Kini

Bagian ini berfokus pada perkerjaan yang layak di sektor pariwisata Indonesia. Satu di antara kesulitan-kesulitannya adalah definisi apa yang membentuk sektor pariwisata. Pariwisata, pada hakekatnya, merupakan fenomena yang sangat kompleks, dan dengan demikian, sulit didefinisikan. Satu perspektif melihat pariwisata sebagai industri yang terdiri dari beragam kegiatan penyediaan barang dan jasa spesifik untuk wisatawan. Pariwisata bukan satu industri tunggal, melainkan perpaduan berbagai sektor industri – kekuatan permintaan dan pasar pemasok, suatu pengalaman pribadi dan fenomena internasional yang rumit. Pariwisata mencakup urusan sosial, budaya dan lingkungan melampaui pembangunan fisik suatu destinasi wisata dan pemasaran. mencakup penawaran dan permintaan, lebih dari gabungan pemasaran dan pembangunan ekonomi (Edgell et al., 2008).²⁹

Definisi UNWTO yang telah diterima resmi:

Pariwisata terdiri dari berbagai kegiatan orang-orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan kesehariannya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk tujuan berliburan, bisnis dan tujuan lain yang tidak terkait dengan kegiatan berimbalance di tempat yang dikunjungi

Bagi Indonesia, pariwisata memainkan peran strategis selama tahun-tahun emas pada awal 1980-an sampai pertengahan menjelang akhir 1990-an. Indonesia mengalami kemerosotan hebat dalam pariwisata internasional selama dan sesudah krisis ekonomi. Meskipun demikian, krisis tersebut membawa sejumlah perubahan positif pada tumbuhnya pasar wisatawan domestik. Penerimaan pariwisata dari pembelanjaan di Indonesia sebagai pendapatan devisa kotor dan penerimaan dari pembelanjaan pariwisata domestik/nusantara. Data ini mengindikasikan bahwa sementara berusaha meningkatkan penerimaan negara dari pariwisata, wisatawan *outbound* Indonesia membelanjakan uang dalam jumlah semakin besar di luar negeri, mengurangi penerimaan bersih Indonesia.

Untuk tinjauan ringkas mengenai indikator-indikator ekonomi makro dan lapangan kerja di Indonesia, lihat Tabel 3.1., 3.2. and 3.3.; untuk mendapatkan gambaran mengenai angka-angka provinsi, lihat Tabel 3.4.

Skala industri dan dampaknya, seperti ditunjukkan oleh Neraca Satelit Pariwisata terbaru, adalah sebagai berikut:

- (i) Jumlah perjalanan domestik (2008): 225,0 juta dengan pembelanjaan total: Rp.119,17 triliun;
- (ii) Jumlah kedatangan internasional (2008): 6.234 juta dengan pembelanjaan total setara Rp. 80,46 triliun atau USD 7,377 juta;

29 David L. Edgell, Maria DelMastro Allen, Ginger Smith, Jason Swanson, *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow* (United Kingdom: Butterworth-Heinemann, 2007).

- (iii) Pembelanjaan *outbound* Indonesia: USD 5.397 juta;
- (iv) Dampak terhadap pendapatan pajak: Rp. 8,28 triliun, atau 4,25% dari angka total nasional; dan
- (v) Dampak pada penciptaan kesempatan kerja: 6,98 juta, atau 6,81% dari angka total nasional (lihat Tabel 3.1-3.7).

Statistik yang ada tidak mencantumkan seluruh unsur dalam industri pariwisata, tetapi hanya mencakup unsur-unsur paling lazim dan signifikan seperti akomodasi, jasa perjalanan, dan jasa makanan dan minuman. Pada kebanyakan kasus, pariwisata masih digabungkan dengan sektor-sektor lain; sebagai akibatnya, hal itu tidak menggambarkan realita situasinya. Di lain pihak, data tentang pariwisata tidaklah lengkap, sehingga mengakibatkan panafsiran terlalu rendah, dan di lain pihak, angka-angka yang digunakan juga mencakup sektor perdagangan, yang makin mengacaukan temuan-temuan.

Tabel 5.2. sampai 5.4. berikut ini memperlihatkan:

- i. Persentase yang tinggi (59,37%) dari mereka yang bekerja di sektor perdagangan dan pariwisata, menurut survei yang dilakukan bulan Pebruari 2010, dibayar kurang dari Rp. 1 juta per bulan, yang kurang lebih setara dengan USD 100. Di daerah pedesaan, kasusnya bahkan lebih parah lagi, dengan 76,23% penduduk pedesaan dibandingkan dengan penduduk kota sebanyak 52,86% menerima upah kurang dari Rp. 1 juta per bulan (lihat Tabel 5.2. dan 5.3.);
- ii. Jumlah lapangan kerja dalam Perdagangan dan Pariwisata adalah 11,72% dari total lapangan kerja (Tabel 5.2.);
- iii. Terdapat persentase yang lebih tinggi (65,16%) untuk perempuan dibandingkan laki-laki (52,86%) yang terlibat dalam pekerjaan berupah rendah (Tabel 5.4).

TABEL 5.2. UPAH DAN GAJI EKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

Kategori Pendapatan (Rp)	Total Pekerja untuk Semua Sektor (orang)	% dari Total Lapangan Kerja	Total Pekerja dalam Perdagangan dan Pariwisata	% dari Total Kesempatan Kerja dalam Perdagangan dan Pariwisata
< 600,000	14,513,237	34.28	1,377,615	27.75
< 1,000,000	24,993,079	59.03	2,946,510	59.37
Semua kategori	42,333,478	100.00	4,962,137 = 11.72% dari total	100.00

Sumber: CBS, Laborer Situation in Indonesia, February 2010 – calculated from Tabel 03.1 and 09.1

TABLE 5.3. INCOME CATEGORY DISTRIBUTION OF LABOURERS WORKING IN TRADE AND TOURISM BY LOCATION OF WORK

Kategori Pendapatan (Rp)	Perkotaan	%	Pedesaan	%
< 600,000	776,916	21.59	393,293	44.33
< 1,000,000	1,901,677	52.86	676,392	76.23
Semua kategori	3,598,891	100.00	887,174	100.00

Sumber: CBS, Laborer Situation in Indonesia, February 2010 –calculated from Tabel 21.2 and 21.3

TABEL 5.4. PEKERJA YANG BEKERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA MENURUT KATEGORI PENDAPATAN DAN JENDER

Kategori Pendapatan (Rp)	Laki-laki	%	Perempuan	%
< 600,000	586,336	21.30	583,871	33.62
<1,000,000	1,447,535	52.59	1,130,524	65.16
Semua kategori	2,751,936	100.00	1,734,129	100.00

Sumber: CBS, Laborer Situation in Indonesia, February 2010 – calculated from Table 21.4 1nd 21.5

Pekerja yang bekerja antara 25-54 jam per minggu, proporsinya signifikan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Meskipun demikian, persentasi dari mereka yang bekerja lebih dari 54 jam per minggu dalam sektor pariwisata dan perdagangan masih lebih besar (sekitar 20%, dengan penduduk perkotaan bekerja lebih panjang daripada mereka yang ada di pedesaan). Akan tetapi terdapat perbedaan besar dalam upah dan gaji yang diterima oleh pekerja di perkotaan dan pedesaan, yang mencapai lebih dari 40% hingga hampir 50%. Selain itu juga terdapat perbedaan upah dan gaji antara pekerja laki-laki dengan perempuan, yang mencapai kisaran antara 16,16% sampai 32,47% (lihat Tabel 5.5. dan 5.6.)

Kondisi ini bahkan lebih buruk lagi bagi pekerja tidak tetap, yang upah dan gajinya 18% lebih rendah dari pekerja tetap (Tabel 5.7.)

TABEL 5.5. UPAH DAN GAJI PEKERJA TETAP DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA MENURUT LOKASI/KAWASAN

Periode Survei (1)	Perkotaan dan Pedesaan (2)	Perkotaan (3)	Pedesaan (4)	Perbedaan Desa-Kota (3)-(4)/(4)
Februari 2008	948,800	1,007,161	712,414	294,747 – 41.36 %
Agustus 2008	976,640	1,034,037	719,543	314,494 – 43.71 %
Februari 2009	1,038,270	1,106,257	779,462	326,795- 41.92 %
Agustus 2009	1,103,404	1,168,558	773,047	395,511 - 49.87 %
Februari 2010	1,110,562	1,188,374	794,908	393,466 – 49.50%

Sumber: BPS, Statistik Tenaga Kerja di Indonesia, Februari 2010, dihitung dari Tabel D.1, D.2 dan D.3

TABLE 5.6. GENDER DISPARITIES IN WAGES AND SALARIES OF PERMANENT WORKERS IN TRADE AND TOURISM SECTOR

Periode Survei (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Perbedaan L-P (2)-(3)/(3)
Februari 2008	1,023,703	824,739	198,964 – 22.40 %
Agustus 2008	1,031,438	887,944	143,494 - 16.16 %
Februari 2009	1,116,045	912,497	203,548 – 22.30 %
Agustus 2009	1,220,893	921,612	299,281 -32.47 %
Februari 2010	1,195,497	975,776	219,721- 22.51%

Sumber: BPS, Statistik Tenaga Kerja Indonesia, Februari 2010

TABLE 5.7. DIFFERENCES BETWEEN WAGES AND SALARIES OF PERMANENT AND TEMPORARY WORKERS IN TRADE AND TOURISM

	Pekerja tetap (1) (000 IDR)	Pekerja tidak tetap (2) (000 IDR)	(1)-(2) dan persentasi dari (2) (000 IDR - %)
Februari 2008	1,126,8	949,4	177,4 - 18.68
Agustus 2008	1,158,1	976,9	181,2 - 18.55
Februari 2009	1,296,1	1,071,9	224,2 - 20.92
Agustus 2009	1,322,4	1,103,2	219,2 - 19.87
Februari 2010	1,337,8	1,133,3	204,5 - 18.04

Sumber: BPS, Statistik Tenaga Kerja Indonesia, Februari 2010

5.4 Usulan Indikator Perkerjaan yang Layak (DWI) untuk Sektor Pariwisata di Indonesia dan Sumber-sumber Informasi

Indikator-indikator Perkerjaan yang layak / The Decent Work Indicators (DWI) untuk sektor pariwisata di Indonesia didasarkan pada DWI yang diidentifikasi untuk semua sektor dengan beberapa modifikasi. Usulan indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 5.8. USULAN DWI UNTUK SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA

Kategori	DWI	DWI dalam Pariwisata	Sumber Informasi
1. Kesempatan kerja	1.1 ratio lapangan kerja - populasi (15-64), l/p	1.1. % lapangan kerja pariwisata dari total lapangan kerja (l/p)	SAKERNAS
	1.2 lapangan kerja informal	1.2 lapangan kerja informal dalam industri pariwisata	SAKERNAS
	1.3 partisipasi angkatan kerja	1.3 partisipasi angkatan kerja dalam industri kepariwisataan	SAKERNAS
	1.4 lapangan kerja menurut status	1.4 menurut status dalam industri kepariwisataan	SAKERNAS
	1.5 proporsi pekerja mandiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan kerja	1.5. proporsi pekerja mandiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan kerja di industri pariwisata	SAKERNAS
	1.6 pangsa lapangan kerja berupah terhadap bidang non pertanian	1.6 pangsa lapangan kerja berupah dalam pariwisata terhadap total atau bidang non pertanian	SAKERNAS
	1.7 tingkat pengangguran		
	1.8 Pangsa orang muda yang tidak bersekolah		
	1.9 Pengangguran angkatan muda		
	1.10 distribusi pengangguran menurut tingkat pendidikan		

Kategori	DWI	DWI dalam Pariwisata	Sumber Informasi
2. Pendapatan memadai dan kerja produktif	2.1 tingkat kemiskinan pekerja (data tidak tersedia)	2.1 tingkat kemiskinan pekerja dalam industri kepariwisataan	SAKERNAS
	2.2 tingkat upah rendah (< 2/3 dari median pendapatan per jam)	2.2 tingkat upah rendah dalam industri kepariwisataan– (< 2/3 dari median pendapatan per jam)	SURVEI USAHA, SURVEI/CATATAN ASOSIASI PEKERJA
	2.3 Rata-rata pendapatan per jam dalam pekerjaan tertentu	2.3 Rata-rata pendapatan per jam dalam industri kepariwisataan	SURVEI USAHA, SURVEI/CATATAN ASOSIASI PEKERJA
	2.4 Rata-rata upah riil	2.4 Rata-rata upah riil dalam industri pariwisata	SAKERNAS
	2.5 Upah minimum dalam % dari upah median	2.5 Upah minimum sebagai % dari upah median dalam industri kepariwisataan	SAKERNAS
	2.6 indeks upah industri manufaktur	2.6 Indeks upah Pariwisata	SAKERNAS
	2.7 pekerja yang baru mendapat pelatihan kerja – tahun lalu /4minggu	2.7 pekerja pariwisata dengan pelatihan kerja baru-baru ini– setahun terakhir /4minggu	SAKERNAS
3. Jam perkerjaan yang layak	3.1 jam kerja berlebihan (%), > 48 jam /minggu	3.1 jam kerja berlebihan dalam pariwisata	SAKERNAS
	3.2 Jam kerja biasa (standardized hour bands)	3.2 Jam kerja biasa dalam industri kepariwisataan (standardized hour bands)	SAKERNAS
	3.3 Jam kerja per tahun per orang yang bekerja	3.3 Jam kerja per tahun per orang yang bekerja dalam industri kepariwisataan	
	3.4 Waktu dalam sebagai bagian dari total kesempatan kerja	3.4 Waktu dalam di industri kepariwisataan sebagai bagian dari total kesempatan kerja	
4. Stabilitas dan keamanan kerja	4.1 lapangan kerja informal (lihat 1.2)	4.1 lapangan kerja informal dalam industri kepariwisataan (lihat 1.2)	SAKERNAS +
	4.2 jumlah dan upah pekerja lepas/ pekerja harian	4.2 jumlah dan upah pekerja lepas/ pekerja harian dalam industri kepariwisataan	SAKERNAS
	4.3 masa jabatan/ kedudukan tetap dalam pekerjaan	4.3 masa jabatan /kedudukan dalam industri kepariwisataan	
5. Kesempatan dan perlakuan setara	5.1 pemisahan jenis / jabatan menurut jenis kelamin	5.1 pemisahan jenis / jabatan menurut jenis kelamin dalam industri pariwisata	SAKERNAS
	5.2 pangsa perempuan dalam menurut ISCO 88 groups 11 and 12	5.2 porsi perempuan dalam menurut ISCO 88 groups	SAKERNAS

Kategori	DWI	DWI dalam Pariwisata	Sumber Informasi
		11 and 12 dalam industri kepariwisataan	
	5.3 kesenjangan upah antar jender	5.3 kesenjangan upah jender dalam pariwisata	SAKERNAS
	5.4 tindakan diskriminasi menurut ras, etnis, penduduk setempat, pekerja migran	5.4 % pekerja industri kepariwisataan berasal dari wilayah, provinsi, pulau lain . Jarak yang ditempuh untuk bekerja dalam industri kepariwisata an	SURVEI KHUSUS, Penambahan pertanyaan dalam SAKERNAS
6. Jaminan sosial (Tidak termasuk pensiunan pegawai negeri)	6.1 pengeluaran untuk jaminan sosial	6.1 pengeluaran untuk jaminan sosial dalam industri kepariwisataan	Survei khusus
	6.2 pembelanjaan untuk kesehatan yang tidak dibayar sendiri oleh rumah tangga	6.2 pembelanjaan untuk kesehatan yang tidak dibayar sendiri oleh rumah tangga pekerja pariwisata	SAKERNAS
	6.3 pangsa pekerja berusia >65 dengan tunjangan pensiun	6.3 3 pangsa pekerja berusia >65 yang sebelumnya bekerja di industri pariwisata dengan tunjangan pensiun	Pertanyaan tambahan pada SAKERNAS
	6.4. pangsa pekerja/ populasi dengan perlindungan dasar tunjangan kesehatan	6.4 pangsa populasi pekerja pariwisata dengan perlindungan dasar tunjangan kesehatan	SAKERNAS
7. Konteks ekonomi dan sosial untuk Perkerjaan yang layak	7.1 % prakiraan pupulasi pekerja yang HIV positif	7.1 % prakiraan pekerja pariwisata yang HIV positif	Survei khusus
	7.2 tingkat produktivitas kerja– tingkat pertumbuhan PDB/kapita	7.2 tingkat produktivitas kerja positif– tingkat pertumbuhan GDP/orang	SAKERNAS
	7.3 tingkat inflasi (%)	—	—
	7.4 ketidaksetaraan pendapatan	7.4 kesenjangan antara pekerja laki-laki/perempuan dalam pariwisata ; ratio pendapatan tertinggi/ terendah dalam perusahaan-perusahaan pariwisata	Survei usaha, pertanyaan tambahan
	7.5 lapangan kerja dalam cabang kegiatan	7.5 Lapangan kerja dalam sektor pariwisata 1. Hotel dan akomodasi lain 2. Jasa perjalanan 3. Transportasi untuk pariwisata 4. Lain-lain: Restoran dan jasa penyedia makanan dan minuman	Pertanyaan tambahan pada SAKERNAS

Kategori	DWI	DWI dalam Pariwisata	Sumber Informasi
		5. Industri/kegiatan lain / khas di negara tertentu	
	7.6 PDB riil per kapita dalam PPP (tingkat pertumbuhan)	7.6 GDP pariwisata per kapita	TSA
	7.7 pangsa pekerja dalam GDP (%)	7.7 pangsa tenaga kerja pariwisata terhadap total	TSA
	7.8 pendidikan populasi dewasa	7.8 pendidikan populasi dewasa	Survei usaha, lembaga pelatihan dan pendidikan
8. Yang harus dihapuskan	8.1 perburuan anak (seperti didefinisikan oleh resolusi ICLS)	8.1 perburuan anak dalam pariwisata	Survei usaha, SAKERNAS dan kajian khusus
	8.2 perburuan anak yang berbahaya	8.2 jumlah korban pedofilia oleh wisatawan, di daerah pariwisata	
9. Dialog sosial, wakil-wakil pekerja dan pengusaha	9.1 tingkat kepadatan serikat pekerja	9.1 serikat pekerja pariwisata yang teridentifikasi	Kajian khusus
	9.2 perusahaan sebagai anggota organisasi pengusaha, tingkat perundingan bersama	9.2 perusahaan pariwisata yang tergabung dalam organisasi pengusaha	
		9.3 Perusahaan pariwisata yang tergabung dalam organisasi pekerja	
10. Lingkungan kerja yang aman	10.1 tingkat kecelakaan kerja, fatal	10.1 ketersediaan peralatan dan fasilitas keamanan/ keselamatan di tempat kerja	Pertanyaan tambahan pada survei usaha
	10.2 sama seperti di atas, non fatal		
	10.3 waktu yang hilang karena kecelakaan kerja		
	10.4 inspeksi ketenagakerjaan /10.000 pekerja		
11. gabungan kerja, keluarga dan kehidupan sosial *)		11.1 % pekerja pariwisata tanpa upah, bekerja dalam bisnis milik keluarga. Bisnis pariwisata tanpa badan usaha yang dikelola keluarga di rumah	Survei Usaha ,SAKERNAS

Bab 6

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Kajian atas publikasi-publikasi yang ada ditambah diskusi dengan para pejabat terkait dan pemangku kepentingan lain, termasuk lembaga-lembaga pendidikan, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Statistik lapangan kerja merupakan indikator penting untuk digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan pemantauan unjuk kerja, selain penting pula untuk memahami dan merespon isu-isu tersebut.
2. Statistik nasional memang penting, tetapi dapat menyesatkan bagi pembuat keputusan di tingkat provinsi dan daerah karena perbedaan posisi pariwisata di masing-masing provinsi, yang bervariasi karena struktur ekonomi regional yang berlainan. Angka-angka Bali, misalnya, berbeda ekstrim dari rata-rata nasional dan semua provinsi lain. Provinsi-provinsi dengan PDRB besar dari minyak dan kehutanan akan memiliki dampak besar pada struktur Nesparda. Peran DKI Jakarta dalam pariwisata juga sangat berbeda dari provinsi-provinsi lain, karena Jakarta adalah wilayah metropolitan, dan sebagai ibu kota, kunjungan didominasi oleh orang-orang yang melakukan perjalanan bisnis, termasuk mereka yang berkunjung untuk rapat, insentif, konferensi dan pameran (MICE). Metropolitan dan kota-kota besar merupakan tujuan perjalanan wisata yang populer bagi wisatawan domestik, dan kota-kota transit bagi wisatawan internal. Pengukuran di provinsi/wilayah spesifik dan strategis akan membantu kita untuk lebih memahami situasi pariwisata di Indonesia dan lebih menghargai kekhasan masing-masing provinsi, termasuk dampaknya pada penciptaan lapangan kerja yang berbeda (besar) dari gambaran nasional. Informasi tentang lapangan kerja pariwisata di wilayah perkotaan/metropolis tertentu sangat diperlukan, terutama karena profilnya mungkin berbeda dari rata-rata wilayah.
3. Pemerintah daerah mungkin tidak tertarik untuk menyiapkan Nesparda karena mungkin tidak begitu mengerti manfaat memiliki Nesparda, tidak memiliki cukup anggaran yang diperlukan untuk menyiapkannya, atau berharap bahwa pemerintah pusat akan melakukannya. Ada indikasi bahwa beberapa wilayah berkeyakinan Nesparda tidaklah dibutuhkan untuk provinsi-provinsi dengan industri pariwisata atau perekonomian yang “sukses”; oleh karena itu, provinsi-provinsi dengan sektor pariwisata yang kurang berkembang tampaknya lebih antusias untuk menyiapkan Nesparda.
4. Industri pariwisata di Indonesia belum didefinisikan sedemikian rupa untuk menyelaraskan diri dengan standar klasifikasi internasional; industri kepariwisataan khas Indonesia belum didefinisikan dan/atau

tidak digunakan untuk mengumpulkan data statistik. Kondisi ini menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk melakukan a) perbandingan internasional dan b) perbandingan antar wilayah, karena tidak ada klasifikasi standar untuk industri dan data mana yang harus dikumpulkan, kecuali yang pelaksanaannya di bawah bantuan BPS.

5. Usaha-usaha pariwisata yang penting, seperti jasa transportasi atau rekreasi dan hiburan, belum dimasukkan dalam survei usaha, sehingga data kesempatan kerja langsung menjadi lebih rendah.
6. Informasi mengenai sektor informal, yang diketahui signifikan di daerah/lokasi pariwisata, tidak tersedia. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk melakukan kajian terhadap sektor informal dalam industri kepariwisataan.
7. Meskipun data lapangan kerja pariwisata yang tersedia sangat terbatas jumlahnya, ada informasi yang dapat dihasilkan dari basis data yang sudah ada. SAKERNAS, yang dilakukan dua kali setahun (Februari dan Agustus) mencantumkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan jumlah hari dan jam kerja pada minggu sebelum survei, informasi tentang tempat kerja dan jenis industri, jenis dan status kerja, jumlah jam kerja dan status kerja, serta upah/gaji dari pekerjaan utama responden untuk masing-masing anggota rumah tangga yang bekerja. Survei lainnya, SUSENAS, yang juga merupakan survei rumah tangga, mencantumkan pertanyaan-pertanyaan apakah responden bekerja dalam minggu sebelum wawancara, hari dan jam kerja, pendapatan bersih, jenis dan industrinya serta status kerja, yang kemudian dapat ditabulasi silang dengan variabel-variabel lain. Kedua survei tersebut menyediakan informasi yang berharga tentang lapangan kerja yang terkait dengan pariwisata tanpa harus melakukan survei ekstra/tambahan.
8. Ada lebih banyak informasi yang dibutuhkan untuk sistem pendukung kebijakan dan perencanaan, yang dapat digali dengan mencantumkan pertanyaan tambahan dalam survei-survei yang sudah ada dan dikelola oleh BPS, seperti SAKERNAS dan/atau Survei Upah dan Gaji. Ada survei-survei lain yang perlu ditambah cakupannya, terutama survei usaha. Survei usaha memerlukan beberapa perubahan umum untuk mendapatkan/memelihara informasi yang andal.
9. Dalam hal indikator-indikator unjuk kerja pariwisata, kesempatan kerja serta faktor-faktor yang terkait dengannya belum populer meskipun pengurangan dan penghapusan pengangguran adalah salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Salah satu alasan untuk hal ini adalah fakta bahwa tidak banyak orang yang memiliki akses pada Neraca Satelit Pariwisata ataupun publikasi-publikasi lain yang kurang dipromosikan.
10. Terdapat indikasi bahwa ada kesenjangan antara pendidikan pariwisata dan industri. Sementara beberapa lembaga pendidikan tinggi pariwisata menyatakan bahwa seluruh lulusannya terserap dalam pasar, belum ada catatan yang memberikan gambaran keseluruhan, khususnya di tingkat pendidikan menengah. Banyak perusahaan yang memiliki program pelatihan sendiri. Beberapa anggota industri ini mempekerjakan mereka yang bukan lulusan sekolah pariwisata sementara terdapat indikasi tentang lulusan yang banyak bekerja ke luar negeri.
11. Statistik pariwisata belum menjadi prioritas dalam program pemerintah. Anggaran yang dirumuskan untuk statistik nasional masih sangat terbatas dibandingkan dengan anggaran keseluruhan yang dialokasikan untuk pariwisata. Di tingkat provinsi dan daerah, kondisinya bahkan lebih buruk lagi, seperti ditunjukkan oleh kurangnya informasi yang memadai ketika tiba waktunya untuk menyiapkan Nesparda di beberapa provinsi. Informasi mengenai wisatawan *outbound* juga masih sangat terbatas, sementara prakiraan jumlah wisatawan domestik tidak tersedia per tahun. Data yang relatif tepat waktu hanya tersedia untuk sebagian kecil kedatangan internasional.
12. Indikator-indikator perkerjaan yang layak belum populer di kalangan akademisi pariwisata, begitu juga halnya dengan kesempatan kerja di sektor publik. Lembaga-lembaga pendidikan pun belum menjadi perhatian utama para ahli statistik lapangan kerja.

6.2 Rekomendasi

Sepanjang diskusi-diskusi yang dilakukan dalam proses penelitian ini, rekomendasi-rekomendasi berikut ini muncul ke permukaan:

1. Pertama, Indonesia harus mengadopsi kegiatan-kegiatan yang tercantum sebagai industri pariwisata dalam IRTS 2008 dan mendefinisikan serta menyepakati cakupan kegiatan pariwisata yang khas Indonesia. Bahkan seandainya dilakukan beberapa modifikasi, mereka perlu didefinisikan pada tingkat nasional dan disebar ke daerah, agar diketahui dan diadopsi di semua tingkatan.
2. Berdasarkan kesepakatan tentang cakupan dan klasifikasi industri kepariwisataan, statistik terkait perlu dilengkapi:
 - usaha-usaha yang belum pernah disurvei sebelumnya, dengan kemungkinan berbeda-beda di antara berbagai provinsi, tergantung pada situasi dan keadaan masing-masing;
 - survei-survei spesifik mengenai sektor informal, yang diduga memberikan pangsa yang signifikan terhadap lapangan kerja pariwisata secara keseluruhan, perlu dilakukan; dan
 - basis data dari survei-survei terdahulu perlu digunakan untuk mengidentifikasi pangsa dan besaran lapangan kerja pariwisata di Indonesia dan di tingkat provinsi. Informasi tentang upah dan gaji serta informasi lain, sesuai yang disepakati, perlu dipublikasikan secara luas.
3. Merancang Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan BPS (dengan melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk menetapkan tujuan-tujuan bersama serta rencana aksi bersama untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, dan distribusi industri kepariwisataan serta peran industri dan kegiatan pariwisata dalam perekonomian Indonesia.
4. Menyusun suatu rencana aksi untuk diskusi-diskusi komprehensif dan evaluasi atas Neraca Satelit Pariwisata Indonesia beserta statistik-statistik yang ada terkait dengan pariwisata seperti misalnya, GDP, I-O, SAM dan FOF yang dilaksanakan oleh suatu tim yang khusus ditugaskan untuk itu.
5. Fasilitasi dan dukungan untuk melakukan *Focus Group Discussions* (FGD) atau lokakarya yang melibatkan para pemangku kepentingan pariwisata, khususnya untuk mengorganisasikan kegiatan menyusun HRM, NTI, PA dan metodologi dasar yang terkait, seraya mempertimbangkan pelajaran yang dipetik oleh BPS dari Statistics Canada.
6. Berdasarkan pengalaman Kanada dan Australia, rencanakan pemrosesan dan survei khusus dengan tujuan utama untuk memperbaiki statistik yang ada tentang pariwisata di Indonesia, dengan memberikan tekanan pada kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan.
7. Provinsi-provinsi sangat berbeda-beda sifat pariwisatanya; survei/kajian mendalam perlu dilakukan di provinsi-provinsi terpilih untuk menghindari penafsiran menyesatkan yang disebabkan oleh angka-angka nasional. Pemilihan provinsi-provinsi ini dapat didasarkan pada kontribusi provinsi terhadap PDRB atau pada karakter fenomena pariwisata di provinsi-provinsi tersebut. Di bagian barat Indonesia, prioritas perlu diberikan pada provinsi-provinsi di Jawa dan Bali di mana pergerakan populasinya sangat substansial dalam menciptakan pariwisata internal atau domestik di tingkat nasional maupun provinsi.

Provinsi Bali, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau (di mana Batam terletak) adalah gerbang masuk internasional utama; Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Tengah memiliki kepadatan wisatawan domestik dan internal yang besar; Jawa Barat dan Banten adalah lokasi-lokasi strategis yang berbatasan dengan ibu kota; Sumatra Barat dan Sumatra Utara adalah provinsi-provinsi yang membutuhkan revitalisasi, Sumatra Selatan dan Riau merupakan tujuan wisata baru yang tumbuh dengan pesat. Selain itu, Riau memiliki keunggulan lokasi karena berdekatan dengan pasar-pasar utama: Singapura dan Malaysia.

Di Indonesia tengah dan timur, prioritas mungkin diberikan kepada provinsi-provinsi terpilih: Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Di provinsi-provinsi lain, kajian khusus perlu dilakukan di kabupaten-kabupaten dengan konsentrasi wisatawan (Raja Ampat di Papua) dan memiliki lokasi strategis berbatasan dengan Malaysia (di Kalimantan). Pemilihan kabupaten/kota untuk survei khusus ini perlu dikoordinasikan dengan program/kegiatan pemerintah lainnya.

8. Unit pengelola basis data dalam birokrasi perlu diperkuat dari segi posisi kelembagaan dan sdm pendukungnya. Pembangunan kapasitas untuk pengembangan basis data perlu diprioritaskan; suatu sistem *online* untuk berbagi data dasar antar dinas pariwisata kabupaten/kota, provinsi dan kantor pariwisata nasional harus dipertimbangkan untuk distribusi informasi tepat waktu yang dibutuhkan guna mendukung proses pengambilan keputusan. Tantangannya adalah melakukan advokasi dan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan basis data.
9. Suatu kajian khusus untuk memetakan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan beserta lulusan mereka perlu dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas anggaran dalam mendukung industri pariwisata Indonesia.
10. Dengan sering dan banyak digunakan sebagai indikator penting tolak ukur unjuk kerja dalam publikasi-publikasi dan pidato-pidato resmi, statistik lapangan kerja dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan politik, dan juga meningkatkan apresiasi, terhadap pentingnya pariwisata dalam agenda pembangunan nasional.
11. Indikator-indikator pekerjaan yang layak perlu disebarakan dan basis data statistik berkenaan dengan indikator-indikator tersebut harus disiapkan.

Lampiran I - Australia

Menurut Biro Statistik Australia, pariwisata memiliki dampak besar terhadap perekonomian Australia, mempengaruhi banyak sektor perekonomian dan menyumbang pada lapangan kerja, ekspor, konsumsi, *gross value added* (GVA) serta layanan lain. Pada tahun 2003–2004, pariwisata menyumbangkan 3,9% pada *gross domestic product* (GDP). Pariwisata juga berkontribusi penting pada perekonomian Negara bagian Australia. Kontribusi ekonomi kepariwisataan di Australia didominasi oleh wisatawan domestik, bukan wisatawan internasional. Pariwisata juga merupakan kontributor penting dalam pendapatan ekspor Australia.³⁰

Sesuai dengan *Sources and Methods, Labour Statistics: Employment in the Tourism Industries (Special edition)*,³¹ Australia memakai sumber-sumber berikut ini untuk mengumpulkan data kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan:

- ♦ Survei-survei sampel Tenaga Kerja atau rumah tangga lainnya:
 - *Labour Force Survey* (LFS)
- ♦ Survei-survei Perusahaan:
 - *Economic Activity Survey* /Survei Kegiatan Ekonomi
 - *Survey of Employee Earnings and Hours* (SEEH)/Survei Pendapatan dan Jam kerja Pekerja
- ♦ Catatan administratif dan sumber-sumber yang berkaitan:
 - *Travel Agency Services*

Untuk menyusun statistik-statistik nasional tentang kesempatan kerja, upah dan jam kerja dalam industri kepariwisataan, *Australian Bureau of Statistics* menyusun *Tourism Satellite Account* (TSA).

TSA tersebut menyediakan seperangkat data ekonomi yang komprehensif mengenai kontribusi langsung pariwisata pada perekonomian Australia dalam kerangka kerja akunting nasional, yang menyediakan cara untuk dapat menggambarkan dan menganalisa aspek-aspek ekonomi kepariwisataan secara terpisah dari struktur neraca utama dan memungkinkan untuk menentukan kontribusi pariwisata pada agregat-agregat neraca nasional utama.

TSA menggunakan sebuah model untuk mengukur besaran “industri” kepariwisataan sehingga dapat dibandingkan secara konsisten dengan industri-industri lain dalam perekonomian. Pengukuran utamanya mencakup GDP pariwisata, GVA pariwisata, konsumsi pariwisata menurut jenis wisatawan, dan lapangan kerja pariwisata.

Data nasional resmi tampil dalam TSA dan didasarkan pada kombinasi berbagai sumber.

Lapangan kerja dalam industri kepariwisataan diambil secara agak simplistik untuk masing-masing industri dengan menerapkan ratio nilai tambah dari masing-masing tahun patokan (*benchmark*) dengan prakiraan lapangan kerja untuk masing-masing industri pada tahun-tahun sesudahnya. Angka prakiraan lapangan kerja antara tahun-tahun patokan kemudian diratakan. Metoda menggunakan ratio nilai tambah industri melibatkan asumsi bahwa lapangan kerja yang dihasilkan oleh pariwisata dalam masing-masing industri merupakan proporsi langsung dari nilai tambah yang dihasilkan oleh pariwisata pada tahun-tahun patokan.

Rincian angka lapangan kerja menurut industrinya dikumpulkan dalam *Labour Force Survey* (LFS) pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember. Prakiraan jumlah orang yang dipekerjakan menurut industrinya

30 Untuk keterangan lebih lanjut, lihat: Australian Bureau of Statistics, “A Statistical Overview of Tourism,” *Australian Economic Indicators* no. 1350.0 (13 January 2006), 3-15.

31 Untuk keterangan lebih lanjut, lihat: ILO dan UNWTO, *Sources and Methods: Labour Statistics - Employment in the Tourism Industries Special Edition* (Madrid, Spain: World Tourism Organization and International Labour Organization, 2008), 13-23.

dan jumlah totalnya diperhitungkan sebagai rata-rata dari empat bulan tersebut. Angka total lapangan kerja didapat dengan menambahkan lapangan kerja dalam angkatan bersenjata pada angkatan kerja sipil. Karena bulan-bulan survei ini tidak memasukkan masa libur Natal, ada kemungkinan terjadi bias prakiraan yang lebih rendah untuk industri-industri pariwisata.

Pengecualian-pengecualiannya adalah akomodasi, biro perjalanan wisata, kafe dan restoran, klub, pub, bar, kasino dan tempat perjudian, serta industri transportasi udara dan laut, di mana digunakan data survei pengusaha bila tersedia. Angka lapangan kerja dalam industri-industri ini diekstrapolasi dengan menggunakan pergerakan dalam LFS untuk tahun-tahun terkini.

Beberapa industri pariwisata dalam TSA sudah dipadatkan dalam tabel-tabel yang berkaitan dengan lapangan kerja karena LFS tidak dirancang untuk menghasilkan angka prakiraan untuk industri-industri canggih dalam TSA dengan tingkat akurasi yang memadai.

Tabel berikut ini berasal dari Australian Tourism Satellite Accounts, memberikan informasi terakhir yang sudah diterbitkan mengenai lapangan kerja pariwisata Australia.

12

PEOPLE EMPLOYED IN TOURISM(a), By industry

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Tourism characteristic and connected industries									
Travel agency and tour operator services ('000)	22.7	22.1	22.1	20.6	20.8	21.6	21.4	21.8	23.1
Road transport and motor vehicle hiring ('000)	22.7	23.5	24.5	24.1	25.5	23.8	24.3	25.5	26.6
Air and water transport ('000)	31.5	34.6	33.4	30.7	30.5	31.4	33.4	33.5	34.3
Accommodation ('000)	77.4	79.5	77.1	79.7	72.4	73.2	73.3	71.4	71.7
Cafes and restaurants ('000)	40.5	45.9	46.5	45.4	47.9	49.3	48.3	51.4	53.0
Clubs, pubs, taverns and bars ('000)	23.4	24.3	23.2	22.1	22.9	23.6	23.0	24.0	23.2
Rail transport ('000)	2.9	3.2	2.7	3.1	3.3	3.2	3.4	3.0	3.4
Manufacturing ('000)	32.9	33.3	32.3	33.3	32.0	32.5	31.8	31.8	32.8
Retail trade ('000)	105.4	105.8	110.9	115.8	115.8	119.9	120.7	120.1	125.6
Casinos and other gambling services ('000)	1.9	2.1	1.9	1.7	1.9	1.9	2.1	1.8	2.1
Libraries, museums and arts ('000)	6.4	8.0	7.7	7.9	7.8	9.2	9.6	9.8	10.9
Other entertainment services ('000)	9.6	9.3	10.0	10.8	10.9	12.2	13.0	13.6	13.1
Education ('000)	29.0	29.5	30.7	31.7	33.2	32.1	34.2	34.2	36.4
Total tourism characteristic and connected industries ('000)	406.3	421.0	423.0	427.0	425.0	433.8	438.4	441.9	456.1
All other industries ('000)	33.6	34.3	34.8	35.6	36.6	38.0	39.3	41.0	41.7
Total tourism employed persons ('000)	439.9	455.3	457.7	462.6	461.6	471.7	477.7	482.8	497.8
Total employed persons ('000)	8 835.2	9 016.4	9 143.9	9 377.7	9 528.0	9 800.1	10 042.2	10 304.9	10 578.7
Tourism industry share of total employment (%)	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7

(a) People employed in tourism is derived by multiplying the number of employed persons in the industry by the proportion of total value added of the industry which is related to tourism.

Sumber: Tabel ini tersediati atas kontribusi Mr. Paul Williams (Head, Industry Statistics Branch) dari Australian Bureau of Statistics.

Lampiran II - Kanada

Metoda yang digunakan di Kanada untuk perhitungan statistik lapangan kerja nasional, upah dan jam kerja dalam industri kepariwisataan adalah sebagai berikut.

Data nasional resmi tampil dalam Canadian System of National Accounts (CSNA) dan the Canadian Tourism Satellite Account (CTSA) dan keduanya didasarkan pada kombinasi berbagai sumber. CSNA mencantumkan data pendapatan pekerja menurut industri, termasuk industri kepariwisataan, sementara Canadian Productivity Accounts (CPA), yang menjadi bagian dari CSNA, mencantumkan data tentang lapangan kerja, upah dan jam kerja, menurut industrinya secara terperinci. Kedua *Account* ini memakai kombinasi berbagai data dengan cakupan luas, termasuk LFS, SEPH, data administratif, pendapatan pajak, survei biaya operasi usaha, dll.

Di samping itu, Statistics Canada membuat Tourism Satellite Account (TSA) yang mencantumkan prakiraan jumlah pekerjaan dan kompensasi kerja yang secara langsung dapat dikaitkan dengan pembelanjaan wisatawan dalam indust kepariwisataan maupun non pariwisata. Untuk angka prakiraan lapangan kerja pariwisata, TSA mengambil data dari Canadian Productivity Accounts Database (yaitu, prakiraan jumlah pekerjaan yang dapat langsung dikaitkan dengan pembelajaan pariwisata). Metoda berikut ini diterapkan:

Seperti GDP pariwisata, lapangan kerja pariwisata dihitung pada tingkat industri. Karena itu, perhitungan jumlah lapangan kerja menggunakan ratio industri yang sama seperti GDP untuk menghitung pangsa pariwisata dari masing-masing industri. Dengan demikian, bila ratio permintaan pariwisata untuk *output* suatu industri terhadap output kotor totalnya (pada harga pokok) adalah 50%, setengah dari angka lapangan kerja industri dialokasikan untuk pariwisata. Perhitungan yang serupa dilakukan untuk semua industri dan kemudian hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan angka total lapangan kerja pariwisata di Kanada.

Angka prakiraan patokan (*benchmark*) lapangan kerja pariwisata dalam TSA menjadi basis dari prakiraan lapangan kerja per kuartal yang langsung ditimbulkan oleh pembelanjaan wisatawan pada industri-industri pariwisata maupun non pariwisata dalam *National Tourism Indicators (NTI) Quarterly Estimates*. Angka prakiraan lapangan kerja NTI kemudian dimajukan menjadi pola pertumbuhan tahunan yang diamati dalam Productivity Accounts dan rangkaian pekerjaan kuartalan dari SEPH menurut industri.

Akhirnya, informasi yang lebih terperinci lagi tersedia dalam Tourism Human Resource Module (HRM) dari TSA. HRM didasarkan pada dan berakar dalam kerangka kerja akunting TSA Kanada, yang mengikuti panduan internasional dalam *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA:RMF)*.³² Di dalamnya terdapat informasi tentang jumlah pekerja dan pekerja mandiri, pekerjaan setara kerja penuh waktu, jumlah jam kerja total dan pendapatan pekerja, upah dan gaji kotor, serta pendapatan tambahan, menurut industrinya. Untuk pekerjaan-pekerjaan pegawai, informasi ini tersedia menurut pekerjaan, jender, kelompok usia dan status imigran. Karena banyaknya rincian pekerjaan dan demografis, dimensi industri dari HRM dipilih dari data dalam TSA. HRM mencakup rincian pada enam industri: transportasi udara, industri transportasi lainnya, jasa makanan dan minuman, rekreasi dan hiburan, dan jasa perjalanan.

Di dalam HRM, angka lapangan kerja total dalam suatu industri adalah jumlah semua pekerjaan pegawai dan pekerjaan mandiri di dalam industri itu. HRM juga menaksir jumlah pekerjaan dalam suatu industri yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan permintaan pariwisata. Angka prakiraan ini menyediakan tautan antara HRM dan TSA/NTI. Perbedaan antara lapangan kerja pariwisata dan angka total lapangan kerja dalam suatu industri hanyalah jumlah pekerjaan yang langsung dikaitkan dengan industri non pariwisata (yaitu yang tidak langsung terkait dengan permintaan pariwisata).

32 UN Statistics Division (UNSD), the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and the World Tourism Organization (UNWTO), *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework* 2008 (Geneva: Statistical Commission, 2008).

Persentase yang sama dari angka lapangan kerja pariwisata dalam suatu industri (dibahas sebelumnya) diterapkan untuk kesempatan kerja setara kerja penuh waktu, jam kerja total dan pendapatan pekerja. Variabel-variabel yang diturunkan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam industri, seperti misalnya jam kerja rata-rata per tahun dan upah/gaji pertahun per pekerjaan pariwisata diasumsikan sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait, dan tidak terkait, langsung pada pariwisata.

Definisi Pariwisata: pada inti TSA, NTI and HRM terdapat definisi pariwisata. Pariwisata didefinisikan menurut standar-standar internasional sebagai: “kegiatan orang-orang yang bepergian dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan kesehariannya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut, untuk tujuan wisata, bisnis dan lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan berupah di dalam tempat yang dikunjungi.” Orang-orang yang terlibat dalam pariwisata menurut definisi tersebut adalah yang disebut sebagai pengunjung. Pengunjung terdiri dari wisatawan (mereka yang berkunjung dan tinggal di luar lingkungan kesehariannya selama paling sedikit satu malam) dan pengunjung satu hari yang tidak menginap.

Sumber-sumber data: ada empat sumber data utama yang melandasi angka-angka prakiraan **Human Resource Module** estimates: data *Canadian Productivity Accounts* (CPA) dalam *Canadian System of National Accounts* (CSNA), *Population Census*, *Labour Force Survey* (LFS), dan *Survey of Employment, Payrolls and Hours* (SEPH).

A.1 Canadian System of National Accounts

Basis data CPA di dalam CSNA memberikan angka-angka total industri kepariwisataan untuk pekerjaan pegawai dan jam kerja, pendapatan pekerja, upah dan gaji, pendapatan kerja tambahan, untuk pekerjaan penuh waktu maupun paruh waktu, distribusi usia dan jender. Data yang bisa diperbandingkan juga tersedia untuk pekerja-pekerja mandiri, tetapi variabel pendapatannya adalah pendapatan bersih dari bisnis tanpa badan usaha. Angka-angka total ini adalah untuk seluruh pekerjaan, termasuk yang terkait dengan permintaan pariwisata dan non pariwisata. Data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan *North American Industry Classification System* (NAICS).

Pada gilirannya, data CPA untuk pekerjaan didasarkan pada angka prakiraan *Labour Force Survey* untuk jumlah orang yang dipekerjakan. Ini disesuaikan dengan angka pekerjaan dengan menambahkan pekerjaan kedua dari orang-orang dengan beberapa pekerjaan; penambahan dilakukan untuk lapangan-lapangan kerja yang tidak tercakup oleh LFS (misalnya, anggota militer reguler, orang-orang yang bekerja di *territories*, orang-orang bekerja yang tinggal di *First Nations Reserves*, dan pegawai negeri pada kedutaan-kedutaan Kanada di luar negeri) untuk menggambarkan perekonomian keseluruhan. Pengurangan dilakukan untuk mengeluarkan mereka yang absen kerja tanpa bayaran pada minggu acuan. SEPH terutama digunakan untuk mengembangkan alokasi industri pada patokan LFS yang sudah disesuaikan, meskipun survei industri dan sumber-sumber administratif juga digunakan untuk industri-industri terpilih.

Data *jam kerja* mencakup berikut ini:

- ♦ Jumlah jam yang benar-benar digunakan untuk bekerja selama masa kerja normal;
- ♦ Waktu bekerja di luar jam kerja dalam periode kerja normal, dan biasanya dibayar lebih tinggi daripada tarif normal (lembur);
- ♦ Waktu yang dihabiskan di tempat kerja untuk bekerja, seperti mempersiapkan tempat kerja, perbaikan dan pemeliharaan, persiapan dan pembersihan alat-alat, dan penyiapan tanda terima, lembar waktu kerja, dan laporan;
- ♦ Waktu yang dihabiskan di tempat kerja untuk menunggu dan menganggur karena alasan-alasan seperti kurangnya pekerjaan, kerusakan mesin, atau kecelakaan, atau waktu yang dihabiskan di tempat kerja tanpa melakukan pekerjaan apapun tetapi pembayaran tetap dilakukan sesuai kontrak kerja; dan

- ♦ Waktu untuk istirahat pendek di tempat kerja, termasuk istirahat *tea dan coffee breaks*.

Data tidak mencakup:

- ♦ Waktu yang dibayar tapi tidak diisi pekerjaan, seperti cuti tahunan, libur nasional, cuti sakit yang semuanya dibayar;
- ♦ Istirahat makan; dan
- ♦ Waktu yang dihabiskan untuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya.

Data jam kerja disesuaikan untuk membetulkan efek-efek minggu acuan guna memperkirakan jam kerja tahunan yang dijalani.

Dalam CSNA, angka total upah dan gaji dalam industri berasal dari rekonsiliasi rinci dari angka upah dan gaji dari data survei dan data administratif. Prakiraan untuk komponen pendapatan kerja tambahan sebagian berasal dari data administratif (misalnya, kontribusi pengusaha untuk asuransi Kerja dan program dana pensiun Kanada dan Quebec, data administratif tentang dana pensiun resmi dan dari *Workers Compensation Boards*), beserta sumber-sumber survei lain (untuk berbagai tunjangan seperti asuransi jiwa, kecelakaan dan kesehatan).

Penyesuaian juga dilakukan pada patokan (*benchmark*) beberapa industri untuk uang *tips* tidak dilaporkan:

- ♦ Seni pertunjukan dan olahraga pertunjukan serta industri-industri terkait (NAICS 711)
- ♦ Industri hiburan, perjudian dan rekreasi (713)
- ♦ Jasa akomodasi (721)
- ♦ Jasa boga dan tempat minum (722).

Penyesuaian untuk *tips* dilakukan berdasarkan angka penjualan industri untuk minuman beralkohol, makanan di restoran *full service* (diasumsikan tidak ada *tips* untuk makanan siap saji), dan akomodasi. Ada tambahan, penyesuaian kecil untuk tips dalam jasa perawatan pribadi (*barbershop* dan *beauty salon*, dll.) serta industri transportasi kereta api (untuk portir pengangkut barang bawaan).

Angka rata-rata pendapatan per jam dihitung dalam HRM sebagai upah dan gaji dibagi total jam bekerja. Karena *tips* dan upah selama cuti (sakit, liburan, dll.) dimasukkan dalam angka upah dan gaji, maka pendapatan perjam mencakup premium implisit sebagai tambahan atas upah.

A.2 Sensus Penduduk

Sensus Penduduk menyediakan data komprehensif mengenai karakteristik demografis, sosial dan ekonomi, warga Kanada. Informasi pokok dikumpulkan dari sensus penduduk, sementara informasi terperinci mengenai kegiatan pasar tenaga kerja dikumpulkan dari satu tiap lima rumah tangga. Mengingat besarnya ukuran sampel, Sensus menjadi sumber informasi yang paling andal mengenai distribusi pekerjaan.

Data dari Sensus 2001 digunakan terutama untuk mendistribusikan angka total CSNA untuk pekerjaan sebagai pegawai, jam bekerja serta upah dan gaji di antara berbagai pekerjaan dan di antara imigran dan non imigran.

A.3 Labour Force Survey

Labour Force Survey dilakukan per bulan dan mencakup sekitar 53.500 rumah tangga, yang secara kasar setara dengan sampel sebesar 100.000 orang usia 15 tahun ke atas. LFS mengumpulkan informasi pokok kegiatan tenaga kerja termasuk industri dan jenis pekerjaan untuk minggu acuan survei (biasanya minggu yang menyertakan tanggal 15 dari bulan bersangkutan), baik untuk pekerja dan pekerja mandiri. Survei ini tidak mencakup *territories*, anggota militer atau pegawai negeri yang ditempatkan di luar negeri, atau orang-orang yang tinggal di *First Nations reserves*.

LFS digunakan untuk mengembangkan data rangkaian waktu mengenai pekerjaan, jam bekerja dan upah serta gaji menurut pekerjaan, maupun usia dan jender untuk masing-masing kelompok industri dalam HRM. LFS digunakan dalam CSNA untuk menentukan jumlah total pekerjaan.

A.4 Survey of Employment, Payrolls and Hours

Survey of Employment, Payrolls and Hours (SEPH) dilakukan tiap bulan. Survei ini mengumpulkan jumlah pekerjaan sebagai karyawan dan data gaji dari satu sampel tempat-tempat usaha di Canada.

Tempat-tempat usaha diberi kode menurut industrinya melalui Business Register, sehingga menyediakan sumber terpercaya untuk informasi tepat waktu mengenai distribusi pekerjaan dan gaji pada industrinya. Data administratif dilengkapi dengan *Business Payroll Survey* bulanan terhadap 11.000 usaha. Survei ini mengumpulkan data lapangan kerja, pendapatan dan jam kerja dengan upah / biasa berdasarkan apakah pekerja dibayar per jam, digaji atau diberi imbalan dengan cara lain.

Data SEPH digunakan untuk menyisihkan data tentang tempat kos atau kamar sewaan dari keseluruhan data CSNA untuk jasa akomodasi dan untuk mengembangkan data jasa akomodasi sesuai rangkaian waktu. SEPH juga digunakan secara luas dalam CSNA untuk menetapkan distribusi industri dari pekerjaan.

Metodologi dasar untuk prakiraan HRM pada hakekatnya terdiri dari tujuh langkah:

1. Mengambil angka total dari CSNA untuk pekerjaan, jam bekerja, dan upah serta gaji;
2. Memilah-milahkan angka total ini dengan menggunakan data dari CSNA untuk pekerjaan purna dan paruh waktu, distribusi usia dan jender;
3. Mendistribusikan angka total CSNA pada berbagai jenis pekerjaan dan status imigran berdasarkan data sensus;
4. Membangun data *time series* dari patokan-patokan ini berdasarkan pergerakan dalam rangkaian data bersangkutan dari LFS;
5. Meratakan rangkaian waktu untuk data pekerjaan dari LFS, sambil mencatat angka total industri secara keseluruhan; dan
6. Melakukan penyesuaian akhir dan terbatas terhadap nilai-nilai data. Langkah ini melengkapi prakiraan untuk total lapangan kerja pada HRM; akhirnya,
7. Menerapkan ratio pariwisata untuk mendapatkan angka lapangan kerja yang terkait dengan pariwisata.

Langkah 1: Angka-angka total patokan (benchmark)

Angka total industri untuk pekerjaan, jam bekerja, pendapatan kerja serta upah dan gaji, termasuk rinciannya menurut golongan pekerja (pekerja atau pekerja mandiri, status purna waktu atau paruh waktu, kelompok usia dan jender berasal dari basis data CPA dari CSNA. Beberapa penyesuaian kemudian dilakukan, khususnya:

1. Komponen tenaga kerja dengan pendapatan campuran dari kerja mandiri dimasukkan dengan mengalikan jumlah jam kerja mandiri dengan pendapatan per jam rata-rata per pekerja. Metoda ini mengasumsikan bahwa pekerja mandiri dan pegawai secara rata-rata memiliki pendapatan yang sama.
2. Penyertaan tempat kos dan persewaan kamar dalam Industri Jasa akomodasi memerlukan penyesuaian dengan mengeluarkannya dari data. Hal ini dilakukan dengan menggunakan rincian dari SEPH mengenai porsi industri dari pekerjaan keseluruhan, jam bekerja dan pendapatan. Proporsi ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan jumlah pegawai dan pekerja mandiri.

Langkah 2: Distribusi data CSNA menurut usia dan jender

Data dari basis data CPA dalam CSNA digunakan untuk memilahkan pekerjaan, jam bekerja dan pendapatan menurut usia dan jender. Informasi ini diadaptasi untuk menyesuaikannya dengan kelompok usia yang digunakan dalam HRM.

Langkah 3: Distribusi angka total industri menurut pekerjaan

Untuk mengembangkan pembagi menurut pekerjaan terhadap angka total industri (terkait dengan pekerjaan pegawai), tabulasi sensus khusus dilakukan dengan mengidentifikasi orang-orang dalam industri kepariwisataan yang memiliki pendapatan kerja dalam tahun acuan dan bukan pekerja mandiri. Orang-orang yang dipilih dikelompokkan menurut industri dan apakah mereka terutama bekerja paruh waktu atau penuh waktu dalam tahun acuan tersebut. Untuk masing-masing kelompok ini, distribusi sampel (*weighted*) menurut pekerjaan ditentukan, dan demikian pula dengan distribusi angka total jam bekerja dan pendapatan upah dan gaji.

Pembagi untuk jam bekerja didasarkan pada distribusi jumlah jam total (jumlah pekerjaan dikali dengan jumlah jam rata-rata bekerja) di antara berbagai pekerjaan di dalam masing-masing industri. Pembagi untuk upah dan gaji didasarkan pada distribusi total upah dan gaji (jumlah pekerjaan dikali jam bekerja dikali pendapatan per jam) di antara berbagai pekerjaan dalam masing-masing industri.

Langkah 4: Membangun occupational time series

Langkah 4 mensyaratkan pemakaian rangkaian data rata-rata tahunan LFS yang bersangkutan menurut pekerjaan, kelompok usia dan jender untuk membangun suatu data rangkaian waktu. Informasi mengenai status imigran tidak tersedia dari LFS dan oleh karena itu distribusi persentase dari Sensus tahun acuan (2000) dipertahankan untuk semua tahun. Data pekerjaan dan industri LFS cocok dengan yang digunakan dalam sensus. Data LFS disesuaikan dengan tingkat sensus untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan antar tahun.

Langkah 5 dan 6: Meratakan data LFS dan penyesuaian manual

Langkah 5 membutuhkan perataan untuk mengurangi 'volatilitas' dalam data rangkaian waktu pekerjaan dalam LFS. Perataan data dilaksanakan dengan cara sedemikian rupa sehingga mempertahankan angka-angka total industri (dari CSNA) dan distribusi pekerjaannya (dari sensus 2000), karena garis patokan (*benchmark*) adalah batas yang harus dihormati. Garis *simple moving average* diterapkan pada indikator-indikator ini (dibahas dalam langkah 3) digunakan untuk membangun gambaran rangkaian waktu mengenai pekerjaan, jam bekerja, upah dan gaji, penuh waktu dan paruh waktu, menurut pekerjaan dan untuk setiap industri. Garis *moving average* empat tahunan diperhitungkan untuk menyediakan hasil terbaik keseluruhan

dari segi kenalaran dan konsistensi, mengurangi gejolak (*volatility*) dan meminimumkan kebutuhan untuk penyesuaian secara manual.

Langkah terakhir dalam mengembangkan angka prakiraan total industri melibatkan penyesuaian manual ketika garis rangkaian yang sudah diratakan tampak ke luar alur, atau terlihat jelas tidak konsisten dengan jam bekerja atau upah dan gaji, atau menimbulkan gerakan kacau dalam garis rata-rata tahunan dari rata-rata jam kerja tahunan dan pendapatan per jam rata-rata. Hasil-hasil studi kelayakan mengindikasikan bahwa perataan dan penyesuaian manual tidak menimbulkan efek besar terhadap pola umum dari distribusi pekerjaan. Namun demikian, dua hal tersebut secara mencolok mengurangi gejolak tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kurang lebih 1% dari sel data disesuaikan sesudah diratakan.

Langkah 7: Penerapan ratio pariwisata untuk mendapatkan angka lapangan kerja pariwisata

Langkah berikutnya melibatkan prakiraan/taksiran jumlah pekerjaan, jam bekerja dan upah serta gaji yang ditimbulkan oleh pariwisata, menurut jender, distribusi usia dan status imigran. Untuk melakukan hal ini, ratio pariwisata implisit ditetapkan dari lapangan kerja yang tercipta dari pariwisata dari NTI.

Ratio pariwisata diperhitungkan untuk setiap pekerjaan dalam masing-masing industri secara individual, menurut kandungan (*content*) pariwisatanya. Sebagai contoh, dalam kasus transportasi udara, sekitar 77% pekerjaan dianggap ditimbulkan oleh pariwisata, berarti (menurut konvensi dan praktik TSA) bahwa 77% GDP industri dan lapangan kerja dapat dikatakan dihasilkan dari permintaan pariwisata (sebagian sisanya ditimbulkan oleh angkutan barang). Mungkinkah 77% dari kesempatan kerja dalam masing-masing bidang pekerjaan dapat secara nalar dan wajar dikatakan disebabkan oleh pariwisata? Mungkin tidak.

Awak kabin (*purser*) dan pramugari tidak dituntut untuk memindahkan kargo. Hampir 100% pekerjaan mereka sepertinya, dan mungkin saja, bersumber dari permintaan pariwisata. Dengan demikian, kurang dari 77% pekerjaan dalam bidang pekerjaan lain harus dikaitkan dengan pariwisata, kalau tidak maka rasionya tidak dapat terpenuhi. Dalam kajian ini, masing-masing bidang pekerjaan diberi suatu ratio pariwisata terkait dengan kegiatan kepariwisataannya. Ratio tersebut didasarkan pada ratio komoditi pariwisata. Sesudah hal-hal ini diterapkan, angka-angka totalnya dipatok (*benchmarked*) pada data NTI sehingga HRM dan NTI memiliki data lapangan kerja yang konsisten.

Dokumentasi

Publikasi-publikasi berikut ini berisi informasi metodologis terperinci dan tersedia pada *website Statistics Canada*:

The following publications contain detailed methodological information and are available from Statistics Canada's website:

Producing Hours Worked for the SNA in Order to Measure Productivity: the Canadian Experience by Andr  e Girard, Jean-Pierre Maynard and Marc Tanguay
<http://www.statcan.ca/english/research/15-206-XIE/15-206-XIE2006004.htm>

Canadian Tourism Satellite Account, 2000 by Conrad Barber-Dueck and Demi Kotsovos
<http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/13-604-M/13-604-MIE2005048.pdf>

National Tourism Indicators: Quarterly Estimates. From First Quarter 2000 to Fourth Quarter 2010
<http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/13-009-XIB/13-009-XIB-e.html>

Human Resource Module of the Tourism Satellite Account, 1997-2002 by Conrad Barber-Dueck (see Appendix B: Methodology)

<http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/13-604-M/13-604-MIE2006051.pdf>

Human Resource Module of the Tourism Satellite Account, Update to 2005 by Chris Jackson

<http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=13-604-M2007055>

Lampiran III - Bab 7 dari IRTS 2008

Lampiran berikut ini berisi Bab 7: Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisata yang diterjemahkan dari Rekomendasi Internasional untuk Statistik Pariwisata (The International Recommendations for Tourism Statistics 2008).³³

- 7.1 Seperti dalam sektor apa pun dari perekonomian, lapangan kerja merupakan dimensi penting untuk menandai dan mengakui pentingnya pariwisata dari sudut pandang produktif, sosial dan strategis.
- 7.2 Karena kegiatan-kegiatan berciri pariwisata umumnya padat karya, maka pemerintah sangat berkepentingan dalam mengukur kontribusi pariwisata dalam hal penciptaan lapangan kerja dan memberikan akses pada pendapatan.
- 7.3 Sementara kerja dapat diasosiasikan dengan *output* total suatu tempat usaha, ia tidak dapat dikaitkan pada *output* tertentu tanpa penggunaan asumsi spesifik dan prosedur pemodelan. Karena alasan ini, lapangan kerja pariwisata, merujuk pada kesempatan kerja yang hanya terkait dengan barang dan jasa (berciri pariwisata, terkait pariwisata dan lainnya) yang diperoleh oleh pengunjung dan dihasilkan oleh industri kepariwisataan atau industri-industri lain tidak dapat secara langsung. Pengukurannya memerlukan teknik-teknik yang lebih dari rekomendasi-rekomendasi saat ini.
- 7.4 Sebagai akibatnya, rekomendasi-rekomendasi dalam bab ini dibatasi untuk lapangan kerja dalam industri kepariwisataan (lihat Bab 6). Seperti sudah disebutkan, (lihat paragraf. 6.15. to 6.20.) di tiap-tiap negara, industri kepariwisataan mencakup semua usaha yang kegiatan utamanya adalah kegiatan berciri pariwisata. Industri kepariwisataan ini umum bagi semua negara kecuali *kegiatan-kegiatan berciri pariwisata yang khas suatu negara* (kategori 12; lihat para. 5.34.). Harus dicatat bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berciri pariwisata sekunder dari suatu usaha yang termasuk dalam industri non-pariwisata (misalnya, semua usaha yang kegiatan utamanya bukanlah kegiatan berciri pariwisata) tidak dimasukkan dalam “angka pekerjaan dalam industri pariwisata” meskipun mereka akan dihitung dalam “angka pekerjaan pariwisata”. Di lain pihak, orang-orang yang dipekerjakan dalam usaha yang termasuk sebagai industri kepariwisataan yang berpartisipasi dalam kegiatan sekunder non pariwisata usaha tersebut akan dimasukkan dalam “angka pekerjaan dalam industri kepariwisataan” tetapi tidak dimasukkan dalam “angka pekerjaan pariwisata”.
- 7.5 Di samping data tentang *orang-orang yang dipekerjakan* dan jumlah *pekerjaan* dalam industri-industri pariwisata, pengukuran-pengukuran lain seperti *jumlah jam kerja* atau *pekerjaan setara kerja purna waktu* juga dibutuhkan untuk mengukur jumlah pekerja yang ada dalam industri pariwisata tertentu. Konsep dan definisi yang berbeda tentang *employment* dalam industri kepariwisataan dan saling keterkaitannya diberikan di bawah ini.

A. Konsep dan Definisi

- 7.6 Harus dicatat bahwa statistik ketenagakerjaan memiliki standar-standar internasionalnya sendiri³⁴ yang berisi berbagai konsep, definisi dan klasifikasi yang harus dirujuk dan digunakan ketika

33 Excerpted from UN Statistics Division (UNSD) and the World Tourism Organization (UNWTO), *International Recommendations for Tourism Statistics 2008* (Geneva: Department of Economic and Social Affairs, 2008), 61-68.

34 Dalam sistem UN, International Labour Organization (ILO) bertanggungjawab untuk membuat standard internasional dalam statistik ketenagakerjaan. Standard ini dapat ditemukan di <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/> (lihat: Labour Statistics' Conventions, Resolutions, Recommendations, Guidelines); dan “Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment”. Thirteenth International Conference of Labour of Labour Statisticians. *Current International Recommendations on Labour Statistics*, 2000 Edition. International Labour Office, Geneva, 2000

mengumpulkan statistik lapangan kerja. Dengan demikian, konsep dan definisi yang disajikan dalam bab ini utamanya harus digunakan untuk maksud-maksud statistik maupun sebagai basis untuk prosedur rekonsiliasi data guna menghasilkan tabel-tabel kesempatan/lapangan kerja TSA dan SNA.

- 7.7 Dalam peristilahan umum, seseorang yang memiliki pekerjaan dianggap dipekerjakan dan menjadi bagian populasi yang aktif secara ekonomi (lihat Boks 7.1).

Boks 7.1

Job/pekerjaan

“...job/pekerjaan didefinisikan sebagai kontrak eksplisit atau implisit antara seseorang dengan unit institusional untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan untuk jangka waktu yang ditentukan atau sampai pemberitahuan lebih lanjut. Unit institusional tersebut mungkin berupa pemilik suatu usaha tanpa badan hukum; dalam kasus ini orang tersebut dideskripsikan sebagai pekerja mandiri dan memperoleh pendapatan campuran”.

Sumber: “System of National Accounts 1993”, para. 17.8.

Economically active population/Populasi yang aktif secara ekonomi

“Populasi yang aktif secara ekonomi atau tenaga kerja terdiri dari semua orang, apapun jenis kelaminnya, yang menyediakan pasokan kerja untuk produksi barang dan jasa seperti didefinisikan oleh *System of National Accounts* selama jangka waktu acuan yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam batasan produksi dalam Sistem dapat diihktisarkan sebagai berikut: (a) Produksi semua barang atau jasa individual atau kolektif yang dipasok untuk unit-unit selain produsennya, atau dimaksudkan untuk dipasokkan, termasuk produksi barang dan jasa yang terpakai habis dalam proses produksi barang dan jasa seperti itu...”

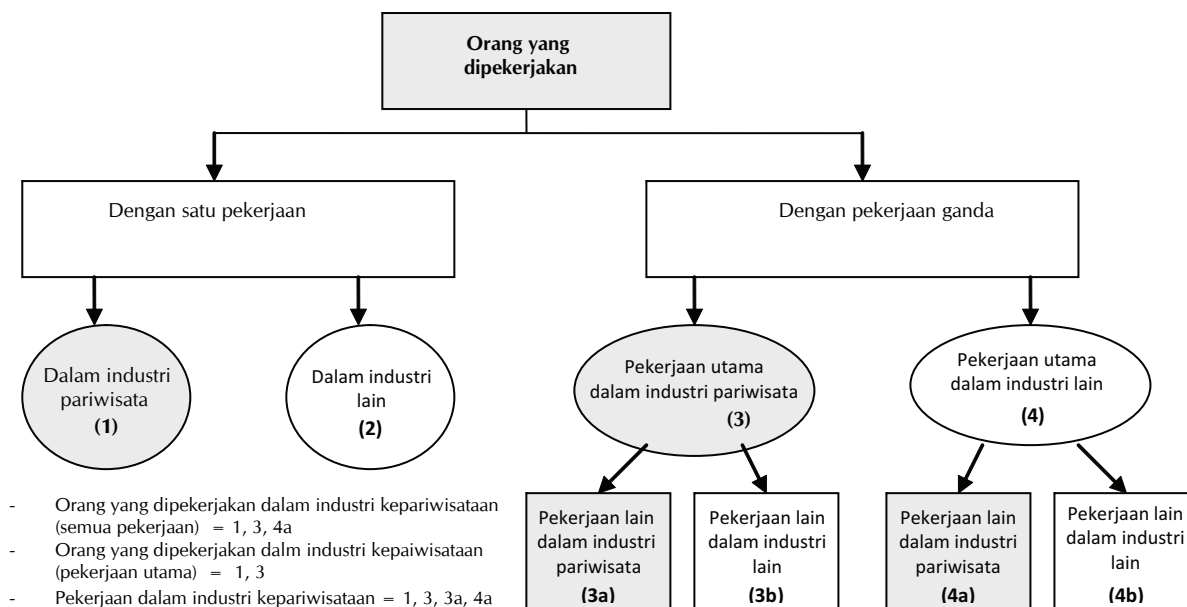
Sumber: ILO. “Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment”. Thirteenth International Conference of Labour of Statisticians. Current International Recommendations on Labour Statistics, 2000 Edition. Geneva, 2000, p. 24; and “System of National Accounts 1993”, para. 6.18.

- 7.8 Orang-orang mungkin memiliki dua pekerjaan atau lebih selama masa acuan tertentu, dan seluruhnya, sebagian atau tak satupun dari pekerjaan-pekerjaan ini mungkin dilaksanakan dalam industri kepariwisataan. Hal ini mengakibatkan tiga pengukuran kesempatan kerja yang berlainan dalam industri kepariwisataan yang memperlakukan secara berbeda perbedaan antara *orang yang dipekerjakan* (*employed persons*) dan *pekerjaan* (*jobs*).
- 7.9 Gambar 7.1 mengilustrasikan situasi ini. *Employment* (kesempatan kerja) dalam industri pariwisata dapat diukur sebagai hitungan orang-orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan pada pekerjaan/*job* apapun di dalamnya (1, 3 dan 4a dalam Gambar 7.1), atau sebagai hitungan orang-orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan pada pekerjaan utama (1 dan 3 dalam Gambar 7.1), atau sebagai hitungan pekerjaan dalam industri-industri pariwisata (1, 3, 3a dan 4a dalam Gambar 7.1).
- 7.10 Masing-masing ukuran memiliki maksud yang berlainan, dan negara-negara mungkin mengadopsi satu di antaranya atau lebih, tergantung pada maksud pemakaiannya. Bila maksudnya adalah menentukan jumlah orang yang sampai taraf tertentu menggantungkan mata pencaharian mereka dengan bekerja di industri kepariwisataan, maka angka hitungan orang-orang dengan pekerjaan (utama atau lainnya, dalam industri) mungkin merupakan yang paling tepat. Pengukuran berdasarkan kesempatan kerja dalam pekerjaan utama, misalnya, berfungsi untuk mengukur orang-orang dengan ketergantungan signifikan pada industri kepariwisataan. Apabila maksudnya adalah untuk melakukan perbandingan antara industri kepariwisataan dan non pariwisata atau antara industri kepariwisataan

dan perekonomian secara keseluruhan, maka hitungan pekerjaan dalam industri kepariwisataan akan lebih tepat.

- 7.11 Negara-negara mungkin juga terbatas pada penghitungan atau lainnya tergantung pada kondisi unik mereka dari segi sumber data yang tersedia. Sebagai contoh, untuk menghitung orang-orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan (semua pekerjaan), kiranya perlu untuk memiliki informasi mengenai industri dari setiap pekerjaan orang-orang dengan pekerjaan ganda. Jika informasi ini tidak tersedia, hitungannya perlu dibatasi pada orang-orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan dalam pekerjaan utama.

GAMBAR 7.1. PEMILIK SATU PEKERJAAN DAN LEBIH DALAM INDUSTRI KEPARIWISATAAN



- 7.12 Mengenai masing-masing pekerjaan dalam industri-industri pariwisata, orang-orang yang dipekerjakan dalam industri-industri pariwisata dapat diklasifikasikan dalam salah satu kategori berikut ini: (i) pekerjaan dengan bayaran atau (ii) pekerjaan mandiri (*self-employment*).

(a) *Pekerjaan dengan bayaran:*

Bekerja: orang-orang yang selama masa acuan tertentu melakukan sejumlah pekerjaan untuk upah atau gaji dalam bentuk uang atau natura/barang.

Dengan pekerjaan tetapi tidak bekerja: orang-orang yang, sesudah melaksanakan pekerjaan saat ini, untuk sementara tidak bekerja dalam masa acuan dan memiliki keterkaitan formal pada pekerjaan mereka.

(b) *Kerja mandiri /Self-employment:*

Bekerja: orang-orang yang dalam masa acuan tertentu melakukan sejumlah pekerjaan untuk laba atau nafkah, dalam bentuk uang atau natura.

Memiliki usaha tapi tidak bekerja: orang-orang dengan suatu usaha, yang mungkin berupa bisnis, pertanian atau perusahaan jasa, yang sementara tidak bekerja dalam masa acuan karena alasan tertentu.³⁵

35 International Labour Office, "Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment". Thirteenth International Conference of Labour of Labour Statisticians. *Current International Recommendations on Labour Statistics, 2000 Edition*. Geneva, 2000, p. 25.

- 7.13 *Pekerjaan mandiri /self-employment jobs* adalah pekerjaan yang imbalannya tergantung langsung pada laba (atau potensi laba) yang dihasilkan dari barang maupun jasa yang diproduksi.³⁶
- 7.14 *Pekerja mandiri/Self-employed* dapat dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang memiliki dan tidak memiliki pegawai upahan. Mereka yang memiliki pegawai upahan dikategorikan sebagai *pengusaha/employers* dan mereka yang tanpa pegawai upahan diklasifikasikan sebagai *pekerja untuk diri sendiri*. Selain itu, pekerja mandiri mencakup juga pekerja keluarga yang ikut terlibat dan anggota koperasi produsen.
- 7.15 Boks 7.2 berisi definisi *pegawai/employees* dan *pengusaha/employers* dan mengidentifikasi sejumlah kategori khusus untuk orang-orang yang mungkin didapati bekerja dalam industri kepariwisataan.

Boks 7.2 Status dalam kerja: Definisi-definisi pokok

- (i) *Employees/pegawai* adalah semua pekerja yang memegang jenis pekerjaan yang didefinisikan sebagai “pekerjaan upahan”. Ada perjanjian, formal atau informal, antara perusahaan dan seseorang, dengan mana orang tersebut bekerja bagi perusahaan untuk mendapatkan imbalan uang atau barang. *Pegawai dengan kontrak tetap/Employees with stable contracts* adalah “pegawai” yang sudah memiliki, dan tetap/masih memiliki, suatu kontrak kerja eksplisit (tertulis atau lisan) atau implisit, atau serangkaian kontrak seperti itu, dengan pengusaha yang sama secara kontinyu. “On a continuous basis/secara kontinyu” menyiratkan masa dipekerjakan yang lebih panjang daripada jangka waktu minimum yang ditetapkan menurut keadaan nasional. (Bila jeda diperkenankan dalam jangka waktu minimum ini, maka jeda maksimum tersebut juga harus ditentukan menurut kondisi nasional). Pegawai tetap/regular employees adalah “pegawai dengan kontrak tetap” di mana organisasi pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran pajak dan sumbangan jaminan sosial dan/atau di mana hubungan kontraknya diatur menurut perundangan ketenagakerjaan nasional.
- (ii) *Pengusaha/Employers* adalah pekerja yang, bekerja untuk kepentingan sendiri atau dengan satu atau beberapa mitra, memiliki pekerjaan yang didefinisikan sebagai “pekerjaan mandiri/self-employment job” dan, dalam kapasitas ini, secara kontinyu (termasuk masa acuan) melibatkan satu orang atau lebih untuk bekerja bagi mereka dalam bisnis mereka sebagai “pegawai”.
- (iii) *Pekerja untuk kepentingan sendiri/Own-account workers* adalah pekerja yang, bekerja untuk usaha sendiri atau bersama satu mitra atau lebih, bekerja untuk usaha mereka sendiri, memiliki jenis pekerjaan yang didefinisikan sebagai “pekerjaan mandiri/self-employment job”, dan tidak melibatkan “pegawai” untuk bekerja bagi mereka secara kontinyu selama masa acuan. Harus dicatat bahwa selama masa acuan anggota-anggota kelompok ini mungkin melibatkan “pegawai”, asalkan hal ini tidak bersifat kontinyu. (Para mitra mungkin merupakan anggota keluarga, atau dapat juga tidak.)
- (iv) *Pekerja lepas/Casual workers* adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja eksplisit atau implisit, yang tidak diharapkan untuk berlanjut lebih dari suatu jangka waktu pendek, yang durasinya ditetapkan oleh kondisi nasional.
- (v) *Pekerja dalam pekerjaan jangka pendek/Workers in short-term employment* adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja eksplisit atau implisit yang diharapkan berlangsung lebih panjang daripada jangka waktu yang digunakan untuk mendefinisikan “pekerja lepas/casual workers”, tetapi lebih pendek dari pada yang digunakan untuk mendefinisikan “pegawai tetap/regular employees”.
- (vi) *Pekerja musiman/Workers in seasonal employment* adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja eksplisit atau implisit, waktu dan durasi kontraknya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman seperti siklus iklim, libur nasional dan/atau panen.
- (vii) *Pekerja luar/Outworkers* adalah pekerja yang: (a) memiliki kontrak kerja eksplisit atau implisit yang sepakat untuk bekerja bagi suatu usaha, atau memasok barang dan jasa dalam jumlah tertentu kepada perusahaan tertentu, dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat sebelumnya.; tetapi (b) yang tempat

36 International Labour Office, “Resolution concerning the International Classification of Status in Employment (ICSE), adopted by the Fifteenth International Conference of Labour of Labour Statisticians. *Current International Recommendations on Labour Statistics, 2000 Edition*. Geneva, 2000, pp. 20-23.

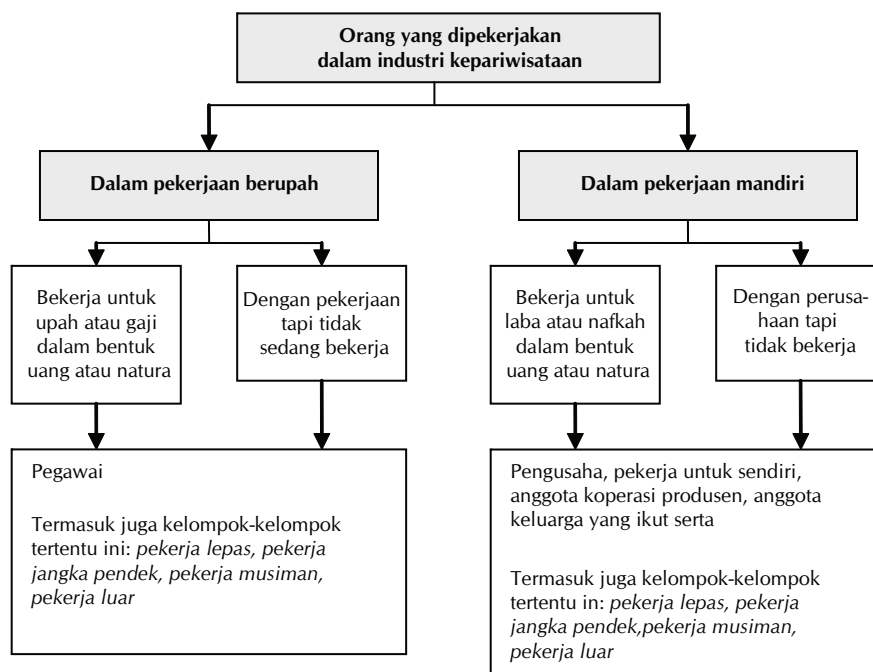
kerjanya tidak di dalam tempat usaha perusahaan tersebut. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai “pengusaha/employers” bila mereka melibatkan pekerja lain dengan syarat-syarat yang diuraikan dalam paragraf (ii) di atas.

Pekerja dalam kategori (iv) – (vii) dapat diklasifikasikan sebagai “pegawai” atau “pekerja usaha sendiri” menurut karakteristik-karakteristik spesifik dari kontrak kerjanya.

Sumber: International Labour Office. “Resolution concerning the International Classification of Status in Employment (ICSE)”, adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians. Current International Recommendations on Labour Statistics. 2000 Edition. Geneva, 2000, pp. 20-22

7.16 Gambar 7.2. berikut mengilustrasikan dan mengikhtisarkan kategori-kategori orang yang dipekerjakan dalam indu kepariwisataan, seperti didefinisikan di atas.

GAMBAR 7.2. LAPANGAN KERJA DALAM INDUSTRI KEPARIWISATAAN: KATEGORI POKOK ORANG YANG DIPEKERJAKAN



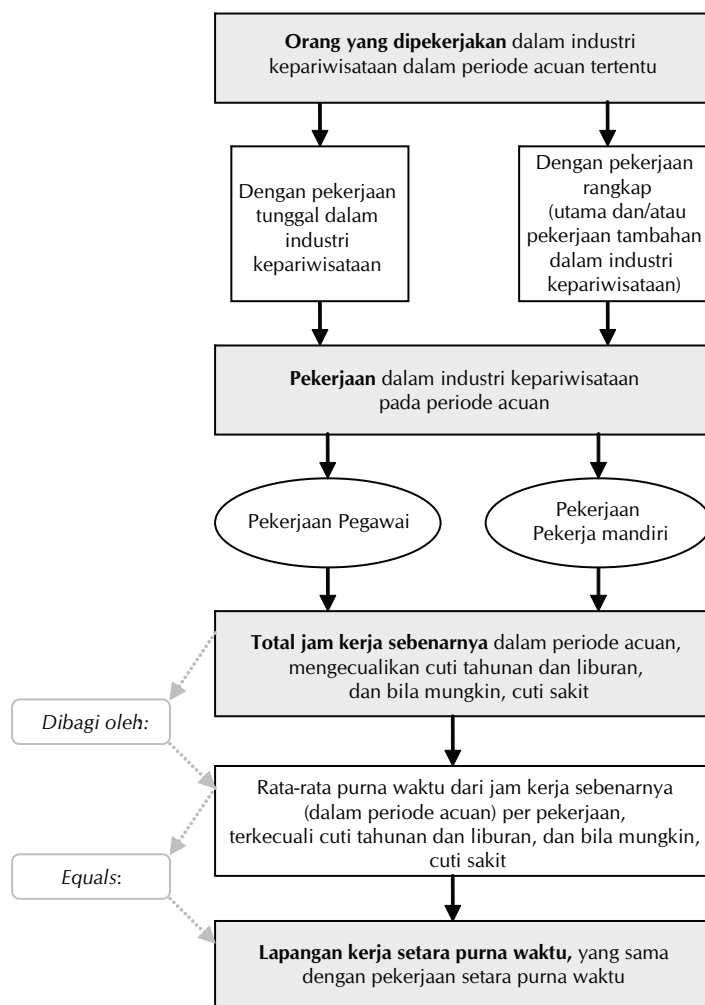
B. Lapangan kerja sebagai permintaan dan penawaran tenaga kerja

7.17 Kerja berarti suatu kegiatan yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa dalam batasan produksi SNA. Dalam kerangka kerja itu, pasar tenaga kerja dapat ditandai oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja.

7.18 Perusahaan membutuhkan orang untuk bekerja pada berbagai pos dan pos-pos ini dapat saja lowong (lowongan) atau terisi (pekerjaan). Ini adalah sisi permintaan tenaga kerja. Dalam kasus kedua, unit statistiknya adalah **pekerjaan/job**. Seseorang, yang menempati suatu pos, melakukan pekerjaan sehingga memasok kerja untuk imbalan pembayaran uang atau barang/natura, atau laba. Ini adalah sisi penawaran tenaga kerja. Unit statistik di sini adalah **orang yang dipekerjakan**. Pembayaran atas kerja yang dilakukan diartikan sebagai pendapatan bagi mereka yang dipekerjakan dan sebagai bagian dari biaya untuk pengusaha.

- 7.19 Beberapa orang mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan, yang dalam kasus ini salah satunya adalah pekerjaan utama (didefinisikan berdasarkan waktu yang dihabiskan atau pendapatan yang dihasilkan) dan yang lainnya adalah sekunder. Sebaliknya, dua orang atau lebih dapat mengisi satu pos saat mengambil dua pekerjaan paruh waktu atau lebih. Sebagai akibatnya, jumlah pekerjaan (sisi permintaan) dan jumlah orang yang dipekerjakan (sisi penawaran) bukanlah kategori yang sama dan karena itu biasanya tidak cocok.
- 7.20 Berpegang pada ketentuan di atas, lapangan/kesempatan kerja dalam industri kepariwisataan dapat diungkapkan sebagai hitungan jumlah pekerjaan dalam industri- kepariwisataan atau sebagai jumlah orang-orang yang dipekerjakan. Dari perspektif permintaan (kasus pertama) dan ketika melihat jumlah pos yang terisi oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan produktif, ini adalah jumlah pekerjaan dan karakteristik mereka dapat ditentukan, dibanding/berbeda dengan jumlah dan karakteristik orang yang dipekerjakan: pekerjaan utama ditambah pekerjaan sekunder ditambah pekerjaan tambahan lainnya sama dengan jumlah total pekerjaan seseorang tertentu. Penjumlahan pekerjaan (dalam pariwisata) dari semua orang yang dipekerjakan dalam industri- kepariwisataan akan menghasilkan angka total pekerjaan dalam suatu perusahaan atau industri pariwisata, dst. Sementara untuk sisi penawaran, satu orang mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan, melibatkan kegiatan berciri pariwisata, yang mungkin berlokasi di tempat usaha yang berbeda-beda dan termasuk dalam industri pariwisata yang berbeda. Oleh karena itu, angka total orang yang dipekerjakan dalam industri kepariwisataan mungkin tidak sama dengan jumlah total dari orang-orang yang dipekerjakan dalam masing-masing industri kepariwisataan.
- 7.21 Intensitas kerja antar pekerjaan dapat berbeda, demikian juga , industri ke industri dan dari masa ke masa – pekerjaan bisa berbeda menurut waktu kerja orang yang dipekerjakan dan oleh karena itu diungkapkan dengan istilah pekerjaan purna waktu atau paruh waktu. Karena alasan ini, tidaklah memadai untuk memiliki data jumlah pekerjaan atau orang yang dipekerjakan guna mendapatkan informasi mengenai volume kerja yang dilakukan selama jangka waktu tertentu (misalnya, satu bulan atau satu tahun). Data mengenai jumlah total jam bekerja akan diperlukan. Akhirnya, bila semua pekerjaan dikonversikan ke dalam pekerjaan setara kerja purna waktu atau angka total jam bekerja,³⁷ maka volume total kerja dari satu industri pariwisata tertentu untuk jangka waktu tertentu akan dapat diperoleh.
- 7.22 Gambar 7.3 di bawah mengilustrasikan hubungan antara orang-orang yang dipekerjakan dan pekerjaan, dan jenis-jenis pengukuran yang sudah dikemukakan.

37 Seperti tercantum dalam As defined by the 1993 SNA tahun 1993 paragraf s. 17.11 sampai to 17.18.

GAMBAR 7.3. HUBUNGAN ANTARA BERBAGAI PENGUKURAN LAPANGAN KERJA PARIWISATA DALAM PERIODE TERTENTU

7.23 Untuk meringkas semua di atas, tergantung pada kebutuhan pemakai, apangan kerja dalam industri kepariwisataan dapat dikemukakan dari segi:

- Jumlah orang
- Jumlah pekerjaan (purna waktu/paruh waktu)
- Jumlah jam bekerja
- Lapangan /kesempatan kerja setara purna waktu.

C. Karakteristik-karakteristik lapangan kerja

7.24 Guna menyediakan informasi mengenai komposisi pekerjaan dalam industri kepariwisataan dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang lebih homogen untuk tujuan analisis, dan sebagai basis perbandingan statistik antar waktu dan antar negara, maka pengukuran lapangan kerja harus diklasifikasikan menurut berbagai karakteristik industri dan karakteristik orang-orang yang memegang pekerjaan tersebut.

7.25 Jadi, suatu pekerjaan, selain klasifikasi menurut waktu kerja orang yang dipekerjakan, dapat pula diklasifikasikan menurut karakteristik demografis, pendidikan dan sosial dari orang yang memegang pekerjaan tersebut. Di samping itu, imbalan yang terkait dengan suatu pekerjaan merupakan suatu karakteristik penting dan harus diklasifikasikan secara terpisah.

- 7.26 Untuk perbandingan internasional, klasifikasi statistik lapangan kerja dalam industri kepariwisataan harus mematuhi atau dapat dikonversikan pada klasifikasi standar internasional yang paling akhir diadopsi seperti :
- International Standard Industrial Classification (ISIC Rev. 4) dan penerapannya untuk statistik kepariwisataan.
 - International Standard Classification of Occupations (ISCO-88).³⁸
 - International Standard Classification of Education (ISCED-97).
 - International Classification of Status in Employment (ICSE-93).³⁹
- 7.27 Untuk menganalisa lapangan kerja dalam industri kepariwisataan secara memadai, **direkomendasikan** agar negara-negara mengumpulkan variabel-variabel kunci berikut ini untuk masing-masing industri pariwisata seperti diidentifikasi dalam Bab 6 dan untuk industri kepariwisataan secara keseluruhan:
- Lapangan kerja menurut kelompok usia, jenis kelamin dan kewarganegaraan/negara tempat tinggal (bila relevan);
 - Lapangan kerja menurut jenis usaha (ukuran, formal, informal,⁴⁰ dll.);
 - Lapangan kerja yang diklasifikasi menurut jabatan dan status kerja;
 - Pekerjaan tetap/sementara dikemukakan dalam bentuk jumlah pekerjaan, jam bekerja, setara penuh waktu, dll.
 - Lapangan kerja menurut tingkat pendidikan.
 - Jam kerja (normal/biasa, yang sebenarnya dijalani, yang dibayar).
 - Pengaturan waktu kerja.
- 7.28 Karena variabel-variabel lapangan kerja pada akhirnya digunakan untuk analisis mendalam terhadap industri kepariwisataan suatu negara dalam konteks sosial dan ekonomi, maka negara harus juga mengumpulkan variabel-variabel berikut yang menandai aspek keuangan tenaga kerja:
- *Kompensasi/Compensation* pegawai yang mencakup upah dan gaji dalam bentuk uang atau natura, dan nilai kontribusi sosial yang dibayarkan oleh pengusaha,⁴¹ untuk masing-masing industri dan menurut kategori pekerja.
 - *Biaya tenaga kerja/Labour cost* yang selain imbalan atas kerja juga mencakup biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk pelatihan ketrampilan, layanan kesejahteraan dan aneka ragam item lain yang tidak selalu dicantumkan dalam kompensasi pegawai seperti transport, pakaian kerja dan rekrutmen, bersama dengan pajak dianggap sebagai biaya tenaga kerja.⁴²
 - *Pendapatan campuran/Mixed income* dari pekerja-pekerja mandiri.⁴³

38 International Labour Office. "International Standard Classification of Occupations (ISCO-88). Geneva, 1990. Currently, ISCO-88 is being updated and its new version (ISCO-08) is expected to be available as of 2008.

39 _____ "Resolution concerning the International Classification of Status in Employment (ICSE), adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians". *Current International Recommendations on Labour Statistics. 2000 Edition*. Geneva, 2000, pp. 20-23.

40 _____ "Resolution concerning statistics of employment in the informal sector", *Current International Recommendations on Labour Statistics. 2000 Edition*. Geneva, 2000, pp. 32-40.

41 Seperti tercantum dalam "System of National Accounts 1993". Chapter VII "The primary distribution of income account", para. 7.21, p. 164.

42 International Labour Office, "Resolution concerning statistics of labour cost, adopted by the Eleventh International Conference of Labour Statisticians". *Current International Recommendations on Labour Statistics. 2000 Edition*. Geneva, 2000, pp. 41-43.

43 Seperti tercantum dalam "System of National Accounts 1993". Chapter VII "The primary distribution of income account", para. 7.80, p. 174..

D. Mengukur lapangan kerja

- 7.29 Pengumpulan data tentang lapangan kerja dalam industri kepariwisataan harus diintegrasikan dalam sistem statistik nasional reguler. Pada hakekatnya, pekerjaan dalam industri pariwisata dapat dilakukan dalam bentuk kerja upahan atau kerja mandiri. Kecil kemungkinan bahwa sebuah gambar lengkap tentang lapangan kerja dalam industri kepariwisataan dapat diperoleh dari satu sumber statistik saja. Untuk mendapatkan cakupan yang lebih baik dan karakteristik yang lebih terperinci tentang orang-orang yang dipekerjakan, negara harus, sejauh memungkinkan, menggunakan sumber-sumber pengumpulan data utama berikut: (i) survei-survei sampel berbasis rumah tangga; (ii) survei sampel berbasis usaha; dan (iii) catatan administratif.
- 7.30 Survei tenaga kerja /*Household Labour Force Surveys* merupakan sumber data penting yang pada prinsipnya dapat mencakup seluruh populasi suatu negara, seluruh industri, dan semua kategori pekerja, termasuk pekerja mandiri dan pekerja lepas. Survei seperti ini dapat pula menangkap kegiatan ekonomi dalam sektor formal maupun informal, dan juga lapangan kerja informal.
- 7.31 Penting diingat, Survei Tenaga Kerja Rumah tangga mengumpulkan data dari individu-individu dan dengan demikian menyediakan informasi tentang orang-orang yang mungkin bekerja dalam lebih dari satu pekerjaan (kerja rangkap) dan dalam industri-industri yang berlainan (pariwisata atau non pariwisata).
- 7.32 Survei-survei berbasis usaha adalah sumber penting lain untuk data mengenai pekerjaan dan orang-orang yang dipekerjakan. Bila kepentingannya adalah industri-industri spesifik, seperti halnya industri pariwisata, maka survei usaha, bila menggunakan sampel yang memadai, dapat menyediakan gambaran rinci tentang industri-industri sasaran. Tetapi harus dicatat bahwa usaha-usaha informal tidak dicakup oleh survei-survei usaha konvensional. Informasi yang andal dan terperinci mengenai topik-topik terkait dengan pekerjaan dan lapangan kerja (misalnya, pendapatan, imbalan dan biaya tenaga kerja) dapat diperoleh dalam survei usaha, khususnya bila mereka dapat mengambil data dari catatan gaji dan catatan lain yang tersedia.
- 7.33 Statistik berdasarkan *catatan-catatan administratif* (seperti arsip jaminan sosial, laporan pajak, laporan kerja) biasanya merupakan produk sampingan dalam proses administratif. Catatan tersebut seringkali didasarkan pada operasi yang terus menerus, dan karenanya dapat menjadi sumber yang berguna untuk data longitudinal lainnya. Namun demikian, mereka dapat juga memiliki berbagai kelemahan, seperti cakupan dan isi yang terbatas (pengecualian terhadap usaha informal), konsep-konsep dan definisi yang tidak fleksibel, tidak lengkap, tidak konsisten dan akses terbatas karena kendala administratif atau hukum.⁴⁴
- 7.34 Karena hampir tidak memungkinkan untuk secara komprehensif mengukur dan menganalisa lapangan kerja dalam industri kepariwisataan berdasarkan satu sumber statistik saja, maka pengintegrasian data dari berbagai sumber menjadi solusi yang lebih disukai. Metode ini menghasilkan lebih banyak

44 see Untuk informasi lebih lanjut mengenai sumber-sumber informasi statistik, lihat:

International Labour Office. "Survey of economically active population, employment, unemployment and underemployment: An ILO manual on concepts and methods". ILO Geneva, 1990.

_____. "Resolution concerning statistics of employment in the informal sector, adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians (January 1993)". *Current International Recommendations on Labour Statistics. 2000 Edition*. Geneva, 2000, pp. 32-38.

_____. "Guidelines concerning statistical definition of informal employment endorsed by the Seventeenth Conference of Labour Statisticians (December 2003)". *Report of the Conference, Geneva, Seventeenth Conference of Labour Statisticians, 24 November – 3 December 2003*.

_____. "An integrated system of wages statistics: A manual on methods". Geneva, 1979.

_____. "Labour Statistics based on administrative records: Guidelines on compilation and presentation". ILO/EASMAT, ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, 1997.

informasi komprehensif, menyediakan tinjauan luas yang lebih baik dan gambaran yang lebih konsisten, dan menghasilkan analisis yang lebih akurat.

- 7.35 Meskipun kemajuan signifikan sudah terjadi di tahun-tahun belakangan ini dalam mengembangkan kerangka kerja metodologi untuk pengintegrasian informasi tentang lapangan kerja pariwisata dengan agregat-agregat makro ekonomi lain dan kemajuan dalam kemudahan membandingkan data internasional, seperti *Tourism Satellite Account* (lihat Bab 8) dan *OECD Employment Module*,⁴⁵ masih banyak yang masih harus dikerjakan untuk menemukan cara lebih baik atau untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan data dari beragam sumber dan membentuk tautan yang lebih baik dengan SNA.

45 Organisation for Economic Cooperation and Development. "Guidelines for a Tourism Satellite Account: the employment module". Paris 1999.

